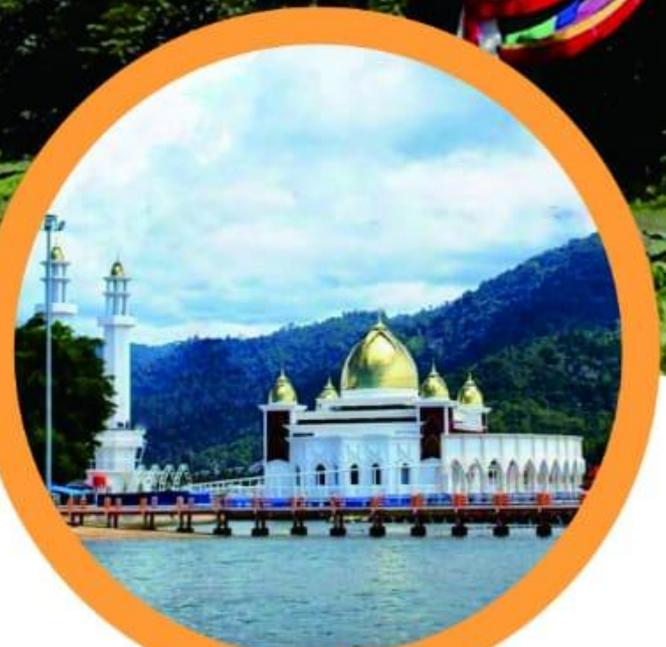




LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)



**Kabupaten Pesisir Selatan
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024**





LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)

Kabupaten Pesisir Selatan
Provinsi Sumatera Barat
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena nikmat, berkah, dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan baik. LPPD merupakan kewajiban Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir serta dalam pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Sumatera Barat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini merupakan dokumen dalam upaya menciptakan akuntabilitas dan transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja birokrasi pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yang dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Selain itu, LPPD juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan



kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan serta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Pesisir Selatan dimasa yang akan datang.

Painan, 20 Maret 2025

BUPATI PESISIR SELATAN



H. HENDRAJONI, S.H.,M.H



H. Hendrajoni, S.H., M.H
BUPATI PESIRIR SELATAN



Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H
WAKIL BUPATI PESIRIR SELATAN



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	12
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	21
BAB II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	26
2.1. Capaian Kinerja Makro	26
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	27
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	27
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	36
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	38
2.3.a Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	38
2.3.b Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja	39
2.3.c Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya	42
2.3.d Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah	43
CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	45
BAB III. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	136
3.1. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuankan	136
3.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat di atasnya	136
3.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya	137
3.2. Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaiannya	137
BAB IV. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	138
4.1. Bidang Urusan Pendidikan	
4.1.a Jenis Pelayanan Dasar	138
4.1.b Target Pencapaian SPM	139

4.1.c.	Anggaran	139
4.1.d.	Dukungan Personil	140
4.1.e.	Hasil Capaian	140
4.1.f.	Permasalahan dan Solusi	142
4.2.	Bidang Urusan Kesehatan	143
4.2.a.	Jenis Pelayanan Dasar	143
4.2.b.	Target Pencapaian SPM	148
4.2.c.	Anggaran	149
4.2.d.	Dukungan Personil	150
4.2.e.	Hasil Capaian	155
4.2.f.	Permasalahan dan Solusi	155
4.3.	Bidang Urusan Pekerjaan Umum	156
4.3.a.	Jenis Pelayanan Dasar	156
4.3.b.	Target Pencapaian SPM	156
4.3.c.	Anggaran	157
4.3.d.	Dukungan Personil	157
4.3.e.	Hasil Capaian	157
4.3.f.	Permasalahan dan Solusi	157
4.4.	Bidang Urusan Perumahan Rakyat	159
4.4.a.	Jenis Pelayanan Dasar	159
4.4.b.	Target Pencapaian SPM	164
4.4.c.	Realisasi	166
4.4.d.	Alokasi Anggaran	167
4.4.e.	Dukungan Personil	168
4.4.f.	Permasalahan dan Solusi	168
4.5.	Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi PP)	169
4.5.a.	Jenis Pelayanan Dasar	169
4.5.b.	Target Pencapaian SPM	170
4.5.c.	Anggaran	170
4.5.d.	Dukungan Personil	171
4.5.e.	Hasil Capaian	172
4.5.f.	Permasalahan dan Solusi	172
	Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Damkar)	173
4.5.a.	Jenis Pelayanan Dasar	173
4.5.b.	Target Pencapaian SPM	173
4.5.c.	Anggaran	173

4.5.d.	Dukungan Personil	174
4.5.e.	Hasil Capaian	174
4.5.f.	Permasalahan dan Solusi	174
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	175
4.5.a.	Jenis Pelayanan Dasar	175
4.5.b.	Target Pencapaian SPM	176
4.5.c.	Anggaran	177
4.5.d.	Dukungan Personil	177
4.5.e.	Permasalahan dan Solusi	178
4.6.	Bidang Urusan Sosial	178
4.6.a.	Jenis Pelayanan Dasar	178
4.6.b.	Target Pencapaian SPM	179
4.6.c.	Alokasi Anggaran	179
4.6.d.	Dukungan Personil	180
4.6.e.	Hasil Capaian	180
4.6.f.	Permasalahan dan Solusi	197
BAB V	PENUTUP	198



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan adalah salah satu kabupaten yang terletak di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat. Pembentukan Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan terbaru yang telah melalui tahapan dan proses legislasi dan dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan bekerja sama dengan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun dasar hukum pembentukan Kabupaten Pesisir Selatan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970).

Pembentukan dan pembagian wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan sudah melalui beberapa tahapan pemekaran Kecamatan dan pemekaran Desa/Nagari yang pada saat ini terdiri atas 15 kecamatan (pemekaran 3 kecamatan, 16 Juli 2012) dan 182 nagari (pemekaran Nagari tahun 2011).

Sektor perkebunan terutama perkebunan sawit mulai berkembang pesat sejak sepuluh tahun terakhir, yang berlokasi di Kecamatan Pancung Soal, Basa Ampek Balai dan Lunang. Melibatkan beberapa investor nasional dengan pola perkebunan inti dan plasma.

Pesisir Selatan selain itu juga memiliki panorama alam yang cukup cantik dan mempesona. Kawasan Mandeh misalnya, sekarang kawasan wisata ini oleh pemerintah pusat masuk dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPNAS) mewakili kawasan barat Indonesia.

Kawasan wisata potensial lainnya adalah Jembatan Akar, Water Pall Bayang Sani, Cerocok Beach Painan, Bukit Langkisau, Nyiur Melambai serta sejumlah objek wisata sejarah, seperti Pulau Cingkuak (Cengco), Peninggalan Kerajaan Inderapura dan Rumah Gadang Mandeh Rubiah Lunang.

b. Data Geografis Wilayah

Pada Undang-Undang (UU) Nomor 49 Tahun 2024 Ibu Kota Kabupaten Pesisir Selatan bernama Painan yang berkedudukan di Kecamatan IV Jurai. Kabupaten Pesisir Selatan terletak di ujung paling selatan Provinsi Sumatera Barat, dilalui jalur lintas barat Sumatera, dan berada di persimpangan strategis menuju Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi. Secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan terletak di titik 0° 57' 31, 21'' LS - 2° 28' 42, 32'' LS dan 100° 17' 48, 64 BT - 101° 17' 34, 3 BT, dengan luas ± 6.049.33 km², 22 % dari luas Provinsi Sumatera Barat. Dengan luas wilayah ini, maka Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kabupaten terluas di Provinsi Sumatera Barat. Panjang garis pantai Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 220 kilometer, membentang



dari perbatasan dengan Kota Padang di utara, sampai ke perbatasan dengan Provinsi Bengkulu di Selatan.

Letak Kabupaten Pesisir Selatan di sisi Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia, di sisi Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Di sisi Utara berbatasan dengan Kota Padang, serta di sisi Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara. Painan sebagai Ibukota Kabupaten Pesisir Selatan, berjarak 78 kilometer dari Kota Padang, atau sejauh 102 kilometer dari Bandara Internasional Minangkabau. Jarak tempuh Painan ke Bandara BIM dapat ditempuh dengan perjalanan darat dalam waktu kurang dari 3 jam.

Secara administratif, Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 wilayah kecamatan dan 182 wilayah nagari. Jumlah nagari (nama lain dari desa) yang dimiliki oleh Kabupaten Pesisir Selatan, adalah yang terbanyak diantara kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Gambaran terhadap luas masing-masing kecamatan dan jumlah nagari serta kampung dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Luas Kecamatan, Jumlah Nagari dan Kampung

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Jumlah Nagari	Jumlah Kampung
A.	Wilayah Darat	6.049,33	182	480
1.	Koto XI Tarusan	437,37	23	51
2.	IV Nagari Bayang Utara	80,92	17	45
3.	Bayang	242,33	6	17
4.	IV Jurai	368,19	20	52
5.	Batang Kapas	277,54	9	29
6.	Sutera	569,81	12	32
7.	Lengayang	632,96	9	45
8.	Ranah Pesisir	562,44	10	27
9.	Linggo Sari Baganti	557,66	16	43
10.	Airpura	547,41	10	24
11.	Pancung Soal	380,10	10	20
12.	Ranah Ampek Hulu Tapan	187,46	10	20
13.	Basa Ampek Balai Tapan	281,96	10	20
14.	Lunang	456,73	28	27
15.	Silaut	466,45	10	28
B.	Wilayah Laut	84,312	84,312	84,312

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki topografi wilayah berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar 0-1000 m dari permukaan laut, memiliki 57 buah pulau serta dialiri sebanyak 18 sungai dengan 11 sungai besar dan 7 sungai kecil. Secara umum Kabupaten Pesisir Selatan beriklim tropis dengan temperatur bervariasi antara 230° C hingga 320° C disiang hari dan 20° C 280 °C dimalam hari dengan curah hujan rata-rata 224.63 mm perbulan. Kota Painan sebagai ibukota kabupaten berada pada ketinggian 3 meter dari permukaan laut dan untuk kota kecil lain pada umumnya terletak pada lokasi yang rendah kecuali daerah Asam Kumbang, Kecamatan IV Nagari Bayang

Utara berada pada ketinggian 60 meter di atas permukaan laut. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2
Ketinggian Beberapa Tempat dari Permukaan Laut dan Jarak
Ibukota Kabupaten menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Kecamatan <i>District</i>	Tinggi Wilayah (mdpl) <i>Altitude (masl)</i>	Jarak ke Ibukota Kabupaten (km) <i>Distance to the Capital of Regency (km)</i>
(1)	(2)	(3)
Silaut	14	170,00
Lunang	30	157,00
Basa Ampek Balai Tapan	25	136,00
Ranah Ampek Hulu Tapan	28	138,00
Pancung Soal	15	111,00
Airpura	39	108,00
Linggo Sari Baganti	7	89,60
Ranah Pesisir	4	72,90
Lengayang	2	54,80
Sutera	3	34,80
Batang Kapas	5	18,90
IV Jurai	3	7,60
Bayang	3	23,60
IV Nagari Bayang Utara	60	12,50
Koto XI Tarusan	3	22,20
Pesisir Selatan	0-1000	-

Catatan/Note: Tinggi wilayah ibu kota kecamatan/ *Height of the district capital area*

Sumber/Source: - Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan/*Regional Development Planning, Research and Development Agency of Pesisir Selatan Regency*

- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan/*Department of Public Works and Spatial Planning of Pesisir Selatan Regency*

Sumber : BPS, Buku Pesisir Selatan Dalam Angka 2025

c. Informasi Umum Data Kependudukan

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan jumlah penduduk tahun 2024 tercatat 531.494 jiwa yang terdiri dari 266.525 laki-laki dan 264.969 perempuan.. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Komposisi Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pancung Soal	14.169	13.919	28.088
2	Ranah Pesisir	17.329	17.884	35.213
3	Lengayang	31.796	31.839	63.635
4	Batang Kapas	18.830	18.959	37.789



No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
5	IV Jurai	26.843	26.647	53.490
6	Bayang	22.264	22.353	44.617
7	Koto XI Tarusan	27.880	27.675	55.555
8	Sutera	30.128	29.712	59.840
9	Linggo Sari Baganti	26.101	25.896	51.997
10	Lunang	11.781	11.404	23.185
11	Basa Ampek Balai	8.353	8.305	16.658
12	IV Nagari Bayang	4.222	4.370	8.592
13	Airpura	10.203	9.968	20.171
14	Ranah Ampek Hulu	8.316	8.048	16.364
15	Silaut	8.310	7.990	16.300
Total Kabupaten		266.525	264.969	531.494

Sumber : Data dari PDAK Kemendagri Semester I Tahun 2024

Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, menurut data Badan Pusat Statistik yaitu wilayah yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Bayang dengan kepadatan rata-rata 553,51 jiwa/Km² dan Kecamatan Silaut dengan kepadatan terendah rata-rata 35,24 jiwa/Km². Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.4 sebagai berikut:

Tabel 1.4
Kepadatan Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan

Kecamatan District	Persentase Penduduk Percentage of Total Population	Kepadatan Penduduk per km ² Population Density per sq.km
(1)	(4)	(5)
1 Silaut	3,08	35,24
2 Lunang	4,36	50,94
3 Basa Ampek Balai Tapan	3,15	89,71
4 Ranah Ampek Hulu Tapan	3,08	58,24
5 Pancung Soal	5,29	51,57
6 Airpura	3,82	53,64
7 Linggo Sari Baganti	9,83	94,08
8 Ranah Pesisir	6,61	62,71
9 Lengayang	11,94	100,69
10 Sutera	11,29	105,79
11 Batang Kapas	7,09	136,38
12 IV Jurai	10,05	145,75
13 Bayang	8,39	553,51
14 IV Nagari Bayang Utara	1,61	35,29
15 Koto XI Tarusan	10,41	127,10
Pesisir Selatan	100,00	88,24

Sumber : Data BPS, Buku Pesisir Selatan Dalam Angka 2025



Berdasarkan struktur usia, menurut Badan Pusat Statistik komposisi penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang produktif (range usia 20 s/d 54 tahun) hanya 264.184 jiwa (49,4 persen). Sementara usia yang di anggap tidak produktif berjumlah 269.602 jiwa (50,5 persen), untuk lebih jelasnya komposisi penduduk Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan struktur usia dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.5
Komposisi Penduduk Menurut Struktur Usia
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Kelompok Umur Age Groups	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	19.572	18.050	37.622
5-9	24.456	22.762	47.218
10-14	25.446	23.580	49.026
15-19	20.088	20.582	40.670
20-24	24.725	23.439	48.164
25-29	21.696	19.666	41.362
30-34	17.589	16.283	33.872
35-39	18.373	17.951	36.324
40-44	19.291	19.033	38.324
45-49	18.039	18.109	36.148
50-54	14.767	15.223	29.990
55-59	12.788	13.634	26.422
60-64	10.040	12.085	22.125
65-69	8.795	10.692	19.487
70-74	6.433	6.910	13.343
75+	5.409	8.280	13.689
Pesisir Selatan	267.507	266.279	533.786

Sumber : BPS, Buku Pesisir Selatan Dalam Angka 2025

Sumber utama perekonomian masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan berada pada sektor agraris yang meliputi pertanian, perkebunan dan perikanan. Sektor agraris ini belum sepenuhnya diolah dengan penerapan teknologi yang maju, sebagian besar masih diolah secara tradisional.

Menurut komposisi penduduk usia 15 tahun menurut jenis kegiatan selama seminggu yang lalu dan jenis kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dimana total angkatan bekerja yaitu 251.380 dan masih terdapat 13.399 pengangguran didalamnya. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 1.6.

Tabel 1.6

Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Laki-Laki+ Perempuan <i>Male+Female</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja/<i>Economically Active</i>	167.864	96.915	264.779
1. Bekerja/ <i>Working</i>	159.103	92.277	251.380
2. Pengangguran Terbuka/ <i>Unemployment</i>	8.761	4.638 ¹	13.399
II. Bukan Angkatan Kerja/<i>Not Economically Active</i>	32.697	103.715	136.412
1. Sekolah/ <i>Attending School</i>	12.205	16.598	28.803
2. Mengurus Rumah Tangga/ <i>Housekeeping</i>	7.484 ¹	81.330	88.814
3. Lainnya/ <i>Others</i>	13.008	5.787	18.795
Jumlah/<i>Total</i>	200.561	200.630	401.191

Sumber : Data BPS, Buku Pesisir Selatan Dalam Angka 2025

Tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan masih relatif rendah. Namun berdasarkan indikator yang ada, terjadi kecenderungan peningkatan. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dari aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, serta indeks pembangunan manusia seperti dapat dilihat pada tabel 1.7.

Tabel 1.7

Data Perkembangan Pembangunan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup	73,02	73,12	73,20	73,27	73,44
Angka Harapan Lama Sekolah	13,32	13,33	13,35	13,36	13,37
Rata-rata lama sekolah	8,26	8,27	8,43	8,58	8,81
IPM	70,87	71,01	71,72	72,24	72,87

Sumber : Data BPS, Buku Pesisir Selatan Dalam Angka 2025

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Nagari/Kelurahan di Kabupaten Pesisir Selatan

Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 kecamatan (pemekaran 3 kecamatan, 16 Juli 2012) dan 182 nagari (pemekaran Nagari tahun 2011), dan 480 kampung dengan Kecamatan Terluas adalah Kecamatan Lengayang 632,96 km dan Kecamatan Terkecil adalah Kecamatan Bayang 80,32 km. hal ini dapat dilihat pada tabel 1.8 dan 1.9 berikut:

Tabel 1.8
Jumlah Kecamatan, Ibukota Kecamatan dan Luas Kecamatan
di Kabupaten Pesisir Selatan 2024

Kecamatan <i>District</i>	Ibukota Kecamatan <i>Capital of District</i>	Luas <i>Total Area</i> (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Silaut	Silaut	466,45
Lunang	Tanjung Beringin	456,73
Basa Ampek Balai Tapan	Tapan	187,46
Ranah Ampek Hulu Tapan	Pasar Beriang	281,96
Pancung Soal	Inderapura	547,41
Airpura	Tamuan	380,10
Linggo Sari Baganti	Air Haji	557,66
Ranah Pesisir	Balai Selasa	562,44
Lengayang	Kambang	632,96
Sutera	Surantih	569,81
Batang Kapas	Limau Sundai	277,54
IV Jurai	Salido	368,19
Bayang	Pasar Baru	80,92
IV Nagari Bayang Utara	Asam Kumbang	243,33
Koto XI Tarusan	Nanggalo	437,37
Pesisir Selatan		6.049,33

Sumber : Data BPS, Buku Pesisir Selatan Dalam Angka 2025

Tabel 1.9
Jumlah Desa/Kelurahan/Nagari dari tahun 2020 - 2024
di Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Silaut	10	10	10	10	10
2	Lunang	10	10	10	10	10
3	Basa Ampek Balai Tapan	10	10	10	10	10
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	10	10	10	10	10
5	Pancung Soal	10	10	10	10	10

6	Airpura	10	10	10	10	10
7	Linggo Sari Baganti	16	16	16	16	16
8	Ranah Pesisir	10	10	10	10	10
9	Lengayang	9	9	9	9	9
10	Sutera	12	12	12	12	12
11	Batang Kapas	9	9	9	9	9
12	IV Jurai	20	20	20	20	20
13	Bayang	17	17	17	17	17
14	IV Nagari Bayang Utara	6	6	6	6	6
15	Koto XI Tarusan	23	23	23	23	23
Pesisir Selatan		182	182	182	182	182

Sumber : Data BPS, Buku Pesisir Selatan Dalam Angka 2025

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

1. Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah yang memimpin suatu daerah otonom dalam hal ini Bupati, maka diperlukan adanya perangkat daerah. Perangkat daerah adalah lembaga atau badan pemerintahan daerah yang membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Perangkat daerah antara lain terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan dan kecamatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.10 berikut:

Tabel 1.10
Jumlah dan Nama Perangkat Daerah di
Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024

No.	Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1.	Sekretariat Daerah	Perda No. 2 Tahun 2021
2.	Sekretariat DPRD	Perda No. 2 Tahun 2021
3.	Inspektorat	Perda No. 2 Tahun 2021
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perda No. 2 Tahun 2021
5.	Dinas Kesehatan	Perda No. 2 Tahun 2021
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perda No. 2 Tahun 2021
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup	Perda No. 2 Tahun 2021
8.	Dinas Pertanian	Perda No. 2 Tahun 2021
9.	Dinas Perikanan dan Pangan	Perda No. 2 Tahun 2021
10.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perda No. 2 Tahun 2021
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perda No. 2 Tahun 2021
12.	Dinas Perhubungan	Perda No. 2 Tahun 2021
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perda No. 2 Tahun 2021
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perda No. 2 Tahun 2021
15.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Perda No. 2 Tahun 2021
16.	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Perda No. 2 Tahun 2021
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Perda No. 2 Tahun 2021

18.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Perda No. 2 Tahun 2021
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Perda No. 2 Tahun 2021
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perda No. 2 Tahun 2021
21.	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Perda No. 2 Tahun 2021
22.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Perda No. 2 Tahun 2021
23.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Perda No. 2 Tahun 2021
24.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perda No. 2 Tahun 2021
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perda No. 7 Tahun 2014
26.	Kantor Camat Koto XI Tarusan	Perda No. 2 Tahun 2021
27.	Kantor Camat Bayang	Perda No. 2 Tahun 2021
28.	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara	Perda No. 2 Tahun 2021
29.	Kantor Camat IV Jurai	Perda No. 2 Tahun 2021
30.	Kantor Camat Batang Kapas	Perda No. 2 Tahun 2021
31.	Kantor Camat Sutera	Perda No. 2 Tahun 2021
32.	Kantor Camat lengayang	Perda No. 2 Tahun 2021
33.	Kantor Camat Ranah Pesisir	Perda No. 2 Tahun 2021
34.	Kantor Camat Linggo Sari Baganti	Perda No. 2 Tahun 2021
35.	Kantor Camat Pancung Soal	Perda No. 2 Tahun 2021
36.	Kantor Camat Airpura	Perda No. 2 Tahun 2021
37.	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	Perda No. 2 Tahun 2021
38.	Kantor Camat Basa Ampek hulu Tapan	Perda No. 2 Tahun 2021
39.	Kantor Camat Lunang	Perda No. 2 Tahun 2021
40.	Kantor Camat silaut	Perda No. 2 Tahun 2021

2. Pegawai Pemerintah

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Pegawai Pemerintah di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 menurut jabatan, jenis kelamin sebanyak 3.619 Perempuan dan 1.620 laki-laki dan tingkat pendidikan Sarjana (selain Tenaga Kesehatan dan Tenaga Guru) sebanyak 1.067 orang, tamat SMA (selain Tenaga Kesehatan dan Tenaga Guru) sebanyak 229 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.11
Rincian Aparatur Sipil Negara yang berada di setiap
Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Rincian ASN			Total
		Struktural	Fungsional Tertentu	Fungsional Umum (Pelaksana)	
1.	Sekretariat Daerah	17	37	42	96
2.	Sekretariat DPRD	6	6	19	31
3.	Inspektorat	8	39	6	53
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16	8	16	40
5.	Dinas Kesehatan	8	3	43	54

6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	27	59	96
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup	9	11	21	41
8.	Dinas Pertanian	9	61	35	105
9.	Dinas Perikanan dan Pangan	7	10	18	35
10.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8	6	13	27
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8	6	19	33
12.	Dinas Perhubungan	13	2	20	35
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	15	2	20
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	5	7	18
15.	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	6	8	15	29
16.	Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	8	8	13	29
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	22	5	34
18.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	12	3	23	38
19.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	7	13	9	29
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	9	12	26
21.	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	7	16	14	37
22.	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	20	9	22	51
23.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7	15	15	37
24.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	3	11	20
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	7	11	24
26.	Kantor Camat Koto XI Tarusan	8		8	16
27.	Kantor Camat Bayang	9		13	22
28.	Kantor Camat IV Nagari Bayang Utara	8		5	13
29.	Kantor Camat IV Jurai	9		7	16
30.	Kantor Camat Batang Kapas	9		5	14
31.	Kantor Camat Sutera	9		8	17
32.	Kantor Camat Lengayang	9		5	14
33.	Kantor Camat Ranah Pesisir	9		4	13
34.	Kantor Camat Linggo Sari Baganti	9		4	13
35.	Kantor Camat Pancung Soal	8		5	13
36.	Kantor Camat Airpura	8		2	10
37.	Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan	9		1	10
38.	Kantor Camat Basa Ampek hulu Tapan	8		4	12
39.	Kantor Camat Lunang	8		2	10
40.	Kantor Camat Silaut	9		4	13
Jumlah		364	351	581	1.296

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tabel 1.12

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1,781,262,184,153.00	1,690,884,513,877.88	94.93	1,654,521,568,208.74
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	208,403,292,963.00	161,576,001,454.88	77.53	153,573,816,130.74
4.1.01	Pajak Daerah	31,807,541,550.00	27,736,938,804.00	87.20	28,395,740,407.08
4.1.02	Retribusi Daerah	128,115,046,825.00	108,172,064,157.26	84.43	76,123,026,917.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	41,785,995,944.00	11,899,367,428.00	28.48	11,016,313,390.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6,694,708,644.00	13,767,631,065.62	205.65	38,038,735,416.66
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,562,806,865,776.00	1,518,538,134,126.00	97.17	1,493,284,233,498.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,458,490,109,000.00	1,427,643,629,192.00	97.89	1,419,728,079,140.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10,052,025,414.00	10,770,378,297.00	107.15	7,663,518,580.00
4.3.01	Pendapatan Hibah	9,260,695,297.00	9,260,695,297.00	100.00	7,663,518,580.00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	791,330,117.00	1,509,683,000.00	190.78	0.00
5	BELANJA DAERAH	1,903,284,139,168.00	1,741,084,667,241.16	91.48	1,622,470,878,437.44
5.1	BELANJA OPERASI	1,445,720,868,068.80	1,304,348,788,865.16	90.22	1,129,055,593,387.35
5.1.01	Belanja Pegawai	922,792,472,735.00	822,241,704,070.00	89.10	681,146,968,746.35
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	434,776,541,551.80	395,247,028,648.16	90.91	396,688,931,018.00
5.1.05	Belanja Hibah	87,989,353,782.00	86,701,606,147.00	98.54	50,962,353,213.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	162,500,000.00	158,450,000.00	97.51	257,340,410.00
5.2	BELANJA MODAL	186,007,938,466.20	172,078,546,250.00	92.51	238,530,915,401.09
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1,785,114,920.00	722,013,920.00	40.45	1,175,433,993.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37,066,108,812.20	33,851,079,267.00	91.33	40,598,387,185.09
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50,695,911,189.00	48,036,104,682.00	94.75	46,658,123,353.90
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	87,410,593,789.00	80,657,217,781.00	92.27	141,684,225,997.10
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9,050,209,756.00	8,812,130,600.00	97.37	8,414,744,872.00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6,500,000,000.00	2,135,045,328.00	32.85	4,583,826,001.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6,500,000,000.00	2,135,045,328.00	32.85	4,583,826,001.00
5.4	BELANJA TRANSFER	265,055,332,633.00	262,522,286,798.00	99.04	250,300,543,648.00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3,683,849,305.00	1,264,203,498.00	34.32	1,787,772,848.00
	SURPLUS/DEFISIT	(122,021,955,015.00)	(50,200,153,363.28)	41.14	32,050,689,771.30
6	PEMBIAYAAN DAERAH	122,021,955,015.00	122,246,955,015.36	100.18	102,374,991,822.57
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	129,310,022,062.00	129,310,022,062.36	100.00	105,900,496,822.57
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	129,310,022,062.00	129,310,022,062.36	100.00	105,900,496,822.57
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7,288,067,047.00	7,063,067,047.00	96.91	3,525,505,000.00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7,288,067,047.00	7,063,067,047.00	96.91	3,525,505,000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	122,021,955,015.00	122,246,955,015.36	100.18	102,374,991,822.57
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	72,046,801,652.08	-	134,425,681,593.87

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah

- 1) Sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Keegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaan dilapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun dari tahun sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai.
- 2) Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja serta pelayanan publik yang prima.
- 3) Memantapkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana dengan Mengurangi risiko bencana dengan membangun kesiapsiagaan dan infrastruktur di seluruh lini secara terencana dan terpadu, Memobilisasi kemampuan masyarakat dan lembaga pada masa krisis dengan tujuan utama meminimalkan korban saat bencana dan mempercepat penyelesaian masa darurat bencana, serta Memulihkan dampak bencana secara fisik dan psikologis dengan tujuan utama melaksanakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pemulihan stabilitas kehidupan daerah korban bencana.
- 4) Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkala dengan Indikator Prosentase Penyusunan APBD Tepat Waktu dan Prosentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel, Berkualitas dengan Indikator Prosentase Barang Milik Daerah Bernilai Ekonomis dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dengan indikator Hasil Penilaian AKIP.
- 5) Meningkatnya akses pendidikan, Meningkatnya mutu pendidikan, Meningkatnya jumlah seni budaya lokal yang direvitalisasi dan Meningkatnya benda cagar budaya yang direvitalisasi.
- 6) Peningkatan Target dan Realisasi Umur Harapan Hidup dari tahun ke tahun.
- 7) Menurunkan persentase angka kecelakaan pertahun.
- 8) Jumlah Produksi Perikanan menurun karena adanya wabah corona (covid 19) yang berdampak kepada perekonomian masyarakat dan faktor cuaca.
- 9) Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB dimana Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan peringkat Baik.
- 10) Peningkatan mutu genetik ternak tiap tahun dan Menurunnya angka kematian ternak dan kasus zoonosis dari tahun sebelumnya.
- 11) Menurunkan tingkat pengangguran, pemenuhan hak-hak pekerja dan peningkatan kemandirian masyarakat transmigran.

- 12) Pencapaian skor pola pangan harapan (pph) Tahun 2020.
- 13) Kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB, Produktivitas padi per hektar, Cakupan Bina Kelompok Pertanian.
- 14) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Nagari, Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Nagari, dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Nagari.
- 15) Peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance), Penetapan Objek Pemeriksaan, Jadwal dan besaran anggaran Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dan Pengoptimalan pengelolaan risiko pada tingkat Pemerintah Daerah.

b. Visi Dan Misi Kepala Daerah

1. VISI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Visi Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dapat terwujud dalam rentang waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai visi pembangunan jangka menengah daerah yang akan diharapkan terwujud pada akhir tahun 2026, yang menggambarkan tujuan dan sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya

Sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, visi Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

“MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”

Penjabaran dan filosofi dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

Sejahtera : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Maju : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, ber peradaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.

Bermartabat : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai nilai budi pekerti dan budaya yang luhur,



mengedepankan ABS-SBK (Adat Barsandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).

Akuntabel : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Profesional : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

2. MISI

Misi pembangunan 2021-2026 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, yaitu Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju, dan bermatabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Misi pembangunan 2021-2026 diarahkan untuk meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan Pesisir Selatan ke depan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fundamental perekonomian daerah. Usaha-usaha perwujudan visi 2021 dijabarkan dalam misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Strategi pembangunan daerah pada tahun 2021 disusun berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yaitu :

1. Misi Pertama:

Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan.



Misi pertama ini memuat beberapa kata kunci yaitu: (1) membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, (2) Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur, (3) Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Hal ini lahir dari adanya tuntutan masyarakat akan layanan birokrasi yang bersih, berkinerja tinggi dan pelayanan publik yang berkualitas.

Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja yang dimaksud dalam misi ini yaitu adanya saluran-saluran yang terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi, mengawasi dan memberi umpan balik terhadap setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintahan, peningkatan akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah, makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung open government pada seluruh instansi pemerintah daerah.

2. Misi Kedua:

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat

Pada misi ini terdapat dua kata kunci yang menentukan peningkatan kualitas hidup masyarakat, yaitu: (1) peningkatan derajat kesehatan; dan (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini lahir dari adanya cita-cita untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat serta pemenuhan perlindungan sosial lainnya bagi masyarakat ekonomi lemah.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat sangat terkait dengan kualitas kesehatan masyarakat dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas. Karena itu perlu untuk terus mendorong pemenuhan dan peningkatan tenaga kesehatan, sarana pelayanan primer (Puskesmas, klinik dan dokter praktek mandiri), pemenuhan prasarana pendukung (alat kesehatan, obat, dan perbekalan kesehatan lainnya), serta inovasi untuk pelayanan daerah terpencil.

Upaya ini tentu dilakukan dengan terus mendorong upaya-upaya promotif dan preventif secara masif dan terstruktur. Di sisi lain, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat ekonomi lemah, akan terus didorong sehingga beban hidup masyarakat dapat dikurangi.

3. Misi Ketiga:

Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah.

Pada misi ini terdapat hal-hal strategis yang perlu menjadi kata kunci antara lain: (1) komoditi unggulan; (2) mengoptimalkan industri pengolahan; (3) pemetaan potensi (4) pelestarian lingkungan hidup dan kawasan lindung; dan (5) pembangunan infrastruktur.

Keberlimpahan potensi daerah, khususnya lahan yang subur untuk pertanian seharusnya dapat dioptimalkan untuk menghasilkan produk-produk yang mendorong meningkatnya nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Karena itu dibutuhkan kebijakan yang benar-benar fokus pada pengembangan komoditi yang sesuai dengan keunggulan kompetitif daerah sehingga sektor pertanian dapat ditingkatkan lagi daya ungkitnya bagi kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Selain upaya untuk memperbesar nilai produksi komoditi sektor pertanian (pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan), yang tidak kalah penting adalah bagaimana memaksimalkan nilai tambah dari komoditi tersebut melalui pengembangan sistem budidaya produksi hulu-hilir yang tertata, terorganisir dan terpadu.

Pada tataran inilah konsep hilirisasi dan industrialisasi harus dijadikan arus utama pengembangan perekonomian daerah. Karena itu, ke depan pemerintah daerah akan mendorong terwujudnya keterpaduan antara upaya peningkatan produksi budidaya dengan peningkatan produk-produk turunannya yang bernilai ekonomi lebih tinggi.

Sejalan dengan upaya peningkatan nilai tambah komoditi, pemerintah daerah juga akan mencoba untuk meminimalkan production cost akibat ekonomi berbiaya tinggi yang selama ini menjadi salah satu penyebab rendahnya daya saing produk yang dihasilkan. Pemerintah daerah akan mengupayakan pemenuhan dan pemerataan infrastruktur penunjang perekonomian di seluruh wilayah seperti, konektivitas, penyediaan sumber air, jalan-jalan produksi dan sarana-prasarana lain yang dibutuhkan masyarakat. Dan yang lebih penting, untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan kekayaan alam dan potensi yang berlimpah ini maka setiap upaya pembangunan harus dilakukan dengan selalu menjaga kelestarian lingkungan.

4. Misi Keempat

Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan Sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan

Pada misi keempat ini terdapat dua kata kunci (1) Wisata yang Nyaman berkesan, dan (2) Pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkontribusi bagi kesejahteraan.

Membangun sektor pariwisata, tidak bisa dilepaskan dengan membangun manusia. Paradigma yang selama ini beranggapan bahwa membangun pariwisata itu lebih terfokus pada pembangunan destinasi dan infrastruktur saja perlu digeser kepada paradigma baru bahwa fokus utama pembangunan pariwisata itu adalah pembangunan manusianya (pelakunya). Oleh karena itu arah pengembangan kepariwisataan ke depan lebih dititikberatkan kepada pembenahan manajemen pengelolaan destinasi, penguatan peran pentahelix dan pemberdayaan masyarakat pelaku wisata.

Ke depan, Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi berfokus pada upaya menjual keindahan alam semata, namun akan ditingkatkan pada upaya menjual keunikan ragam budaya, keramahtamahan masyarakat, kenyamanan destinasi dan kreatifitas masyarakat



dan generasi muda. Karena itu kedepannya akan diberikan perhatian yang lebih kepada upaya pemberdayaan masyarakat pelaku wisata, pengembangan potensi kekayaan budaya dan kearifan lokal serta memperkuat peran nagari dalam memanfaatkan peluang daya ungkit pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata ini.

Dengan semakin meningkatnya kualitas masyarakat yang mengamalkan Sapta Pesona, maka wisatawan yang berkunjung akan merasa nyaman dan terkesan sehingga dapat tinggal lebih lama dan akan berkunjung kembali ke Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga harapan bahwa Pesisir Selatan menjadi daerah wisata favorit yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya dapat terwujud.

5. Misi Kelima

Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumber

Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing Pada misi ini terdapat dua kata kunci yang nilainya sangat strategis, yaitu: (1) pendidikan yang berkualitas; dan (2) sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.

Pendidikan yang berkualitas, murah dan terjangkau oleh semua kalangan masyarakat, menjadi target yang ingin diwujudkan pada misi ini, sehingga keadaan dimana iklim dan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatifitas, inovasi, wawasan kebangsaan, kecerdasan, kedisiplinan, rasa tanggung jawab, kreatifitas dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dicapai.

Dengan menekankan upaya pembenahan pada sisi tenaga pendidik dan sisi peserta didik secara berimbang, maka diharapkan sistem pendidikan yang dibangun dapat melahirkan insan-insan yang religius, cerdas, berakhlak dan mampu bersaing dalam era globalisasi. Misi ini juga menjadi ikhtiar Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyambut datangnya bonus demografi.

6. Misi Keenam

Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman Tenram dan Dinamis

Pada misi keenam ini terdapat dua kata kunci yaitu (1) masyarakat yang aman dan tenteram; dan (2) komunikasi yang harmonis dan dinamis antar lembaga.

Pembangunan suatu daerah akan berjalan dengan baik dan optimal serta memberikan nilai tambah positif apabila masyarakatnya berada dalam kondisi aman dan tenteram. Kondisi aman dan tenteram inilah yang akan coba diwujudkan agar selalu tercipta dalam masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, dengan tujuan agar seluruh masyarakat menjadi Bahagia. Karena itu akan diupayakan untuk meminimalkan terjadinya konflik horizontal, perselisihan keluarga/ rumah tangga, kenakalan remaja, kekerasan pada anak dan perempuan.

Untuk mewujudkan keamanan, ketentraman dan kebahagiaan masyarakat tentu perlu sinergi yang harmonis seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Organisasi kemasyarakatan serta para tokoh agama dan pemangku adat.

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Prioritas pembangunan daerah pada tahun 2020 berorientasi kepada tingkat kebutuhan, analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan. Prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Pengamalan Agama, Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal Dalam Kehidupan Bermasyarakat

Pengamalan agama, pelestarian budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat diarahkan untuk mewujudkan kerukunan hidup beragama serta menanamkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat. Pengamalan agama yang telah dilaksanakan seperti dalam Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan (MDA, TPA, LDS, Majelis Taklim, Remaja Masjid, Pengurus Masjid/Mushalla), memberikan bantuan sarana dan prasarana serta biaya operasional yang bersifat stimulan.

2) Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan;

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan diarahkan pada peningkatan pelayanan pendidikan, infrastruktur dan mutu pendidikan, menerapkan wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun, meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan, peningkatan dan pemerataan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta mewujudkan pendidikan berkarakter.

3) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Pesisir Selatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat diarahkan untuk mewujudkan tatanan hidup masyarakat yang sehat dengan gizi seimbang, melalui peningkatan pelayanan, infrastruktur dan kualitas SDM kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan ini dapat dilihat dari kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat, meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, perbaikan status gizi masyarakat, menurunnya tingkat kematian ibu dan bayi, meningkatnya angka harapan hidup, meningkatnya pengendalian terhadap penyakit menular, dan meningkatnya upaya penyehatan lingkungan.

4) Peningkatan Ekonomi Pangan Berbasis Komoditi Lokal yang Berdaya Saing

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi keanekaragaman pangan yang berbasis komoditi lokal. Namun potensi ini belum semuanya tergali secara optimal. Pengembangan potensi ekonomi pangan berbasis komoditi lokal akan meningkatkan daya saing produk industri pangan, berkembangnya penganekaragaman konsumsi pangan dengan komoditi lokal, penerapan teknologi tepat guna dalam proses produksi, meningkatkan kesempatan kerja pada sektor industri pangan.

5) Peningkatan Daya Tarik, Pemasaran, Industri dan Kelembagaan Pariwisata

Peningkatan daya tarik, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata diarahkan untuk mengembangkan objek-objek wisata utama, strategis dan potensial seperti Kawasan Mandeh, Jembatan Akar, Carocok Painan, Batu Nago, Pasir Putih Kambang dan Mandeh Rubiah menjadi objek wisata yang menarik. Dengan pengembangan pariwisata ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat, menumbuhkan kembangkan objek-objek wisata yang potensial, membuka lapangan kerja di sektor pariwisata, mewujudkan Pesisir Selatan sebagai tujuan wisata utama di Sumatera Barat, meningkatkan pemasaran objek-objek wisata pesisir selatan baik didalam maupun diluar negeri

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir untuk menarik kunjungan wisata, dan beberapa diantaranya telah menjadi event tahunan seperti Pelaksanaan Festival Langkisau dan Tour de Singkarak, serta pelaksanaan olahraga mancing sebagai agenda tahunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai upaya pengembangan wisata bahari yang berwawasan lingkungan.

6) Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Ekonomi Strategis

Pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada dikawasan perdesaan dan kawasan-kawasan potensial, yang memberikan nilai tambah kepada daerah baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Hal ini dapat dilihat dari dibangunnya infrastruktur publik, adanya akses air bersih dan sanitasi, munculnya kawasan strategis yang bernilai ekonomi serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Untuk pengembangan kawasan ekonomi yang dimaksud dalam hal ini adalah meliputi pengembangan kawasan ekonomi khusus, pengembangan kawasan produksi (agropolitan, minapolitan) dan sentra industri dimaksudkan untuk mempercepat transformasi ekonomi, seperti:

- a. Persiapan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) direncanakan untuk pengembangan KEK Pariwisata di Kecamatan Koto XI Tarusan.
- b. Pengembangan kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut.
- c. Pengembangan kawasan sentra produksi agropolitan meliputi Kecamatan Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir dan Linggosari Baganti.
- d. Pengembangan kawasan Minapolitan meliputi Kecamatan Koto XI Tarusan, Sutera, Lengayang dan Linggosari Baganti.
- e. Pengembangan sentra produksi Tanaman Pangan dan hortikultura berada di Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang, IV Nagari Bayang Utara, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggosari Baganti, Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan dan Ranah IV Hulu Tapan.
- f. Kawasan perkebunan meliputi Kecamatan Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggosari Baganti, Air Pura, Pancung Soal, BAB Tapan, Ranah IV Hulu Tapan, Lunang dan Silaut.



- g. Kawasan agroindustri meliputi kecamatan Koto XI Tarusan, Lengayang, Pancung Soal, Lunang dan Silaut.
- h. Sentra industri sulaman bayangan Barung-Barung Belantai Kecamatan Koto XI Tarusan dan Kampung Batik Lumpo Kecamatan IV Jurai.
- i. Sentra industri anyaman pandan Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang.
- j. Sentra industri makanan tradisional di Painan Kecamatan IV Jurai.

Kawasan ekonomi memerlukan dukungan aksesibilitas transportasi darat dan transportasi laut. Pengembangan Transportasi laut untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam kedaulatan maritim. Pengembangan transportasi laut di Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan dengan mendorong percepatan pembangunan Pelabuhan Panasahan Painan sebagai pelabuhan pengumpan regional yang difungsikan untuk mendukung pelabuhan Teluk Bayur.

Untuk pengembangan kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif.

Prinsip dan tujuan pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan dengan prinsip partisipatif, holistik dan komprehensif, berkesinambungan, keterpaduan, keadilan, keseimbangan, transparansi dan akuntabilitas. Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan rencana program dan kegiatan seluruh pemangku kepentingan dalam suatu kawasan.

Pengembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Pesisir Selatan meliputi Pengembangan Kawasan Berbasis Sapi Potong di Kecamatan Sutera, Integrasi Perkebunan Kelapa Sawit dengan Peternakan Sapi di Kecamatan Silaut, Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Kawasan Wisata Bahari Terpadu Mandeh, Pengembangan Kawasan Perdesaan berbasis Sentra Peternakan dan pengembangan kawasan perdesaan lainnya.

7) **Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat Berbasis Lingkungan Hidup dan Kebencanaan**

Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat berbasis lingkungan hidup dan kebencanaan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga kelestarian dan daya dukung sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan sehingga potensi sumber daya yang sudah ada dapat dipertahankan untuk usaha ekonomi masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dengan terbangunnya sarana prasarana penunjang perekonomian masyarakat, terwujud konservasi sumber daya alam, pengendalian kerusakan lingkungan, penurunan pencemaran lingkungan, dan terpeliharanya kearifan lingkungan.

Untuk mengantisipasi dampak lingkungan dalam pembangunan sarana dan prasarana diperlukan pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Beberapa bentuk prasarana lingkungan tersebut antara lain :

- a. Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- b. Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM).
- c. Sarana dan prasarana lingkungan yang sifatnya menunjang kehidupan masyarakat.
- d. Jalur Evakuasi Bencana Alam.

8) Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengurangan Angka Pengangguran

Penurunan Tingkat kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin secara intensif. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, terlaksananya program perlindungan sosial, pemberian beasiswa bagi keluarga miskin, meningkatnya akses dan produktivitas usaha mikro, dan meningkatnya partisipasi angkatan kerja.

9) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Pelayanan Prima

Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan pelayanan prima pemerintahan diarahkan pada penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga profesionalitas pemerintahan dan pelayanan publik yang prima dapat dicapai. Hal ini dapat dilihat dari tata pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan bebas KKN, terlaksananya pemerintahan yang transparan dan akuntabel, terwujudnya tata pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif, terhimpunnya data statistik yang handal dan berdayaguna tinggi, dan terwujudnya sinergi antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota.

10) Pencegahan Tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan Peredaran Obat Terlarang

Pencegahan tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat terlarang diarahkan untuk memperkuat struktur sosial dalam mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas serta peredaran obat-obat terlarang di lingkungan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada kuatnya kelembagaan dan jaringan serta kebijakan daerah terhadap gender dan HAM, pemberdayaan perempuan dalam berwirausaha, meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, terciptanya keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat dan munculnya generasi muda yang mandiri dan berprestasi.

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal menjelaskan bahwa ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal yang merupakan tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh setiap Pemerintah Daerah pada batas waktu yang ditentukan.



Urusan wajib yang diamanatkan memiliki SPM adalah yang terkait pelayanan dasar sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan urusan wajib adalah :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan
- f. Sosial.

SPM merupakan tolak ukur untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang pemerintahan umum, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum dan layanan publik lainnya. Evaluasi SPM merupakan pemberian gambaran terhadap kinerja penyelenggaraan oleh daerah melalui Perangkat Daerah terkait.

Adapun penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, memiliki nilai capaian sebesar 85% dengan rincian sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator	Target	REALISASI/ CAPAIAN DAERAH 2024
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
Pendidikan Dasar	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	80%	83,59 %
Pendidikan Kesetaraan	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	80%	89,47 %
Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	80 %	81,43 %
2. Dinas Kesehatan			
Pelayanan kesehatan ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan	641	641 (100%)
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	636	636 (100%)
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	602	602 (100%)
Pelayanan kesehatan balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.805	2.805 (100%)

JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator	Target	REALISASI/ CAPAIAN DAERAH 2024
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar.	4.622	4.018 (87%)
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s/d 59 tahun mendatkn layanan kesehatan sesuai standar	8.410	8.410 (100%)
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	3.743	3.080 (82%)
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.627	1.627 (100%)
Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus.	Setiap penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	4.429	4.429 (100%)
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGj)	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGj) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1064	1064 (100%)
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi (TBC)	Setiap orang dengan TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar.	420	420 (100%)
Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/ transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasasyarakatan mendapatkan	345	345 (100%)

JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator	Target	REALISASI/ CAPAIAN DAERAH 2024
	pemeriksaan HIV sesuai standar.		
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	120	120 (100%)
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	56	56 (100%)
4. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dan Lingkungan Hidup			
Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	- (dialihkan sesuai Keputusan Bupati)	- (dialihkan sesuai Keputusan Bupati)
Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	-	-
5. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah	80%	94,05%
	Cakupan pelayanan yang terkena dampak kebakaran akibat terjadinya kebakaran	100%	67,74 %
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
Pelayanan informasi rawan bencana	Cakupan layanan informasi rawan bencana	100%	80%
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	80%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%

JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator	Target	REALISASI/ CAPAIAN DAERAH 2024
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	463	463 (100%)
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	43	43 (100%)
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	598	598 (100%)
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	2	2 (100%)
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	2.500	2.500 (100%)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata capaian sebesar 90%, realisasi capaian masih di bawah 100%.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah nilai indeks pembangunan manusia pada daerah yang bersangkutan IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Kesejahteraan Masyarakat dapat direpresentasikan dari baik atau buruknya tingkat pendapatan, pendidikan dan derajat kesehatan. Indikator yang biasa digunakan untuk melihat perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terbentuk dari empat komponen utama yaitu : (1) Usia Harapan Hidup, (2) Harapan lama sekolah, (3) Rata rata Lama sekolah dan (4) Pengeluaran perkapita. IPM Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 adalah 71,44, sedangkan untuk tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 72,87

b. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin pada daerah bersangkutan. Angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 yakni 7,34, dan tahun 2024 ini adalah 7,49.

c. Tingkat Pengangguran

Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pengangguran pada daerah yang bersangkutan, khususnya tingkat pengangguran terbuka yang dilihat dari persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka terdiri dari : mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena mereka tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Angka pengangguran di Kabupaten Pesisir Selatan berfluktuasi setiap tahunnya, dimana pada tahun 2024 adalah 5,06 yang juga terjadi peningkatan dari tahun 2023 yaitu 4,75.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan, khususnya menggunakan PDB/PDRB. Tingkat

keberhasilan pembangunan ekonomi disuatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar ekonomi di daerah tersebut tumbuh, dan seberapa besar masyarakatnya menikmati pertumbuhan tersebut secara berkeadilan. PDRB di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 atas harga Konstan adalah 8.183,1 di triwulan tiga dan ini mengalami penurunan dari periode yang sama pada tahun 2023 yaitu 10.608,29.

e. Pendapatan Per-Kapita

Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat kenaikan pendapatan perkapita daerah yang bersangkutan. Terdapat 2 metode penghitungan:

1. PDRB Per-kapita Nominal (berdasarkan harga berlaku) yang tidak mempertimbangkan tingkat inflasi atau kenaikan harga; dan
2. PDRB Per-kapita Riil (berdasarkan angka konstan) yang dihitung berdasarkan harga tetap sebagai acuan.

PDRB Per-Kapita atas harga berlaku pada Tahun Pelaporan (2023) adalah 18.025,68 dan tahun (2024) adalah 14.201,08

f. Ketimpangan Pendapatan (*Ratio Gini*)

Indikator yang menggambarkan ketimpangan pendapatan penduduk di suatu wilayah adalah Indeks Gini atau biasa disebut dengan *Gini Ratio*. *Gini Ratio* adalah ketidak merataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan). Indeks gini berkisar antara 0 sampai. Indeks Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna. Indeks Gini Kabupaten Pesisir Selatan telah menunjukkan nilai yang baik, dimana nilai Gini Ratio pada tahun 2023 dengan nilai 0,259 yang dimana nilai *Gini Ratio* tahun 2024 sebesar 0,224.

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
1	2		3	4	5	6
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{11.106}{18.531} \times 100$ =59,93%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		2	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	$\frac{55.269}{57.411} \times 100$ =96,27%		

		3	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	$\frac{23.909}{29.970} \times 100 = 79,78\%$		
		4	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	$\frac{3.208}{6.423} \times 100 = 49,95\%$		
2	Kesehatan	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{479}{531.494} \times 100 = 0,9\%$	Dinas Kesehatan	
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang Terakreditasi	$\frac{4}{4} \times 100 = 100\%$		
		3	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	$\frac{7.471}{10.734} \times 100 = 69,6\%$		
		4	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	$\frac{7.049}{10.647} \times 100 = 66,2\%$		
		5	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	$\frac{7.015}{10.060} \times 100 = 69,7\%$		
		6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	$\frac{35.395}{46.935} \times 100 = 75,4\%$		
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{67.307}{87.694} \times 100 = 76,8\%$		
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{113.857}{333.240} \times 100 = 34,2\%$		
		9	Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{51.593}{69.409} \times 100 = 74,3\%$		
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{21.441}{21.441} \times 100 = 100\%$		
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{4.381}{4.381} \times 100 = 100\%$		
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{1.064}{1.064} \times 100 = 100\%$		

		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{7.229}{7.229} \times 100 = 100\%$		
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{5.979}{13.511} \times 100 = 44,2\%$		
3	PUTR	1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	$\frac{17.866,44}{51.137,90} \times 100 = 34,9\%$	Dinas PSDA	
		2	Rasio luas kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	$\frac{1.427}{58.460} \times 100 = 2,4\%$		
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{10.554}{20.907} \times 100 = 50,5\%$		
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kab/kota	$\frac{99.408}{110.466} \times 100 = 89,98\%$	Dinas PUTR	
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{85.506}{110.466} \times 100 = 77,4\%$		
		6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	$\frac{63}{63} \times 100 = 100\%$		
		7	Tingkat kemantapan jalan kab/kota	$\frac{1046,55}{2333,18} \times 100 = 44,8\%$		
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{32}{459} \times 100 = 6,97\%$		
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{160}{160} \times 100 = 100\%$		
4	Perumahan Rakyat	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	$\frac{0}{1.240} \times 100 = 0\%$	Dinas PERKIMTAN	

			kabupaten/ kota			
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	$\frac{0}{1} \times 100 = 0 \%$		Surat Pernyataan
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	$\frac{0}{140.21} \times 100 = 0 \%$		Surat Pernyataan
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{8.277}{115.464} \times 100 = 7,2 \%$		
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{905}{1.571} \times 100 = 57,6 \%$		
5	TRANTIBUM LINMAS	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{22}{22} \times 100 = 100 \%$	Satpol PP dan Damkar	
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{1}{1} \times 100 = 100 \%$		
		3	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	$\frac{343.456}{433.735} \times 100 = 79 \%$	BPBD	
		4	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{1.095}{433.735} \times 100 = 0,2 \%$		
		5	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{81.745}{39} \times 100 = 209 \%$		
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{52}{52} \times 100 = 100 \%$	Satpol PP dan Damkar	
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	$\frac{910}{52} = 17,2 \text{ Mnt}$		
6	SOSIAL	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	$\frac{1.540}{7.506} \times 100 = 20,51 \%$	Dinas Sosial dan P3A	
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	$\frac{64.685}{64.685} \times 100 = 100 \%$		

7	Ketenaga Kerjaan	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{4}{13} \times 100 = 30,8 \%$	Disnakertrans	
		2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	$\frac{101}{8.574} \times 100 = 1,2 \%$		
		3	Tingkat produktivitas tenaga kerja	$\frac{11.015.210}{8574} \times 100 = 128 \%$		
		4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{34}{129} \times 100 = 26,36 \%$		
		5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kab/kota	$\frac{173}{986} \times 100 = 17,54 \%$		
8	Perlindungan Perempuan dan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{66.800.563.434}{1.631.728.806.535} \times 100 = 4,09\%$	Dinas Sosial dan P3A	
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kab/kota	$\frac{59}{59} \times 100 = 100 \%$		
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{13}{264.969} \times 100 = 4,9$		
9	Pangan		Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{14,421}{108,7} \times 100 = 13,27 \%$	Dinas Pangan	
10	Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{7.223.242,04}{8.156.597,73} \times 100 = 88,6 \%$	Dinas Perkimtan	Surat Pernyataan
		2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$		
		3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	$\frac{0}{1.288.011,16} \times 100 = 0 \%$		Surat Pernyataan
		4	Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	$\frac{0}{0} \times 100 = 0 \%$		Surat Pernyataan

		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	$\frac{0}{1.288.011,16} \times 100 = 0\%$		Surat Pernyataan
		6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$		
11	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	IKLH Pessel = 79,69 (Baik)	Dinas Lingkungan Hidup	
		2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	$\frac{24.122,03}{57.526,69} \times 100 = 41,93\%$		
		3	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	$\frac{5}{5} \times 100 = 100\%$		
12	Adminduk Capil	1	Perekaman KTP elektronik	$\frac{378.152}{379.727} \times 100 = 99,6\%$	Disdukcapil	
		2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{96.341}{154.58} \times 100 = 62,54\%$		
		3	Kepemilikan akta kelahiran	$\frac{156.615}{157.582} \times 100 = 99,38\%$		
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	$\frac{7}{24} \times 100 = 29\%$		
13	Pemberdayaan Masyarakat desa	1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$	DPMDPP&KB	
		2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	$\frac{1}{1} \times 100 = 100\%$		
14	Pengendalian Penduduk dan KB	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,48	DPMDPP&KB	
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	$\frac{46.001}{68.799} \times 100 = 66,9\%$		
		3	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak terpenuhi (unmeet Need)	$\frac{23.253}{68.799} \times 100 = 33,8\%$		
15	Perhubungan	1	Rasio Konektivitas Kab/Kota	$(0,53 \times 100) + (0 \times 0) = 0,53$	Dinas Perhubungan	
		2	V/C Ratio di Jalan Kab/Kota	$\frac{441}{1504} = 0,29\%$		
16	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan	$\frac{41}{41} \times 100 = 100\%$	DISKOMINF O	

			akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo			
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{5}{184} \times 100 = 0\%$		
		3	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Kab/Kota	$\frac{295.148}{355.485} \times 100 = 83\%$		
17	Koperasi dan UMKM	1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	$\frac{57}{175} \times 100 = 32,57\%$	Dinas Koperindag	
		2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{9850}{12.450} \times 100 = 79\%$		
18	Penanaman Modal	1	Persentase peningkatan investasi di kab/kota	$\frac{42.370.000.411}{949.436.439.540} \times 100 = -4,5\%$	DPMPPTSP	
19	Kepemudaan	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{877}{126.110} \times 100 = 0,7\%$	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	$\frac{1.184}{126.110} \times 100 = 0,94\%$		
		3	Peningkatan Prestasi Olahraga	6		
20	Statistik	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{26}{41} \times 100 = 63,4\%$	DISKOMINF O	
		2	Persentase OPD yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{26}{41} \times 100 = 63,4\%$		
21	Persandian	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{388}{916} \times 100 = 42,36\%$		
22	Kebudayaan	1	Terlestarikannya cagar budaya	$\frac{152}{186} \times 100 = 81.72\%$	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
23	Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	71,3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	84,74		
24	Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat	50,89		

			bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	4,16		Surat Pernyataan
25	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	$\frac{60.794}{50.694} \times 100 = 119,9\%$	Dinas Perikanan Dan Kelautan	
26	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{-285}{505} \times 100 = -56,44\%$	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Turun 56,44% persen dari tahun sebelumnya
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota	$\frac{-343.483}{2.103.639} \times 100 = -16,3\%$		
		3	Tingkat hunian akomodasi	$\frac{44.205}{282.559} \times 100 = 15,7\%$		
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	$\frac{251,29}{19.182,15} \times 100 = 17,92\%$		
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	$\frac{3.335.560.595}{161.575.373.729,88} \times 100 = 2,1\%$		
27	Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{291.856,91}{51.201,1} \times 100 = 5,7 \text{ Ton/ha}$	Dinas pertanian	
		2	Jumlah kasus zoonosis yang dilaporkan	$\frac{84}{1.860} = 4,5\%$		Kasus Zoonosis naik 4,5 %
28	Kehutanan	1		Kewenangan Provinsi		Surat keterangan
29	Energi dan SDM	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab	0		Surat keterangan

30	Perdagangan	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{30}{71} \times 100 = 9,5\%$	Dinas Koperindag	
		2	Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{15.299,55}{34.581,94} \times 100 = 44\%$		
		3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{613}{109.331} \times 100 = 0,56\%$		
31	Perindustrian	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$\frac{266}{5.037} \times 100 = 5,28\%$	Dinas Koperindag	
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	169,44		
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{0}{3} \times 100 = 0\%$		
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0		Belum Ada IPI yang terpantau
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	0		Belum ada IUKI dan IPKI yang dipantau
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan	65		terlampir

			terkini		
32	Transmigrasi	1		100	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	FUNGSI PENUNJANG	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KET
1	2		3	4	5	6
1	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{1.067}{1.296} \times 100 = 82 \%$	BKPSDM	
		2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{351}{1.296} \times 100 = 27 \%$		
		3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{120}{351} \times 100 = 34 \%$		
2	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\frac{1.741.083.093.241,2}{1.886.615.447.075} - 1 \times 100 = 7,7 \%$	BPKD	
		2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\frac{161.575.256.261,88}{73.803.259.908} - 1 \times 100 = 118\%$		
		3	Assets Management 1. Daftar aset tetap 2. Manual untuk penyusunan aset tetap 3. Proses inventarisasi aset tahunan 4. Nilai asset tercantum dalam laporan anggaran	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. ya		
		4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	$\frac{72.047.630.459,08}{1.627.586.655.437,4} \times 100 = 4,4 \%$		
3	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada	$\frac{0}{15.014} \times 100 = 0 \%$	Bagian PBJ	Tidak ada proyek konstruksi

			kuartal pertama			dengan nilai besar dari RP 50 M
		2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	$\frac{11.341}{15.014} \times 100 = 75\%$		
		3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{592.955.283.158}{1.476.425.761.115,2} \times 100 = 40\%$		
		4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	$\frac{-24.249.113.100}{394.865.200.000} \times 100 = -6,1\%$		
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{221.256.068.341}{1.741.083.093.241,2} \times 100 = 12,7\%$	BPKD	
		2	Rasio PAD	$\frac{161.575.256.261,88}{1.690.883.768.684,9} \times 100 = 9,5\%$	BAPENDA	
		3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{1.217.488.060.718,2}{1.741.083.093.241,2} \times 100 = 69\%$	BPKD	
		4	Opini Laporan Keuangan	2024 = WTP 2023 = WTP 2022 = WTP 2021 = WTP 2020 = WTP 2019 = WTP 2018 = WTP 2017 = WTP 2016 = WTP 2015 = WTP		
5	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan)	1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2	INSPEKTORAT	
		2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3		
6	Fungsi Penunjang Urusan	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$\frac{1.557.070.701.283}{1.785.282.190.955} \times 100 = 87\%$	Dinas Kominfo	

Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)	2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	$\frac{12}{12} \times 100 = 100\%$		
--	---	---	------------------------------------	--	--

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ditetapkan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dan Rasionalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan good governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, serta memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur, diuji dan dipertanggungjawabkan.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1.1.1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	1	Indek Reformasi Birokrasi	Tanpa Satuan	BB (72,00)
2.1.1	Meningkatnya kualitas hidup manusia dan masyarakat	1	Indeks Pembangunan Manusia	Tanpa Satuan	72,74
2.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,4
2.1.3	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	1	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,65

		2	Pengeluaran Per Kapita	Rp./orang/tahun	9.953.500
3.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara Berkelanjutan	1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,15
		2	Nilai PDRB (AHK)	Trilyun Rupiah	10,879
		3	Indek Gini	Tanpa Satuan	0,25
4.1.1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan Masyarakat	1	Jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	persen	2,7
5.1.1	Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas	1	Persentase Pemenuhan 8 Standar Pendidikan -Indek Pencapaian SPM	tanpa satuan	70,00
5.1.2	Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing	1	Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM	Tanpa Satuan	Tinggi (3,775)
6.1.1	Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis	1	Indeks Kebahagiaan Masyarakat	Tanpa Satuan	72,92

Sumber: Revisi Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, 2024

Perjanjian Kinerja Bupati Pesisir Selatan Tahun 2023 setelah revisi yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2023 ini.

b. Hasil pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja terhadap 9 (sembilan) sasaran strategis dan 12 (dua belas) indikator kinerja, sebanyak 10 (sepuluh) indikator nilainya termasuk kategori **Sangat Baik** dan sebanyak 2 (dua) indikator nilainya termasuk kategori **Baik** yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan misi yang diemban dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2024 sebagai berikut :

MISI 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratif dan Transparan.

Pencapaian Kinerja untuk 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 1 sebesar 109,88%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.1.1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	1. Indek Reformasi Birokrasi	tanpa satuan	BB (72,00)	BB (79,11) *	109,88 *

Catatan : *) Hasil Evaluasi Sementara Tahun 2024

Sumber : KemenPANRB

MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat

Pencapaian Kinerja untuk 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 2 sebesar 97,55%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik** dengan rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2.1.1	Meningkatnya kualitas hidup manusia dan masyarakat	1. Indek Pembangunan Manusia	tanpa satuan	72,74	72,87	100,18
2.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Usia Harapan Hidup	tahun	73,4	73,44	100,05
2.1.3	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	1. Tingkat Kemiskinan	Persen	6,65	7,49	87,37
		2. Pengeluaran per Kapita	Rp./orang/tahun	9.953.500	10.211.000	102,59
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 2						97,55

MISI 3 : Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah

Pencapaian Kinerja untuk 1 (satu) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 3 sebesar 95,40%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik** dengan rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel. 3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
3.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara Berkelanjutan	1.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,15	3,84	74,56
		2.	Nilai PDRB	Triliyun Rupiah	10,879	11,015	101,25
		3.	Indek Gini	Tanpa Satuan	0,25	0,224	110,4
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 3							95,40

MISI 4 : Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan

Pencapaian Kinerja untuk 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 4 sebesar 76,30%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Baik** dengan rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 4

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
4.1.1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan Masyarakat	1. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten Pesisir Selatan	persen	2,7	2,06	76,30

MISI 5 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing

Pencapaian Kinerja untuk 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 5 sebesar 115,34%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik** Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel. 5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
5.1.1	Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas	1. Persentase Pemenuhan 8 Standar Pendidikan - Indek Pencapaian SPM	tanpa satuan	70,00	91,57	130,81
5.1.2	Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing	1. Indek Daya Saing Daerah Bidang SDM	tanpa satuan	Tinggi (3,775)	Tinggi (3,770)*	99,87*
Rata-rata Capaian Kinerja Misi 5						115,34

Catatan : *) Data Realisasi Tahun 2023

Sumber : Badan Riset dan Inovasi nasional

MISI 6 : Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman, Tentram dan Dinamis

Pencapaian Kinerja untuk 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 6 sebesar 97,83%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori **Sangat Baik**. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel. 6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 6

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
6.1.1	Terciptanya kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis	1. Indek Kebahagiaan Masyarakat	tanpa satuan	72,92	71,34*	97,83*

Catatan : *) Data Realisasi Tahun 2021

Sumber : Badan Pusat Statistik

c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan capaian tahun 2024 dan tahun 2023 maka terdapat beberapa fluktuasi,, ada yang naik pada tahun 2024 namun juga ada yang turun, jika kita lihat pada pertumbuhan ekonomi maka terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2023, ini bisa dipahami sebagai akibat dari melambungnya pertumbuhan ekonomi 2023 selepas dari jeraran covid 19 dan pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi sudah mulai kembali normal,

walaupun terjadi penurunan laju pertumbuhan ekonomi, malah terjadi peningkatan pada PDRB tahun 2024 serta beberapa indikator lainnya meskipun tidak signifikan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.7
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	2023	2024
1.1.1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	1	Indek Reformasi Birokrasi	Tanpa Satuan	71,56	BB (79,11) *
2.1.1	Meningkatnya kualitas hidup manusia dan masyarakat	1	Indeks Pembangunan Manusia	Tanpa Satuan	72,24	72,87
2.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,27	73,44
2.1.3	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	1	Tingkat Kemiskinan	Persen	7,34	7,49
		2	Pengeluaran Per Kapita	Rp./orang/tahun	9.953.000	10.211.000
3.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara Berkelanjutan	1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,14	3,84
		2	Nilai PDRB (AHK)	Trilyun Rupiah	10,183*	11,015
		3	Indek Gini	Tanpa Satuan	0,259	0,224
4.1.1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan Masyarakat	1	Jumlah serapan tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	2023 / orang 2024 / persen	5620	0,224
5.1.1	Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas	1	Persentase Pemenuhan 8 Standar Pendidikan -Indek Pencapaian SPM	tanpa satuan	7,27	91,57
5.1.2	Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing	1	Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM	Tanpa Satuan	Tinggi (3,770)	Tinggi (3,770)*
6.1.1	Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tenram dan Dinamis	1	Indeks Kebahagiaan Masyarakat	Tanpa Satuan	71,34	71,34*

d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 9 (sembilan) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.8

Tabel 2.8
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2024

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
MISI 1 : Memperkuat tata kelola, pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan						
1.1.1	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	1. Indek Reformasi Birokrasi	tanpa satuan	BB (72,00)	BB (79,11)*	109,88*
MISI 2 : Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat						
2.1.1	Meningkatnya kualitas hidup manusia dan masyarakat	1. Indek Pembangunan Manusia	tanpa satuan	72,74	72,87	100,18
2.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Usia Harapan Hidup	tahun	73,4	73,44	100,05
2.1.3	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	1. Tingkat Kemiskinan	Perse n	6,65	7,49	87,37
		2. Pengeluaran PerKapita	Rp./oran g/ tahun	9.953.500	10.211.000	102,59
MISI 3 : Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah						
3.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara Berkelanjutan	1. Pertubuhan Ekonomi	Perse n	5,15	3,84	74,56
		2. Nilai PDRB	Triliyun Rupiah	10,879	11,015	101,25
		3. Indek Gini	Tanp a Satuan	0,25	0,224	110,4
MISI 4 : Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan						
4.1.1	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan Masyarakat	1. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten Pesisir Selatan	persen	2,7	2,06	76,30

MISI 5 : Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing							
5.1.1	Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas	1.	Persentase Pemenuhan 8 Standar Pendidikan - Indeks Pencapaian SPM	Tanpa satuan	70,00	91,57	130,81
5.1.2	Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing	1.	Indendek Daya Saing Daerah Bidang SDM	tanpa satuan	Tinggi (3,775)	Tinggi (3,770)*	99,87*
MISI 6 : Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan dinamis							
6.1.1	Terciptanya kondisi , Masyarakat Pesisir Selatanyang Aman, Tentram dan Dinamis	1.	Indek Kebahagian Masyarakat	tanpa satuan	72,92	71,34*	97,83*
Rata-rata Capaian Indikator 9 Sasaran Strategis : 12 Indikator Kinerja							99.26

Dari tabel di atas dapat dilihat, capaian rata-rata 12 (dua belas) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 99,26%, sebanyak 10 (sebelas) indikator nilainya predikat Sangat Baik, sebanyak 2 (satu) indikator nilainya predikat Baik.

CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sasaran 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya sistematis untuk mengubah dan meningkatkan kinerja birokrasi atau administrasi pemerintahan dengan tujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam

penyelenggaraan layanan publik. Dengan Berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Reformasi birokrasi harus berdampak, bukan hanya berupa tumpukan kertas, dan reformasi harus menciptakan birokrasi yang cepat dan lincah

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2024.

Berikut ini perbandingan antara target dan realisasi Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel 2.9 berikut ini:

Tabel 2.9

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Index Reformasi Birokrasi Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indek Reformasi Birokrasi	tanpa satuan	BB (72,00)	BB (79,11)*	109,88*

Catatan : *) Hasil Evaluasi Sementara 2024

Sumber : KemenPAN RB

Formulasi capaian indikator kinerja Index Reformasi Birokrasi



Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Index Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 adalah BB (72,00) dan terealisasi BB (79,11)* dengan capaian indikator kinerja adalah 109,88%* yang merupakan Hasil Evaluasi Sementara 2024 berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengwas Kementerian PANRB Nomor : B/43/RB.04/2025 Hal : Penyampaian Hasil Evaluasi RB 2024, karena masih menunggu proses untuk hasil akhirnya. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong Sangat Berhasil dengan predikat Sangat Baik.

Capaian Tahun 2024 masih merupakan Hasil Evaluasi Sementara 2024 karena masih menunggu proses untuk hasil akhirnya. Predikat Reformasi Birokrasi Hasil Evaluasi Sementara 2024 yaitu “BB” (79,11)* yang menunjukkan capaian Baik, hal ini tercapai karena adanya konsistensi dalam capaian reformasi birokrasi yang merupakan bukti bahwa seluruh komponen di Kabupaten Pesisir Selatan terus bergerak bersama berkolaborasi untuk bereformasi menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Berikut ini adalah perbandingan target dan dan realisasi Indek Reformasi pada Tahun 2024 dengan tahun 2022 dan 2023 sebagaimana tercantum pada tabel 2.10 berikut ini:

Tabel 2.10
Perbandingan Realisasi dan Capaian
Indikator Kinerja Indek Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indek Reformasi Birokrasi	Tanpa satuan	58 (CC)	60,5 (B)	72 (BB)	58,82 (CC)	71,56 (BB)	79,11 (BB)*	101,41 %	118,28 %	109,88 %*

Catatan : *) Hasil Evaluasi Sementara Tahun 2024
Sumber : KemenPAN RB

Dari tabel yang membandingkan realisasi dan capaian Indeks Reformasi Birokrasi selama periode 2022-2024, terlihat adanya peningkatan yang signifikan:

- Tahun 2022: Target 58 (CC), realisasi 58,82 (CC), capaian 101,41%
- Tahun 2023: Target 60,5 (B), realisasi 71,56 (BB), capaian 118,28%
- Tahun 2024: Target 72 (BB), realisasi 79,11 (BB), capaian 109,88%

Perbandingan ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2022 hingga 2024, dengan lonjakan signifikan pada tahun 2023, di mana realisasi melebihi target sebesar 118,28%. Pada tahun 2024, dari Hasil Evaluasi Sementara juga melebihi target yaitu (109,88%), yang mencerminkan kemajuan yang stabil dalam reformasi birokrasi.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Indek Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 dengan Target Jangka Menengah.

Perbandingan Target pada RPJMD 2021-2026 dengan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut ini :

Tabel 2.11
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Indek Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 dengan Target RPJMD



Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indek Reformasi Birokrasi	Tanpa satuan	58 (CC)	60,5 (B)	62 (B)	58,82 (CC)	71,56 (BB)	79,11* (BB)

Catatan : *) Hasil Evaluasi Sementara Tahun 2024
Sumber : KemenPAN RB

Ketika dibandingkan dengan target dalam RPJMD 2021-2026, perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan peningkatan yang lebih cepat dari yang direncanakan:

Target RPJMD 2024: 62 (B)

Realisasi 2024: 79,11 (BB)

Hasil ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD untuk tahun 2024. Lonjakan capaian ini terutama terjadi pada tahun 2023, di mana nilai RB melonjak dari 60,5 (B) ke 71,56 (BB), yang menunjukkan percepatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Indek Reformasi Birokrasi Tahun 2024 dengan Target/Standar Nasional

Berikut ini Perbandingan target dan realisasi Indikator Kineja Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 dengan target dan realisasi target /Standar Nasional Tahun 2024.

Tabel 2.12

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indek Reformasi Birokrasi dengan Target/Standar Nasional Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
		PK 2024	Target/ Standar Nasional 2024	PK 2024	Target/ Standar Nasional 2024
Indek Reformasi Birokrasi	Tanpa satuan	72 (BB)	70% Kab/Kota Indeks RB \geq Baik	79,11 (BB)*	53,15% Kab/Kota Indeks RB \geq Baik*

Catatan : *) Hasil Evaluasi Sementara Tahun 2024 dan Data Realisasi Tahun 2023 Sumber : KemenPAN RB

Dari tabel perbandingan dengan target/standar nasional tahun 2024 yang realisasinya masih data tahun 2023, terlihat bahwa nilai realisasi dan target nasional sudah tercapai 53,15 % Kab/Kota Indeks RB \geq Baik, Kabupaten Pesisir Selatan termasuk yang sudah tercapai karena Kabupaten Pesisir Selatan Indeks

RB Hasil Evaluasi Sementara Tahun 2024 adalah 79,11 (BB) atau Baik.

Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan telah berhasil menyesuaikan reformasi birokrasi dengan standar nasional, yang mencerminkan implementasi kebijakan yang sejalan dengan kebijakan pusat.

Analisis penyebab keberhasilan/Kegagalan.

Faktor Keberhasilan

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja Reformasi Birokrasi adalah:

- a. Kebijakan dan regulasi penajaman Roadmap Kabupaten Pesisir Selatan yang selaras dengan Roadmap Nasional.
- b. Menyusun Rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Tematik sebagai bagian upaya perbaikan dari birokrasi yang dinamis dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi kinerja pelayanan publik.
- c. Komitmen Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi baik RB General maupun RB Tematik yang meliputi tematik Kemiskinan, Stunting, Investasi dan inflasi
- d. Monitoring ex-ante dan on-going sebagai bagian dari percepatan capaian Reformasi Birokrasi.
- e. Implementasi kebijakan reformasi birokrasi yang lebih sistematis sejak tahun 2023.
- f. Peningkatan kapasitas SDM aparatur, baik dalam hal kompetensi maupun budaya kerja yang lebih adaptif.
- g. Penerapan sistem digitalisasi administrasi yang semakin efektif dalam mendukung layanan publik.
- h. Dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk regulasi maupun asistensi teknis.

Faktor Penyebab Kegagalan:

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan sasaran peningkatan efektifitas Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

- a. Kebijakan dan Keterbatasan anggaran serta SDM dalam implementasi reformasi birokrasi di sebagian kecil perangkat daerah.
- b. Resistensi terhadap perubahan dari beberapa elemen birokrasi yang masih terbiasa dengan sistem lama.
- c. Tantangan dalam mengintegrasikan kebijakan daerah dengan kebijakan pusat yang terus berkembang.

Solusi.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

- a. Optimalisasi pemanfaatan SDM dan anggaran
 - 1) Peningkatan pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM aparatur.
 - 2) Efisiensi dalam pengelolaan anggaran untuk reformasi birokrasi.
- b. Penguatan sistem digitalisasi birokrasi
 - 1) Peningkatan integrasi sistem digital dalam pelayanan publik.
 - 2) Penerapan e-government untuk mempermudah akses dan transparansi layanan.
- c. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat
Penguatan forum komunikasi dan sinergi dalam implementasi kebijakan reformasi birokrasi.

Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran.

Efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran dalam pencapaian kinerja di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024, didorong oleh kebijakan meliputi:

1. Pengalokasian anggaran dengan standar belanja berbasis program yang mendukung sasaran dan tujuan pembangunan.
2. Strategi dan Kebijakan perencanaan pembangunan pada RPJMD 2021-2026 yang terarah dan berkesinambungan dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran secara logis (logical framework) dalam pencapaian kinerja;
3. Penerapan Penyederhanaan /Perubahan Struktur Organisasi;
4. Percepatan kinerja dengan Inovasi.

Pagu anggaran untuk mendukung Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi ini sebesar Rp. 311.837.805.854,-, dengan realisasi sebesar Rp. 294.578.863.930,- atau sebesar 94,46 %. Persentase realisasi keuangan tidak mencapai 100 %. Hal ini menunjukkan efisiensi anggaran sebesar Rp. 7.258.941.924,- atau 5,54 %.

Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja didukung oleh pelaksanaan Program dan Kegiatan. Keterkaitan Antara Sasaran, Indikator, dan Program dengan Target dan Realisasi anggaran adalah untuk melihat dan mengukur target dan realisasi program dalam menunjang pencapaian kinerja indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024. Program yang menunjang pencapaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi dapat dilihat pada tabel 2.13 di

bawah ini.

Tabel 2.13
Realisasi Anggaran Program Pendukung
Ketercapaian Indikator Kinerja Indek Reformasi Birokrasi
Tahun 2024

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Keterangan
1	Program Perekonomian dan Pembangunan	794.411.883	790.586.471	3.825.412	APBD
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	27.607.138.270	18.721.035.987	8.886.102.283	APBD
3	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	399.990.934	377.095.800	22.895.134	APBD
4	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	111.540.552	109.018.850	2.521.702	APBD
5	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	274.423.047.697	267.248.873.692	7.174.174.005	APBD
6	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	974.979.242	449.242.836	525.736.406	APBD
7	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.201.858.743	1.180.280.903	21.577.840	APBD
8	Program Penyelenggaraan Pengawasan	831.384.300	702.629.759	128.754.541	APBD
9	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	158.367.000	141.552.849	16.814.151	APBD
10	Program Kepegawaian Daerah	833.227.859	805.490.306	27.737.553	APBD
11	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	53.506.740	53.038.600	468.140	APBD
12	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	999.993.629	823.023.763	176.969.866	APBD
13	Program Penyelesaian Sengketa Tanah	39.993.000	35.086.900	4.906.100	APBD
14	Program Penyelesaian Ganti Kerugian	12.850.000	10.124.200	2.725.800	APBD
15	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti	51.085.000	48.418.950	2.666.050	APBD
16	Program Penetapan Tanah Ulayat	41.805.800	35.229.450	6.576.350	APBD

17	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	991.743.136	836.287.101	155.456.035	APBD
18	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.138.592.627	2.076.757.463	61.835.164	APBD
19	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	114.709.640	78.344.800	36.364.840	APBD
20	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	57.579.802	56.745.250	834.552	APBD
Total		311.837.805.854	294.578.863.930	7.258.941.924	

Penghargaan

Adapun prestasi yang di peroleh adalah Piagam Opini BPK dari Tahun 2012- 2024, WTP ke 11 (sebelas) kali



Tingkat Kepatuhan Standar Pelayan Publik tahun 2023 yaitu 79.33 Zona Hijau, Kategori B, Kualitas Tinggi



Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari 1 (satu) (indikator kinerja) yaitu Indeks Pembangunan Manusia.

Pembangunan sumber daya manusia bertujuan menghasilkan manusia yang cerdas, sehat, mandiri, kompetitif yang sesuai nilai-nilai moral kehidupan sosial melalui penguatan pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat/ pengeluaran. Untuk mengukur tingkat keberhasilan tujuan ini ditetapkan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam kaitannya, terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM antara lain, sistem pendidikan yang baik dan bermutu, tingkat kesehatan masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan, penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa (character building) serta diperkuat nilai-nilai kebudayaan yang ada pada masyarakat.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel 2.14 berikut ini :

Tabel 2.14

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Pembangunan Manusia	tanpa satuan	72,74	72,87	100,18

Formulasi capaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia

$$IPM = 1/3 [I \text{ kesehatan} + I \text{ pendidikan} + I \text{ pengeluaran}]$$

$$I \text{ kesehatan} : \frac{UHH - UHH_{\min}}{UHH_{\max} - UHH_{\min}}$$

UHH = Usia Harapan Hidup

$$I \text{ pendidikan} : \text{a. } I \text{ HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

HLS = Harapan Lama Sekolah

$$\text{b. } I \text{ RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

RLS = Rata-Rata Lama Sekolah

$$I \text{ pengeluaran} : \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel 2.14. di atas dapat dijelaskan target Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 adalah 72,74 dan realisasi 72,87 dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,18%. Berdasarkan klasifikasi penilaian Indikator Kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai alat ukur tingkat pencapaian pembangunan manusia merupakan indeks gabungan dari tiga komponen yang mengindikasikan kualitas sumber daya manusia. Jika ketiga komponen tersebut memiliki nilai yang baik, tentunya sumber daya manusia secara umum juga memiliki kualitas yang baik. Bagi suatu wilayah, angka IPM yang diperoleh menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di daerah tersebut dan merupakan tantangan yang harus dihadapi serta upaya apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia. IPM dihitung

berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks dilakukan melalui proses standarisasi menggunakan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kecepatan dan status pencapaian. IPM merupakan

perwujudan dari tiga aspek pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of living). Aspek umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh Usia Harapan Hidup pada saat lahir (UHH). Dimensi pengetahuan direpresentasikan dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sedangkan standar hidup yang layak dapat didekati dengan pengeluaran per kapita riil disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity).

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.15 di bawah ini.

Tabel 2.15

Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indek Pembangunan Manusia	Tanpa satuan	71,22	71,39	72,74	71,25	71,52	72,87	100,04	102,34	100,18

Dari tabel di atas dapat dilihat pencapaian Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan target 72,74 terealisasi sebesar 72,87, dibandingkan dengan target dan realisasi pada tahun 2023 yaitu target 71,39 realisasi 71,52 dan pada tahun 2022 yaitu target 71,22 realisasi 71,25. Dengan capaian ini artinya Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun ke tahun meningkat. Ini juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Faktor keberhasilan

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia adalah :

1. Meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan melalui bertambahnya jumlah fasilitas kesehatan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.
2. Peningkatan mutu pendidikan melalui kebijakan kepemimpinan, infrastruktur dan proses pembelajaran.
3. Peningkatan fasilitas berusaha serta mengadakan pendidikan dan pelatihan usaha.

Faktor Penyebab Kegagalan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia antara lain :

1. Pendistribusian guru yang belum merata dan belum seimbang jumlah guru dengan kebutuhan.
2. Rendahnya lulusan yang diterima di perguruan tinggi dan di dunia kerja.
3. Belum terpenuhinya standar minimal sarana dan prasarana pendidikan.
4. Belum optimalnya penerapan IPTEK.
5. Belum optimalnya kontribusi dana masyarakat dalam mendukung pembiayaan pendidikan.
6. Belum semua Perangkat Daerah mampu mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM).
7. Disparitas sumber daya kesehatan di daerah dan dinamisasi tata kelola pemerintahan yang akan berdampak terhadap capaian program kesehatan.
8. Belum semua fasilitas kesehatan memenuhi standar.

Solusi

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Meningkatkan angka harapan lama sekolah
2. Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah
3. Meningkatkan Usia harapan hidup
4. Stabilisasi dan kontrol inflasi, melakukan pemantauan stabilisasi harga komoditas perdagangan
5. Peningkatan aktifitas ekonomi

Optimalisasi pemanfaatan SDM dan Anggaran

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang telah dicapai serta Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja. Efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai. Pencapaian kinerja didukung oleh pelaksanaan Program dan Kegiatan, keterkaitan antara Sasaran, Indikator, dan Program dengan Target dan Realisasi anggaran adalah untuk melihat dan mengukur target dan realisasi program dalam menunjang pencapaian kinerja indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024.

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 mengalami efisiensi sebesar Rp. 9.277.687.601,- atau 8,04%. Efisiensi tersebut dilakukan pada beberapa kegiatan diantaranya program pada dinas kesehatan serta dinas pendidikan dan kebudayaan.

Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Program yang dilaksanakan dalam pencapaian target indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia adalah 3 (tiga) program yaitu program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan anggaran Rp.112.617.191.729,- dengan realisasi Rp.103.891.734.266 atau capaian 92,25%. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dengan anggaran Rp.1.268.527.540,- dengan realisasi Rp.1.087.251.260,- atau capaian 85,71%. Program pengelolaan pendidikan dengan anggaran Rp.1.521.349.107,- dengan realisasi Rp.1.150.395.249,- atau capaian 75,62%. Total anggaran dari 3 (tiga) program tersebut adalah Rp.115.407.068.376,- dengan realisasi Rp.106.129.380.775,- atau capaian 91,96%. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.9.277.687.601,- atau 8,04%.

Sasaran 3 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Usia Harapan Hidup

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi Usia Harapan Hidup pada tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel 2.16 berikut ini:

Tabel 2.16**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Usia Harapan Hidup Tahun 2024**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian(%)
1.	Usia Harapan Hidup	tahun	73,4	73,44	100,05

Formulasi capaian indikator kinerja Usia Harapan Hidup

$$\frac{\text{UHH} - \text{UHH}_{\min}}{\text{UHH}_{\max} - \text{UHH}_{\min}}$$

UHH = Usia Harapan Hidup

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Usia Harapan Hidup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 adalah 73,4 dan terealisasi 73,44 dengan capaian indikator kinerja adalah 100,05%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Pencapaian Usia Harapan Hidup merupakan salah satu keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan hal ini dapat diartikan bahwa salah satu faktor Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan cita-cita salah satu misi serta penunjang terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita visi Bupati mulai terlihat pada tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pencapaian realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi indikator kinerja indeks Usia Harapan Hidup tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.17 di bawah ini.

Tabel 2.17

Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Usia Harapan Hidup Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup	tahun	71,22	71,39	73,4	71,25	71,52	73,44	100,04	100,18	100,05

Dari tabel di atas dapat dilihat pencapaian Usia Harapan Hidup di

Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan target 73,4 terealisasi sebesar 73,44, dibandingkan dengan target dan realisasi pada tahun 2023 yaitu target 71,39 realisasi 71,52 dan pada tahun 2022 yaitu target 71,22 realisasi 71,25, dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 capaiannya melebihi target. Dengan capaian ini artinya kabupaten Pesisir Selatan dari tahun ke tahun meningkat. Ini juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Usia Harapan Hidup Tahun 2022-2024 dengan Target Jangka Menengah.

Perbandingan Target pada RPJMD 2021-2026 dengan Realisasi Indikator Kinerja Usia Harapan Hidup Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.18
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Usia Harapan Hidup Tahun 2022-2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup	Tahun	71,22	71,39	71,57	71,25	71,52	73,44

Realisasi Indikator Kinerja “Usia Harapan Hidup” pada tahun 2022 yaitu 71,22 Tahun dengan target RPJMD sebesar 71,22 Tahun, realisasi tercapai dengan sangat baik. Pada tahun 2023 realisasi

kinerja mengalami peningkatan menjadi 71,52 Tahun dengan target RPJMD 71,39 Tahun dan begitu juga dengan tahun 2024 realisasi kinerja meningkat dengan signifikan menjadi 73,44 Tahun dengan target RPJMD 71,57 Tahun.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Faktor Keberhasilan

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian indikator usia Harapan hidup di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Melakukan deteksi dini penyakit tidak menular.
2. Melakukan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

3. Meningkatnya akses terhadap pelayanan Kesehatan
4. Memotivasi peran kader dalam meningkatkan Kesehatan ibu dan anak.
5. Adanya komunikasi yang efektif antar puskesmas dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan.
6. Meningkatkan kapasitas petugas dalam pelayanan melalui pelatihan.
7. Meningkatkan peran Masyarakat terhadap Kesehatan.

Faktor Penyebab Kegagalan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan sasaran Usia Harapan Hidup di Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan pola hidup sehat.
2. Tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular.
3. Status kesehatan ibu, bayi dan anak balita yang masih rendah.
4. Masih rendahnya kualitas layanan kesehatan disebabkan banyak fasilitas kesehatan dasar dan rujukan belum mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan.
5. Belum meratanya jumlah, jenis dan mutu sumber daya manusia di bidang kesehatan.
6. Masih adanya angka stunting.

Solusi

Peningkatan Usia Harapan Hidup masyarakat Pesisir Selatan akan terus diupayakan melalui upaya berikut ini

1. Menekan Angka Kematian Ibu melahirkan dan mencegah peningkatan Angka Kematian Bayi, dengan memastikan setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar yaitu pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali dimana 2 kali diantaranya dengan pemeriksaan USG dan pemeriksaan 10 T, memastikan setiap ibu hamil mendapatkan edukasi dan konseling kehamilan melalui pelaksanaan kelas ibu hamil yang diadakan minimal 4 kali dalam setahun di setiap fasilitas pelayanan kesehatan dan memastikan setiap ibu hamil telah memiliki buku KIA, memastikan semua bidan desa dikordinatori oleh puskesmas untuk melaksanakan pemantauan wilayah setempat pada ibu hamil di wilayah kerjanya dan melakukan kunjungan rumah pada ibu hamil yang mengalami kondisi penyulit .
2. Peningkatan Sumberdaya Kesehatan, peningkatan sumber daya kesehatan merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Sumber daya kesehatan mencakup tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, peralatan medis, dana, dan infrastruktur kesehatan
3. Pemberian edukasi terkait penurunan angka kematian ibu, kematian bayi

dan prevalensi stunting melalui inovasi PASAN MANDE di fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah nagari dan stakeholder terkait Pembangunan keluarga dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Selain lingkungan yang sehat, kondisi kesehatan dari tiap anggota keluarga initercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Sistim Informasi Keluarga.

Keluarga sebagai komponen dari masyarakat berperan signifikan dalam mempengaruhi status kesehatan. Keluarga berperan terhadap optimalisasi pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas seluruh anggotanya melalui pemenuhan kebutuhan gizi dan menjamin kesehatan anggota keluarga.

Ibu dan anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, karena ibu dan anak merupakan kelompok yang rentan. Hal ini terkait fase kehamilan, persalinan dan nifas pada ibu dan fase tumbuh kembang pada anak. Hal ini menjadi alasan pentingnya upaya kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia.

Keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia berdampak terhadap peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Meningkatnya UHH saat lahir mengakibatkan peningkatan

jumlah penduduk lanjut usia secara signifikan dimasa yang akan datang. Makin bertambah usia, makin besar kemungkinan seseorang mengalami permasalahan fisik, jiwa, spiritual, ekonomi, dan social. Untuk itu dibutuhkan upaya pemeliharaan kesehatan bagilanjut usia yang ditujukan agar para lanjut usia tetap sehat, mandiri, aktif dan produktif secara sosial dan ekonomi.

Dukungan gizi terutama dalam masa tumbuh kembang berpengaruh besar dalam perkembangan anggota keluarga dan masyarakat. Kekurangan gizi pada usia dini akan berimplikasi perkembangan anak dan selanjutnya perkembangan potensi diri pada usia produktif. Kurang gizi yang dialami saat awal kehamilan juga akan berdampak pada peningkatan risiko gangguan metabolik yang berujung pada penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, penyakit jantung, dan penyakit lainnya saat memasuki usia dewasa.

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan dan nifas, atau

pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh di setiap 100.000 kelahiran hidup. Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas.

Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

Untuk mengukur kinerja yang akuntabel dan transparan, diperlukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan membandingkan capaian realisasi output target target dengan realisasi anggaran, dapat diketahui efisiensi dan efektivitas dari sumber daya yang diberikan sebagai upaya dalam mendukung suatu kegiatan.

Indikator Usia Harapan Hidup ditunjang oleh Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Manusia Kesehatan dengan

Jumlah anggaran Rp. 113.885.719.269,- dengan realisasi Rp. 104.978.985.526,- atau capaian 92,18 %. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan dalam pelaksanaan progam dan kegiatan Tahun 2024 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.8.906.733.743,- atau 7,82 %.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Program dan kegiatan serta Anggaran dan realisasi anggaran yang menunjang indikator kinerja Usia Harapan Hidup. Indikator kinerja Usia Harapan Hidup ditunjang oleh Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan anggaran Rp.112.617.191.729,- dengan realisasi Rp. 103.891.734.266,- atau capaian 92,26 % dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Manusia Kesehatan dengan anggaran Rp.1.268.527.540,- dengan realisasi Rp.1.087.251.260,- atau capaian 85,71 %.

Sasaran 4 : Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu Tingkat Kemiskinan dan Pengeluaran Per Kapita, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.12 berikut ini:

Tabel 2.19
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 4

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,65	7,49	87,37
2.	Pengeluaran Per Kapita	Rp./orang /tahun	9.053.500	10.211.000	102,59
<i>Rata-rata Capaian</i>					94,98

Dari tabel 2.19. di atas dapat dilihat rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 4 sebesar 94,98%. Pencapaian sasaran strategis 4 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan masih merupakan isu penting bagi Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu diperlukan upaya yang lebih besar lagi dari yang telah dilakukan sebelum ini. Jika kelompok masyarakat dapat diatasi, maka tujuan Pesisir Selatan bebas dari kemiskinan dalam arti yang sesungguhnya dapat diwujudkan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan menurunnya tingkat kemiskinan sebagai salah satu indikator untuk pencapaian sasaran meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan pada tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel 3.14 berikut ini:

Tabel 2.20
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tingkat Kemiskinan	persen	6,65	7,49	87,37

Formulasi capaian indikator kinerja Tingkat Kemiskinan

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 adalah 6,65 dan

teralisasi 7,49 dengan capaian indikator kinerja adalah 87,37%. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan dalam angka kemiskinan proventy tahun 2024 yaitu 7,49%. Untuk menentukan angka kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan, BPS Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan rumus jumlah penduduk yang total konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan, di bagi dengan jumlah penduduk keseluruhan, dan kemudian di kali 100. Realisasi tingkat kemiskinan tahun 2024 tercapai melebihi target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja indikator tingkat kemiskinan tercapai < 100%. Pencapaian ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan belum bisa menekan tingkat kemiskinan. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi indikator tingkat kemiskinan tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.21 di bawah ini.

Tabel 2.21
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tingkat Kemiskinan	persen	7,2	6,9	6,65	7,11	7,34	7,49	101,27	93,62	87,37

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam tiga tahun terakhir, persentase penduduk miskin cenderung semakin meningkat. Di tahun 2022, realisasi persentase penduduk miskin adalah 7,11% , realisasi tahun 2023 adalah 7,34%, sedangkan di tahun 2024 sebesar 7,49% persen. Dalam tiga tahun terakhir, target kinerja hanya tercapai pada tahun 2022 capaiannya 101,27 % , sedangkan di tahun 2023 adalah 93,62% dan 2024 adalah 87,37% Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan 2022-2024 dengan Target Jangka Menengah.

Perbandingan Target pada RPJMD 2021-2026 dengan Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.22
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan Tahun 2022-2024 dengan Target RPJMD



Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tingkat Kemiskinan	Persrsen	7,2	6,9	6,65	7,11	7,34	7,49

Dalam tiga tahun terakhir, persentase penduduk miskin cenderung semakin meningkat. Di tahun 2022, persentase penduduk miskin adalah 7,11 persen, sedangkan di tahun 2024 sebesar 7,49 persen. Dalam tiga tahun terakhir, realisasi kinerja terhadap target RPJMD hanya tercapai pada tahun 2022, sedangkan di tahun 2023 dan 2024 target kinerja terkait tingkat kemiskinan tidak sesuai dengan target.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Faktor Keberhasilan

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian indikator Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Melakukan konsolidasi data sasaran penduduk miskin. Proses konsolidasi menyepakati penggunaan Satu Data dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan pada berbagai sektor sehingga intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran dan tepat manfaat.
2. Mengurangi beban pengeluaran adalah guna memastikan setiap sasaran mendapatkan program bantuan sosial, subsidi, jaminan sosial dan program sejenis yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin (kurang mampu).
3. Meningkatkan pendapatan keluarga, salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin adalah mendorong akses terhadap berbagai program pemberdayaan. Hal ini ditujukan agar kapasitas SDM masyarakat miskin dapat lebih meningkat.
4. Melakukan Intervensi program terhadap sektor UMKM, karena makin berkembang sektor UMKM serapan terhadap tenaga kerja juga akan meningkat.
5. Pemanfaatan program ketahanan pangan pada Pemerintah Nagari yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.
6. Mengurangi kantong kemiskinan dilakukan dengan meningkatkan akses layanan pendidikan, kesehatan, konektivitas antar wilayah dan pembangunan infrastruktur.

Faktor Penyebab Kegagalan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan pencapaian sasaran indikator Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Terjadinya Bencana alam dan masih kurangnya edukasi terkait

- kebencanaan serta upaya mengurangi risiko bencana
2. Belum maksimalnya kolaborasi antar Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam melakukan intervensi penurunan tingkat kemiskinan.
 3. Keterbatasan sumber daya baik sumber manusia, teknologi maupun keuangan dalam pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah daerah.
 4. Penggunaan data basis keluarga miskin belum secara operasional dipergunakan sebagai intervensi program pengentasan kemiskinan
 5. Mekanisme dan sistem pencatatan dan pelaporan program pengentasan kemiskinan
 6. Dukungan anggaran pengentasan kemiskinan yang masih terbatas

Solusi

Beberapa upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menurunkan tingkat kemiskinan antara lain :

1. Melakukan fasilitasi pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dan memberikan edukasi terkait kebencanaan berdasarkan karakteristik kondisi lingkungan, kesiapsiagaan bencana dan teknik evakuasi Adanya unsur relawan/expert di bidang penanganan bencana yang terlibat yaitu : Tagana, BPBD, Damkar, PMI dan melibatkan seluruh unsur desa serta PD lainnya yang terkait.
2. Memaksimalkan kolaborasi antar Perangkat Daerah dan pihak terkait dalam melakukan intervensi penurunan tingkat kemiskinan.
3. Mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui pendampingan dan bimbingan.
4. menginventarisir dan memvalidasi jumlah masyarakat miskin by name by adres (P3KE).
5. Melakukan penguatan tata kerja TKPKD Tim koordinasi Penanggulangan kemiskinan Daerah, melalui penyusunan RPKD, Dokumen Rencana penanggulangan Kemiskinan Daerah rencana Aksi Tahunan, RAT Kemiskinan dan RAT Penghapusan kemiskinan ekstrim.
6. Melakukan konsolidasi program penanggulangan kemiskinan lintas sektormeliputi pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan pengurangan wilayah kemiskinan.
7. Melakukan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
8. Melaksanakan pendidikan agar dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan tinggi. Selain itu, melalui pendidikan, masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan peluang ekonomi yang ada.
9. Penyusun program, kegiatan dan sub kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui perencanaan dan penganggaran.

Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

Untuk mengukur kinerja yang akuntabel dan transparan, diperlukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Dengan membandingkan capaian realisasi output target target dengan realisasi anggaran, dapat diketahui efisiensi dan efektivitas dari sumber daya yang diberikan sebagai upaya dalam mendukung suatu kegiatan.

Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan ditunjang oleh Program Rehabilitasi Sosial, Program Penanganan Bencana, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Program Pemberdayaan Sosial dengan Jumlah anggaran Rp2.307.304.476,- dengan realisasi Rp.2.082.080.223,- atau capaian 90,24 %. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.225.224.253,- atau 9,76%.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan didukung oleh beberapa program dan Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp2.307.304.476 dan terealisasi sebesar Rp.2.082.080.223 dengan rincian program yaitu :

1. Program Rehabilitasi Sosial dengan target anggaran Rp.176.280.474,- dan realisasi sebesar Rp.123.098.834 atau capaian 69,83%
2. Program Penanganan Bencana dengan target anggaran Rp.341.595.474 dan realisasi sebesar Rp.266.903.984 atau capaian 78,13%.
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan target anggaran Rp.178.933.195 dan realisasi sebesar Rp. 133.659.992 atau capaian 74,70%.
4. Program Pemberdayaan Sosial dengan target anggaran Rp.1.610.495.333 dan realisasi sebesar Rp. 1.558.417.413 atau capaian 96,77%.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendukung indikator Tingkat Kemiskinan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.225.224.253 atau 9,76%.

2. Pengeluaran Per kapita

Pengeluaran perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu, sedangkan untuk bukan makanan dihitung selama sebulan dan 12 bulan yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka-angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumahtangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan menurunnya tingkat kemiskinan sebagai salah satu indikator untuk pencapaian sasaran yang harus dicapai untuk meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2024.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2024 untuk indikator Pengeluaran Per Kapita dapat dilihat dari tabel di bawah ini

Tabel 2.23
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Pengeluaran Perkapita Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pengeluaran per kapita	Rp./org/thn	9.953.500	10.211.000	102,59

Formulasi capaian indikator kinerja Pengeluaran Perkapita

$$Y^* = \frac{Y}{M} \times 100\%$$

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Capaian Pengeluaran Perkapita Tahun 2024 :	$\frac{\text{Rp.10.211.000}}{\text{Rp.9.953.000}} \times 100\% = 102,59\%$
--	--

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Pengeluaran per kapita dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah pendapatan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2024, pengeluaran per Kapita Masyarakat Pesisir Selatan berada diatas target yaitu dengan capaian 102,59% atau realisasi Rp. 10.211.000/ tahun. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan nilai PDRB dibanding dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.



Berikut ini adalah perbandingan target dan dan realisasi Pengeluaran Per Kapita pada Tahun 2024 dengan tahun 2022 dan 2023

Tabel 2.24
Perbandingan Realisasi dan Capaian
Indikator Kinerja Pengeluaran Per Kapita Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pengeluaran Per Kapita	Rp./org/ tahun	9.325 .000	9.369 .000	9.953 .500	9.686 .000	9.953 .000	10.211 .000	103,87 %	106,23 %	102,59 %

Pada tabel diatas terlihat bahwa tren capaian kinerja pengeluaran per kapita mengalami fluktuasi dari tahun 2022-2024, yaitu naik menjadi 106,23% pada tahun 2023 dan turun menjadi 102,59% pada tahun 2024. Tetapi dari tahun ke tahun realisasinya melebihi yang ditargetkan, ini artinya pengaruh faktor lain diluar pertumbuhan ekonomi dan pendapatan juga berpengaruh terhadap pengeluaran per kapita Masyarakat Pesisir Selatan pada umumnya, diantaranya gaya hidup yang berpengaruh pada kebutuhan, pengetahuan, peluang, hingga pengangguran dan kesempatan kerja. Untuk itu diperlukan koordinasi dan sinergitas subsektor ekonomi dalam pengendalian pengeluaran per kapita Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pengeluaran Per Kapita 2022-2024 dengan Target Jangka Menengah.

Perbandingan Target pada RPJMD 2021-2026 dengan Realisasi Indikator Pengeluaran Per Kapita Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.25
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Pengeluaran Per Kapita Tahun 2022-2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pengeluaran Per Kapita	Rp./orang/ tahun	9.325 .000	9.369. 000	9.534 .000	9.686. 000	9.953. 000	10.211 .000

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari tahun 2022-2024 pengeluaran per kapita Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan meningkat dari tahun ke tahun. Peran koordinasi dan sinergitas pemerintah subsector ekonomi sangat diperlukan dalam pengendalian pengeluaran per kapita Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Faktor Keberhasilan

Beberapa faktor mendorong pengeluaran per kapita adalah :

1. Koordinasi dan sinergitas kegiatan antar subsektor lingkup ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan belum begitu optimal
2. Pemanfaatan dukungan dana dari Pemerintah Pusat berupa DAK dan TP pada subsektor lingkup ekonomi belum optimal
3. Bertambahnya pendapatan masyarakat.
4. Meningkatnya kebutuhan masyarakat.
5. Stabilitasnya inflasi menguatkan daya beli masyarakat hingga ekonomi berputar dinamis.
6. Membaiknya kondisi ekonomi masyarakat.
7. Peningkatan Aktivitas Ekonomi, meningkatnya pengeluaran konsumen dan investasi, itu bisa menjadi indikator pertumbuhan ekonomi yang sehat. Peningkatan aktivitas ekonomi dapat berdampak positif pada lapangan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat;

Faktor Penyebab Kegagalan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya mendorong pengeluaran per kapita antara lain :

1. Koordinasi dan sinergitas kegiatan antar subsektor lingkup ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan belum begitu optimal
2. Pemanfaatan dukungan dana dari Pemerintah Pusat berupa DAK dan TP pada subsektor lingkup ekonomi belum optimal
3. Kurangnya lapangan kerja.
4. Kurangnya sumber daya yang berkualitas.
5. Kurangnya adaptasi teknologi.

Solusi

1. Rapat Koordinasi terkait penanggulan inflasi setiap minggunya
2. Membentuk tim P3DN sebagai langkah penguatan daya saing produk lokal
3. Menciptakan Lapangan kerja.



4. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.
5. Peningkatan dukungan teknologi dalam budidaya tanaman pertanian dan pendampingan melalui peningkatan kompetensi petani, dan pemberian pelayanan kesehatan hewan terpadu, serta optimalisasi peran penyuluh pertanian

Optimalisasi pemanfaatan SDM dan Anggaran

1. Efisiensi Anggaran APBD melalui dukungan Kementerian Perindustrian dalam Pembangunan Sentra IKM dan Penguatan Kelembagaan Sentra IKM melalui dana DAK Kementerian Perindustrian
2. Kerjasama dengan Universitas terkait pemberdayaan Sentra IKM
3. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Total anggaran yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Pengeluaran per kapita dengan total anggaran Rp 13.782.947.428, dengan realisasi sebesar Rp 13.452.188.365 atau capaian 97,60 %. Persentase realisasi keuangan tidak mencapai 100%. Hal ini menunjukkan efisiensi anggaran sebesar Rp330759.063 atau 2,40%.

Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja didukung oleh pelaksanaan Program dan Kegiatan. Keterkaitan Antara Sasaran, Indikator, dan Program dengan Target dan Realisasi anggaran adalah untuk melihat dan mengukur target dan realisasi program dalam menunjang pencapaian kinerja indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024. Program yang menunjang pencapaian Indikator Kinerja Pengeluaran per Kapita dapat dilihat pada tabel 2.26 di bawah ini.

Tabel 2.26
Realisasi Anggaran Program Pendukung Ketercapaian Indikator Kinerja Indeks Pengeluaran per Kapita Tahun 2024

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROG. PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	34.007.630	33.942.500	65.130	APBD
2	PROG. PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	884.675.048	882.974.100	1.700.948	APBD
3	PROG. STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	29.499.610	26.926.050	2.573.560	APBD

4	PROG. STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	283.356.097	276.119.472	7.236.625	APBD
5	PROG. PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	12.435.409.155	12.116.542.404	318.866.751	APBD APBN
6	PROG. PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	26.000.000	25.824.750	175.250	APBD
7	PROG. PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	89.999.888	89.859.089	140.799	APBD
		13.782.947.428	13.452.188.365	330.759.063	

Sasaran 5 : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara Berkelanjutann

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5 terdiri dari 3 (indikator kinerja), dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 2.27 berikut ini:

Tabel 2.27
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 5

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,15	3,84	74,56
2.	Nilai PDRB	Triliyun Rupiah	10,879	11,015	101,25
3.	Indek Gini	Tanpa Satuan	0,25	0,224	110,4
Rata-rata Capaian					95,40

Dari tabel 3.15. di atas dapat dilihat rata-rata capaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis 5 sebesar 95,40%. Pencapaian sasaran strategis 5 termasuk predikat **Sangat Baik**.

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi merupakan peningkatan ekonomi yang didukung oleh tingkat produktivitas dan daya saing potensi unggulan serta meningkatnya lapangan kerja dan pemerataan pendapatan untuk keberdayaan keluarga.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2024.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2024 untuk indikator

Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat dari tabel di bawah ini

Tabel 2.28
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,15	3,84	74,56

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Pertumbuhan ekonomi yaitu 74,56% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini berarti, rencana pemerintah terhadap kenaikan laju perekonomian pada tahun 2024 tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dengan realisasi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan sesuai harapan, seperti stabilitas ekonomi dalam penanggulangan inflasi dan krisis pangan karena el nino, sehingga harapan pertumbuhan ekonomi yang akan naik secara progresif tahun 2024 belum dapat dicapai sesuai angka yang ditargetkan

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Berikut ini adalah perbandingan target dan dan realisasi Pertumbuhan Ekonomi pada Tahun 2024 dengan tahun 2022 dan 2023

Tabel 2.29
Perbandingan Realisasi dan Capaian
Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,89	4,85	5,15	4,02	4,19	3,84	139,10%	86,39%	74,56%

Pada tabel diatas terlihat bahwa tren capaian pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari tahun 2022 hingga 2024. Namun nilai realisasi PDRB sendiri yang menjadi acuan pertumbuhan ekonomi telah kembali bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan target, namun harapan pemerintah terhadap progresivitas pertumbuhan ekonomi masih belum sesuai harapan. Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Kontribusi beberapa lapangan usaha sektor ekonomi belum optimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi belum sesuai target.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi 2022-2024 dengan Target Jangka Menengah.

Perbandingan Target pada RPJMD 2021-2026 dengan Realisasi Indikator Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.30
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022-2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi	ersen	2,89	4,17	4,52	4,02	4,19	3,84

Pertumbuhan ekonomi mengalami naik turun dari tahun 2022-2024. Hal ini berarti kolaborasi dan kontribusi lapangan usaha sektor ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan masih belum optimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang telah dilakukan pemerintah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan lingkup ekonomi masih belum bersinergi dengan baik dan optimal.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 dengan Target Target/Standar Nasional.

Berikut ini Perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024 dengan target dan realisasi

Tabel 2.31
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Pertumbuhan Ekonomi dengan Target/Standar Nasional Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
		PK 2024	Target/ Standar Nasional 2024	PK 2024	Target/ Standar Nasional 2024
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,15	6,2	3,84	5,05*

Catatan: *)Data Realisasi Tahun 2023

Analisis penyebab sama halnya dengan realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan, pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 juga berada dibawah target yang direncanakan, dengan realisasi 5,05%.

Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan

Faktor Keberhasilan

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan juga ditopang dari kontribusi pertumbuhan investasi.
2. Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, menciptakan Kondisi keamanan dan ketertiban wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang kondusif pada Tahun 2024 dalam rangka menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan berinvestasi merupakan suatu prioritas penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan menarik bagi investor
3. Mengoptimalkan promosi penanaman modal dan pengembangan iklim penanaman modal melalui media promosi investasi potensial di Kabupaten Pesisir Selatan sehingga pelaku usaha atau investor berminat
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
5. Memperkuat infrastruktur untuk membangun ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Faktor Penyebab Kegagalan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi terfokus pada sektor perdagangan dan Perindustrian, sektor lain penunjang ekonomi terbesar lainnya seperti pertanian, konstruksi, Pendidikan dan jasa lainnya tidak begitu optimal dan stabil, hanya meningkat perlahan dan tidak begitu signifikan dibanding dengan kondisi sebelum covid-19
2. Koordinasi dan sinergitas kegiatan antar subsektor lingkup ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan tidak begitu optimal
3. Pemanfaatan dukungan dana dari Pemerintah Pusat berupa DAK dan TP pada subsector lingkup ekonomi belum optimal

Solusi.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi antara lain



1. Terus mengoptimalkan sumber sumber investasi dengan melakukan pengendalian pelaksanaan permodalan dengan peningkatan kondusifitas wilayah kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pengembangan dan peningkatan program-program cakupan pemberdayaan UMKM.
3. Peningkatan daya saing Kabupaten Pesisir Selatan dan mendorong kolaborasi perangkat daerah dengan semua sektor di Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengoptimalkan keunggulan dan potensi Pesisir Selatan, peningkatan efisiensi dengan teknologi informasi dan komunikasi, Melakukan analisis dan riset pasar untuk mengidentifikasi peluang baru dan tren ekonomi.

Optimalisasi pemanfaatan SDM dan anggaran

Efisiensi Anggaran APBD melalui dukungan Kementerian Perindustrian dalam Pembangunan Sentra IKM dan Penguatan Kelembagaan Sentra IKM melalui dana DAK Kementerian Perindustrian serta Kerjasama dengan Universitas terkait pemberdayaan Sentra IKM

Total anggaran urusan Perindustrian dan Perdagangan yang dibutuhkan dalam pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp 18.353.211.072, dengan realisasi sebesar Rp 17.625.105.410 atau capaian 96,03 %

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 terdapat efisiensi sebesar 3,97 %

Indikator Pertumbuhan Ekonomi ditunjang oleh beberapa program yaitu :

Tabel 2.32
Realisasi Anggaran Program Pendukung Ketercapaian Indikator Kinerja
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROG. PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	34.007.630	33.942.500	65.130	APBD
2	PROG. PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	884.675.048	882.974.100	1.700.948	APBD
3	PROG. STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	29.499.610	26.926.050	2.573.560	APBD
4	PROG. STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	283.356.097	276.119.472	7.236.625	APBD

5	PROG. PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	12.435.409.155	12.116.542.404	318.866.751	APBD APBN
6	PROG. PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	26.000.000	25.824.750	175.250	APBD
7	JUMLAH	13.692.947.540	13.362.329.276	330.618.264	

2. Nilai PDRB (ADHK)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sebuah nilai tambah bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi, dan nilai ini biasanya dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Nilai PDRB pada tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel 3.27 berikut ini :

Tabel 2.33
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja PDRB Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai PDRB (ADHK)	Triliyun Rupiah	10,879	11,015	101,25

Formulasi capaian indikator kinerja Nilai PDRB (ADHK)

Jumlah PDRB ADHK pada tahun berjalan

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Nilai PDRB (ADHK) Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 adalah 10,879 dan terealisasi 11,015 dengan capaian indikator kinerja adalah 101,25%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai PDRB (ADHK) tahun 2024 sampai dengan tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel 2.34 di bawah ini.

Tabel 2.34
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai PDRB (ADHK) Tahun 2022-2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nilai PDRB (ADHK)	Triliyun Rupian	9,992	10,409	10,879	10,181	10,608	11,015	101,89	101,91	101,25

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa ada kenaikan jumlah realisasi Nilai PDRB (ADHK) dari tahun 2022 mengalami kenaikan. Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator kinerja ini tergolong *Sangat Berhasil* dengan predikat *Sangat Baik*.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Nilai PDRB (ADHK) Tahun 2022-2024 dengan Target Jangka Menengah.

Perbandingan Target pada RPJMD 2021-2026 dengan Realisasi Indikator Kinerja Nilai PDRB (ADHK) tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.35 di bawah ini.

Tabel 2.36
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Nilai PDRB (ADHK) Tahun 2022-2024 dengan Target RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai PDRB (ADHK)	Triliyun Rupian	9,992	10,409	10,879	10,181	10,608	11,015

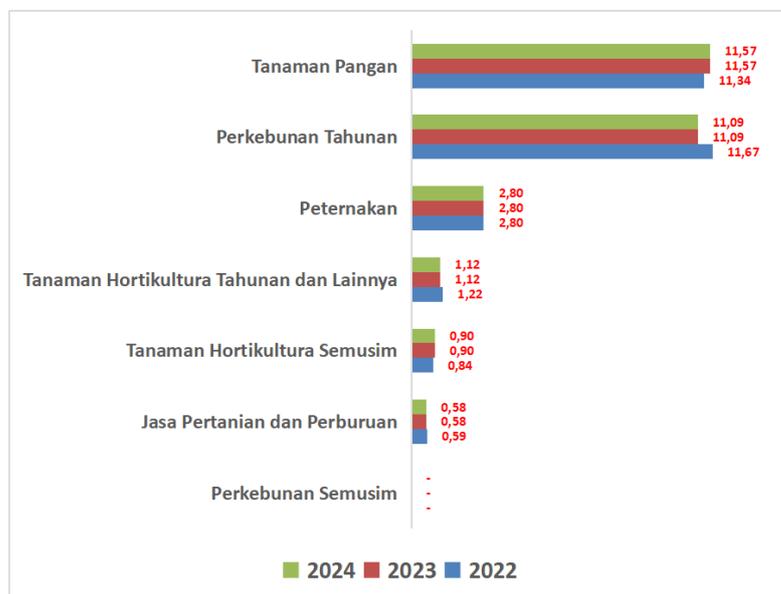
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD, dari tahun 2022 sampai tahun 2024 ada kenaikan jumlah realisasi Nilai PDRB (ADHK), Berdasarkan klasifikasi penilaian indikator kinerja ini tergolong *Sangat Berhasil* dengan predikat *Sangat Baik*.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Faktor Keberhasilan

Faktor yang mempengaruhi peningkatan Nilai PDRB (ADHK) Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

Pertanian merupakan salah satu sektor paling berpengaruh di Kabupaten Pesisir Selatan yang terbukti dengan kontribusinya terhadap



PDRB Kabupaten Pesisir Selatan yang paling tinggi yaitu di angka 28,06 persen pada Tahun 2023. Kontribusi terbesar terhadap PDRB Sektor Pertanian adalah tanaman pangan kemudian disusul oleh perkebunan tahunan, peternakan, tanaman hortikultura tahunan dan lainnya, tanaman hortikultura semusim,

jasa pertanian dan perburuan. Tingginya kontribusi tanaman pangan dan perkebunan tahunan tidak lain disebabkan oleh komoditas padi, jagung dan kelapa sawit yang menjadi komoditi unggulan di Kabupaten Pesisir Selatan. Capaian nilai PDRB sektor pertanian tidak terlepas dari capaian produksi pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan. Capaian produksi pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 s.d Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.37
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Nilai PDRB (ADHK) Tahun 2022-2024 dengan Target RPJMD

No	Komoditi	Satuan	2022	2023	2024*
1	2	3	4	5	6
1	Padi	Ton	161.639	201.974,00	167.598,08
2	Jagung	Ton	208.011	147.741,00	127.921,37
3	Cabe Merah	Ton	5.042	4.975,05	3.841,46
4	Bawang Merah	Ton	146	453,25	71,05
5	Durian	Ton	18.482	16.025,10	20.741,10
6	Manggis	Ton	4.695	3.373,70	3.482,10
7	Jeruk	Ton	4.465	4.412,20	3.866,10
8	Jengkol	Ton	5.747	6.297,20	8.207,70
9	Kelapa Sawit	Ton	79.850	77.352,07	78.124,30
10	Kelapa Dalam	Ton	3.154	3.509,26	3.471,69
11	Kopi	Ton	2.373	2.506,22	2.510,08
12	Gambir	Ton	5.944	5.667,61	7.271,46

13	Pala	Ton	912	1.007,18	1.065,66
14	Daging Sapi	Ton	1.811	1.687	1.570,32
15	Daging Kerbau	Ton	63	53	37,29
16	Daging Kambing	Ton	36	36	18,14
17	Daging Ayam	Ton	4.607	2.973	2.906,34
18	Daging Itik	Ton	128	299	90,99
19	Telur Ayam	Ton	1.199	920	844,85
20	Telur Itik	Ton	1.197	2.790	849,58
Jumlah		Ton	509.500	484.051,84	34.489,66*

Catatan : *) Angka Sementara (ASEM) Tahun 2024

Sumber : Perencanaan dan Pelaporan Tahun 2025

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa komoditi yang mengalami peningkatan dan ada yang mengalami penurunan. Beberapa komoditi yang mengalami peningkatan mulai dari yang terbesar yaitu durian, manggis, jengkol, kelapa sawit, kopi, gambir dan pala. Komoditi yang mengalami penurunan yang terbesar adalah padi dan jagung serta komoditi lainnya. Naik dan turunnya produksi pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut :

1. Luas Lahan

Luas lahan merupakan poin penting terhadap produksi komoditas pertanian. Secara umum, luas lahan berbanding lurus dengan produksi sehingga untuk meningkatkan produksi maka langkah konsevatif yang diambil adalah memperluas lahan, namun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, lahan pertanian mulai tergeser dengan lahan pemukiman sehingga produksi pertanian pun terganggu. Pada Tabel dibawah ini dapat dilihat luas lahan sawah per Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.38
Luas Lahan Sawah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Irigasi (Ha)	Tadah Hujan (Ha)	Pasang Surut (Ha)	Lebak (Ha)	Jumlah (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Silaut	-	-	-	-	-
2	Lunang	681	610,41	-	-	1.291,41
3	BAB Tapan	1.020,89	129	-	-	1.149,89
4	Rahul Tapan	721,30	18	-	-	739,30
5	Pancung Soal	1.399,65	51	-	-	1.450,65
6	Airpura	819,89	-	32	-	851,89
7	Linggo Sari Baganti	773	1.727,54	-	-	2.500,54
8	Ranah Pesisir	1.495	1.092,11	-	-	2.587,11

9	Lengayang	2.597,58	300	-	33	2.930,58
10	Sutera	1.828	866,91	7	19	2.720,91
11	Batang Kapas	1.439	282,89	-	-	1.721,89
12	IV Jurai	1.360,67	37	-	-	1.397,67
13	Bayang	1.628,19	478	-	-	2.106,19
14	Bayang Utara	398	72,31	-	-	470,31
15	Koto XI Tarusan	1.139,75	827	-	-	1.966,75
Jumlah		17.301,92	6.492,17	39	52	23.885,09

Sumber : Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2025, diolah

2. Produktivitas Tanaman

Menurut FAO (*Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa*) Produktivitas tanaman adalah ukuran dari jumlah hasil yang dihasilkan oleh tanaman tertentu dalam satuan luas tanah atau per unit input tertentu, seperti air, pupuk, atau tenaga kerja, dalam jangka waktu tertentu. Produktivitas tanaman dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana tanaman dapat menghasilkan hasil yang optimal.

Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi produktivitas tanaman:

a) Faktor Internal

Genetika Tanaman: Genetika tanaman adalah faktor internal yang paling mendasar. Varietas atau jenis tanaman yang digunakan akan memiliki karakteristik genetik tertentu yang memengaruhi produktivitasnya, seperti resistensi terhadap penyakit, ukuran hasil, dan potensi pertumbuhan.

Umur Tanaman: Siklus hidup tanaman, termasuk fase pertumbuhan, berbunga, dan berbuah, memengaruhi jumlah hasil yang dapat dihasilkan. Tanaman yang memiliki siklus pendek mungkin lebih produktif karena dapat ditanam lebih sering dalam satu tahun.

Kesehatan Tanaman: Kesehatan tanaman, termasuk kebebasan dari penyakit dan serangga, sangat penting untuk produktivitas. Tanaman yang sehat cenderung menghasilkan hasil yang lebih baik.

Nutrisi Tanaman: Ketersediaan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium dalam tanah dapat memengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Pemberian pupuk yang tepat dapat meningkatkan produktivitas.

Kerapatan Tanaman: Jarak antara tanaman (kerapatan tanam) dapat memengaruhi kompetisi untuk sumber daya seperti air, cahaya matahari, dan nutrisi. Kerapatan yang optimal perlu dipertimbangkan untuk mencapai produktivitas maksimum.

b) Faktor Eksternal

Lingkungan: Faktor lingkungan seperti cuaca, suhu, curah hujan, dan kelembaban udara memiliki dampak besar pada produktivitas tanaman. Tanaman yang tumbuh dalam kondisi lingkungan yang sesuai akan lebih produktif.

Tanah: Kualitas tanah, termasuk tekstur, struktur, pH, dan kandungan bahan organik, mempengaruhi kemampuan tanaman untuk menyerap air dan nutrisi. Tanah yang subur dan sehat mendukung produktivitas yang lebih tinggi.

Manajemen Pertanian: Cara tanaman dikelola, termasuk pemilihan varietas yang tepat, penggunaan pupuk dan pestisida, serta praktik irigasi dan pemeliharaan, berdampak besar pada produktivitas. Manajemen yang baik dapat meningkatkan hasil.

Pestisida dan Penyakit: Serangan hama dan penyakit dapat merusak tanaman dan mengurangi produktivitas. Kontrol hama dan penyakit yang efektif diperlukan untuk menjaga produktivitas tanaman.

Teknologi Pertanian: Penggunaan teknologi modern seperti irigasi berbasis sensor, pemantauan pertanian berbasis data, dan pemilihan varietas unggul dapat meningkatkan produktivitas tanaman.

Upaya Peningkatan Produktivitas Tanaman di Kabupaten Pesisir Selatan

Ada banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Berikut adalah beberapa upaya peningkatan produktivitas tanaman di Kabupaten Pesisir Selatan:

a) Pemilihan Varietas Unggul

Memilih varietas tanaman yang memiliki sifat-sifat yang menguntungkan, seperti ketahanan terhadap penyakit, adaptabilitas terhadap kondisi lingkungan, dan hasil yang tinggi, dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki Varietas Unggul Nasional yang sudah dilepaskan oleh Kementerian Pertanian RI yaitu Varietas Unggul Padi Sawah Bawaan Varietas Unggul Jengkol yaitu Jengkol Lokan Pessel dan Jengkol Barih Pessel. Aktivitas-aktivitas penyaluran benih tanaman dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :





Gambar 2.1 : Penyaluran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan ke Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

- b) Pemberian Pupuk yang Tepat
Menerapkan pemupukan yang tepat berdasarkan analisis tanah dan kebutuhan tanaman dapat memastikan bahwa tanaman mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan yang baik.
- c) Pengelolaan Tanah yang Baik
Menerapkan praktik-praktik pengolahan tanah yang optimal, penanaman penutup tanah, dan penggunaan bahan organik dapat meningkatkan struktur tanah dan ketersediaan nutrisi.



Gambar 2.2 : Penyaluran Alat dan Mesin Pertanian ke Kelompok Tani

d) Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Irigasi Tersier

Air merupakan faktor produksi utama pertanian, keberadaan dan berfungsinya infrastruktur air merupakan prasyarat bagi kelangsungan proses produksi pertanian. Dalam rangka peningkatan produksi hasil pertanian khususnya padi, salah satu program yang harus dilaksanakan adalah rehabilitasi jaringan irigasi. Tidak berfungsinya atau rusaknya salah satu bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem irigasi yang ada sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menurun. Pengelolaan irigasi harus memenuhi syarat kewenangan, diharapkan pada kesempatan ini seluruh stake holder terkait baik BWSS V, Provinsi dan Kecamatan dapat berkolaborasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemecahan permasalahan terhadap kinerja sistem irigasi yang ada terutama pada kewenangan kabupaten kota yang merupakan daerah irigasi dengan jumlah dan luas yang paling besar sehingga kedepan masalah rehabilitasi jaringan irigasi tersebut dapat kita cari solusinya. Aktivitas-aktivitas rehabilitasi jaringan irigasi tersier pada Tahun 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :



Gambar 2.3 : Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Tahun 2024

Selain rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pemenuhan akan air terhadap petani juga melalui pemberian bantuan pompa air terutama sawah-sawah tadah hujan. Aktivitas-aktivitas penyaluran pompa air ke Kelompok Tani se Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.4 dibawah ini :



Gambar 2.4 : Penyaluran pompa air ke Kelompok Tani se Kabupaten Pesisir Selatan.

e) Pengendalian Hama dan Penyakit

Menggunakan teknik pengendalian hama dan penyakit yang efektif, termasuk pemilihan varietas tahan penyakit dan pemantauan teratur, dapat mencegah kerugian hasil yang signifikan. Aktivitas-aktivitas Sekolah Lapangan Pengendalian Hama dan Penyakit pada Kelompok Tani se Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.5 dibawah ini :



Gambar 2.5 : Pelaksanaan Sekolah Lapangan Pengendalian Hama dan Penyakit (SL-PHT) Tahun 2024

f) Praktik Penanaman yang Tepat

Mengatur jarak tanam yang sesuai, kedalaman penanaman, dan waktu tanam berdasarkan pada varietas dan kondisi lingkungan adalah kunci dalam meningkatkan produktivitas. Salah satu teknologi budidaya yang dipakai petani di Kabupaten Pesisir Selatan

adalah sistem tanam “Jajar Legowo”. sistem jajar legowo ada beberapa jenis yang biasa diterapkan oleh petani di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu “Jajar Legowo 2:1, 3:1 dan 4:1”. Berdasarkan hasil yang didapatkan jajar legowo 2:1 dapat meningkatkan produksi mencapai 33 persen, jajar legowo 3:1 dapat meningkatkan produksi mencapai 25 persen dan jajar legowo 4:1 dapat meningkatkan produksi mencapai 18 persen. Aktivitas penanaman jajar legowo di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat seperti Gambar dibawah ini :



Gambar 2.6 : Penanaman sistem Jajar Legowo 2:1 (sebelah kiri) dan Jajar Legowo 3:1 (sebelah kanan)

g) Pemangkasan

Pemangkasan tanaman dengan benar dapat merangsang pertumbuhan tunas baru, memaksimalkan pemanfaatan cahaya matahari, dan meningkatkan hasil tanaman yang dibudidayakan. Aktivitas pemangkasan dapat dilihat pada Gambar 3.24 dibawah ini :



Gambar 2.7: Pemangkasan tanaman upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman

h) Penggunaan Teknologi Pertanian

Menerapkan teknologi modern seperti pemantauan berbasis data, aplikasi mobile, dan sistem irigasi otomatis dapat membantu meningkatkan manajemen pertanian dan mengoptimalkan

produktivitas. Aktivitas penggunaan drone dalam pemantauan berbasis data terhadap luas tanam tanaman pangan seperti Gambar dibawah ini :



Gambar 2.8 : Pemantauan luas tanam padi sawah menggunakan drone

- i) Perlindungan Terhadap Cuaca Ekstrem
Menyediakan perlindungan fisik, seperti rumah kaca atau jeruji, dapat membantu melindungi tanaman dari cuaca ekstrem, yang dapat merusak hasil.
- j) Pelatihan dan Pendidikan
Memastikan bahwa petani memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam manajemen pertanian yang efektif sangat penting. Pelatihan dan pendidikan pertanian dapat membantu dalam menerapkan teknik-teknik yang benar. Aktivitas peningkatan kapasitas petugas dan petani/kelompok tani di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :





Gambar 2.9 : Pendidikan dan pelatihan petugas dan kelompok tani Tahun 2024

3. Peningkatan Populasi Ternak

Peningkatan produksi peternakan baik itu daging maupun telur salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan jumlah populasi ternak. Upaya peningkatan populasi ternak yang dilakukan adalah pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) oleh tenaga Inseminator dimana target setiap tahunnya sebanyak 10.000 straw dan bantuan ternak ke peternak.

Aktivitas penyaluran ternak ke Kelompok Tani dapat dilihat pada Gambar dibawah ini :



Gambar 2.10 : Penyaluran ternak ke Kelompok Tani di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

Indikator ini ditunjang oleh program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian. Realisasi program untuk mendukung capaian indikator kinerja Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK) adalah sebesar Rp.12.966.431.673,00 atau 83,40% dari total anggaran sebesar Rp.15.547.249.967,00, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 16,60%.

Faktor Penyebab Kegagalan

Faktor Penyebab kegagalan pencapaian Kinerja Nilai PDRB (ADHK) adalah :

1. Masih Rendahnya Penggunaan Benih Bersertifikat untuk Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
2. Terbatasnya Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian.
3. Masih rendahnya tingkat pendapatan petani/peternak.
4. Belum Optimalnya Peningkatan Produktivitas Pertanian.
5. Keterbatasan Ketersediaan Infrastruktur serta Sarana Prasarana Lahan dan Air.
6. Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Penyuluhan.
7. Masih Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas SDM Petani, Peternak dan Petugas.
8. Belum Optimalnya Pengelolaan dan Kapasitas Kelembagaan Tani.
9. Berkurangnya Lahan Pertanian Akibat Alih Fungsi Lahan.
10. Dampak Perubahan Iklim dan Serangan OPT serta serangan penyakit hewan Terhadap Peningkatan Produksi Pertanian.
11. Rendahnya Akselerasi Pemanfaatan Inovasi Teknologi untuk Hilirisasi Pertanian.
12. Masih Tingginya Tingkat Kehilangan Hasil Dalam Proses Produksi, Panen dan Pasca Panen.
13. Belum optimalnya nilai tambah dan rendahnya daya saing produk pertanian.
14. Belum Optimalnya Pelestarian Sumber daya genetik hewan.
15. Belum terpenuhinya kebutuhan benih ternak unggul.
16. Belum optimalnya penggunaan Teknologi Pakan Alternatif untuk Pakan.

Solusi

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Nilai PDRB (ADHK) antara lain :

1. Meningkatkan Penggunaan Benih Bersertifikat untuk Peningkatan Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana produksi pertanian
3. Meningkatkan pendapatan petani/peternak.
4. Optimalisasi Produktivitas Pertanian.
5. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Penyuluhan.

6. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM Petani, Peternak dan Petugas.
7. Optimalisasi Pengelolaan dan Kapasitas Kelembagaan Tani.
8. Perlindungan Lahan Pertanian dari Alih Fungsi Lahan.
9. Peningkatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Serangan OPT serta serangan penyakit hewan Terhadap Peningkatan Produksi Pertanian.
10. Meningkatkan Akselerasi Pemanfaatan Inovasi Teknologi untuk Hilirisasi Pertanian.
11. Menurunkan Tingkat Kehilangan Hasil Dalam Proses Produksi, Panen dan Pasca Panen.
12. Meningkatkan nilai tambah dan rendahnya daya saing produk pertanian.
13. Optimalisasi Pelestarian Sumber daya genetik hewan.
14. Meningkatkan kebutuhan benih ternak unggul.
15. Optimalisasi penggunaan Teknologi Pakan Alternatif untuk Pakan unggas dan pakan hijauan.

Piagam Penghargaan Yang Diterima Selama Tahun 2024

1. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Berprestasi I Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Dalam Rangka Peningkatan Peran BPP Tingkat Provinsi Sumatera Barat



2. Penyuluh Pertanian PNS Berprestasi II Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Dalam Rangka Peningkatan SDM Pertanian Tingkat Provinsi Sumatera Barat



Dipindai dengan
CamScanner

3. Juara II Kerbau Betina Dalam Rangka Kontes Ternak dan Livestock Expo Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 di Payakumbuh



4. Juara III Sapi Pesisir Jantan Dalam Rangka Kontes Ternak dan Livestock Expo Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 di Payakumbuh



5. Juara III Sapi Pesisir Betina Dalam Rangka Kontes Ternak dan Livestock Expo Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 di Payakumbuh



Dokumentasi Penyerahan Sertifikat dan Trophy Pemenang Penyuluh Pertanian PNS Berprestasi dan BPP Berprestasi





Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran.

Efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran dalam pencapaian kinerja di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024, didorong oleh kebijakan meliputi:

1. Pengalokasian anggaran dengan standar belanja berbasis program yang mendukung sasaran dan tujuan pembangunan.
2. Strategi dan Kebijakan perencanaan pembangunan pada RPJMD 2021-2026 yang terarah dan berkesinambungan dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran secara logis (logical framework) dalam pencapaian kinerja;
3. Penerapan Penyederhanaan /Perubahan Struktur Organisasi;
4. Percepatan kinerja dengan Inovasi.

Pagu anggaran untuk mendukung Indikator Kinerja nilai PDRB (ADHK) ini sebesar Rp. 15.547.249.967,-, dengan realisasi sebesar Rp.12.965.331.673,- atau sebesar 83,39 %. Persentase realisasi keuangan tidak mencapai 100 %. Hal ini menunjukkan efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.581.918.294,- atau 16,61 %.

Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja didukung oleh pelaksanaan Program dan Kegiatan. Keterkaitan Antara Sasaran, Indikator, dan Program dengan Target dan Realisasi anggaran adalah untuk melihat dan mengukur target dan realisasi program dalam menunjang pencapaian kinerja indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024. Program yang menunjang pencapaian Indikator Kinerja Nilai PDRB (ADHK) dapat dilihat pada tabel 3.32 di bawah ini.

Tabel 2.39
Realisasi Anggaran Program Pendukung Ketercapaian Indikator Kinerja
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	936.389.611	817.743.484	87,33	APBD
2	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.618.429.526	2.341.545.966	64,71	APBD
3	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	632.472.830	516.322.320	81,64	APBD
4	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	243.358.000	178.831.620	73,48	APBD
5	Penyuluhan Pertanian	10.116.600.000	9.110.888.283	90,06	APBD
6	Jumlah	15.547.249.967	12.965.331.673	83,39	

Produksi Ikan

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan akuntabilitas Dinas Perikanan dan Pangan Tahun 2024, maka ditetapkan indikator kinerja berdasarkan Urusan Perikanan dan Pangan yang menjadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja ini merujuk kepada indikator kinerja yang tercantum didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026.

Produksi Perikanan ini didukung oleh Produksi Perikanan Tangkap dan Produksi Perikanan Budidaya.

a. Produksi Perikanan Tangkap

Perbandingan antara target dan realisasi Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi produksi perikanan tangkap tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel 2.40 berikut ini :

Tabel 2.40
Perbandingan Target dan Realisasi Produksi Perikanan Tangkap
Tahun 2024



Uraian	Satuan	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Produksi Perikanan Tangkap	ton	36.480	46.334,68	128,40

Secara keseluruhan tabel di atas menunjukkan bahwa sektor perikanan tangkap pada tahun 2024 mengalami performa yang sangat baik. Realisasi produksi tidak hanya memenuhi target, tetapi juga melampauinya secara signifikan. Hal ini mencerminkan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan, serta potensi besar dalam pengelolaan sumber daya perikanan tangkap.

1. Target Produksi :

Target produksi perikanan tangkap yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah **36.480 ton**. Angka ini mencerminkan harapan atau rencana produksi yang ingin dicapai oleh sektor perikanan tangkap pada tahun tersebut.

2. Realisasi Produksi :

Realisasi produksi pada tahun 2024 mencapai **46.334,68 ton**, yang jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil produksi aktual melebihi ekspektasi yang direncanakan.

3. Capaian :

Capaian persentase pada tahun 2024 adalah 128,40%, yang berarti realisasi produksi melebihi target sebesar 28,40%. Angka ini menggambarkan keberhasilan sektor perikanan tangkap dalam mencapai dan melampaui target produksi.

Tabel 2.41
Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022-2024

Uraian	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Produksi Perikanan Tangkap	Ton	35.727	35.906	36.480	35.907	58.405	46.334,68	100,50	162,66	128,40

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa sektor perikanan tangkap mengalami perkembangan yang positif dari tahun 2022 hingga 2024. Meskipun ada fluktuasi dalam realisasi produksi, capaian persentase selalu melampaui target, terutama pada tahun 2023 yang mencatat lonjakan signifikan. Hal ini mencerminkan potensi besar

sektor perikanan tangkap serta efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan. Namun, penurunan capaian pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut untuk mempertahankan stabilitas produksi di masa mendatang.

1. Target Produksi

Target produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan secara bertahap setiap tahunnya:

- Pada tahun 2022, target ditetapkan sebesar **35.727 ton** .
- Pada tahun 2023, target meningkat menjadi **35.906 ton** .
- Pada tahun 2024, target kembali naik menjadi **36.480 ton** .

Peningkatan target ini mencerminkan harapan pemerintah atau pemangku kepentingan terhadap peningkatan produktivitas sektor perikanan tangkap dari tahun ke tahun.

2. Realisasi Produksi

Realisasi produksi menunjukkan hasil aktual yang dicapai oleh sektor perikanan tangkap:

- Pada tahun 2022, realisasi produksi adalah 35.907 ton , sedikit melampaui target.
- Pada tahun 2023, realisasi produksi melonjak signifikan menjadi 58.405 ton , jauh melebihi target yang ditetapkan.
- Pada tahun 2024, realisasi produksi mencapai 46.334,68 ton , masih melampaui target meskipun tidak setinggi lonjakan pada tahun 2023.

Realisasi produksi yang fluktuatif ini menunjukkan dinamika dalam aktivitas penangkapan ikan, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti musim tangkap, teknologi, atau kondisi lingkungan.

3. Capaian Persentase

Capaian persentase menggambarkan sejauh mana target produksi dapat dicapai setiap tahunnya:

- Pada tahun 2022, capaian mencapai **100,50%**, menunjukkan bahwa realisasi sedikit melampaui target.

- Pada tahun 2023, capaian melonjak tajam menjadi 162,66%, mencerminkan performa luar biasa dalam penangkapan ikan.
- Pada tahun 2024, capaian turun menjadi 128,40% , tetapi masih menunjukkan bahwa realisasi produksi melampaui target yang ditetapkan.

Peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap merupakan dampak dari upwelling yang terjadi di perairan laut. Dimana Upwelling (pembalikan massa air) adalah sebuah fenomena di mana air laut yang lebih dingin dan bermassa jenis lebih besar bergerak dari dasar laut ke permukaan akibat pergerakan angin di atasnya. Fenomena ini membawa air dengan konsentrasi tinggi nutrisi seperti nitrat dan fosfat ke permukaan laut. Perairan yang kaya nutrisi ini menjadi pendorong bagi pertumbuhan plankton dan ganggang mikroskopis di perairan tersebut. Peningkatan biomassa ini berkontribusi terhadap tingginya hasil perikanan tangkap di kawasan tersebut.

Karena air dari kedalaman yang dibawa ke permukaan seringkali mengandung kandungan nutrisi yang tinggi, upwelling pada pesisir dapat membantu pertumbuhan rumput laut dan plankton. Selanjutnya, rumput laut dan plankton menjadi penyedia sumber makanan bagi ikan-ikan, mamalia laut, dan burung-burung di daerah tersebut. Dan itu telah terjadi 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2023 dan tahun 2024.

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 36.480 ton dengan tingkat capaian 128,40 %. Capaian indikator kinerja jumlah produksi perikanan tangkap, Sangat Tinggi, hal ini adalah karena berbagai **upaya** yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten pesisir Selatan antara lain:

1. Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap dengan memberikan bantuan sarana penangkapan berupa mesin (mesin tempel, mesin diesel, mesin longtail), jaring, Fish Box, alat tangkap kepiting dan Rumpon laut dangkal.
2. Peningkatan Sarana Penangkapan Ikan bagi Nelayan
3. Pemberdayaan Masyarakat dan peningkatan keahlian melalui kegiatan;
 - a. Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan



- b. Sosialisasi Asuransi Nelayan/Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nelayan
4. Terlaksananya pemberian asuransi nelayan bagi nelayan tradisional dan nelayan skala kecil skala kecil

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan produksi perikanan tangkap :

Faktor Keberhasilan Capaian Sasaran Strategis

1. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Kabupaten Pesisir Selatan yang cukup besar.
2. Dukungan kebijakan pemerintah seperti penyediaan alat tangkap modern, pelatihan nelayan sehingga berkontribusi terhadap peningkatan produksi.
3. Peran serta Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Koperasi perikanan yang telah terbentuk yang partisipasi aktif dalam pembangunan perikanan.
4. Pada tahun 2023 dan 2024 lonjakan produksi kemungkinan besar dipengaruhi oleh optimalisasi musim tangkap, di mana kondisi cuaca dan populasi ikan mendukung peningkatan hasil tangkapan

Hambatan yang masih ditemui dalam Upaya peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap adalah :

1. Faktor Cuaca dan iklim yang tidak menentu.
2. Penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan sehingga terjadi overfishing di perairan umum.
3. Sarana dan prasarana penangkapan masih kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya
4. Pangkalan Pendaratan Ikan belum tersedia secara representative
5. Kurangnya permodalan nelayan untuk pengembangan penangkapan ikan
6. Teknologi penangkapan ikan yang dilakukan masih relative sederhana dan pelestarian sumberdaya perikanan di perairan umum maupun lahan pesisir masih belum optimal.
7. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap

Solusi

Upaya ke depan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pencapaian sasaran strategis jumlah produksi perikanan antara lain :



1. Peningkatan sarana perikanan tangkap yang memadai terutama berupa kapal motor karena dapat memperluas jangkauan nelayan untuk menangkap ikan dibandingkan perahu
2. Peningkatan modernisasi alat tangkap ikan yang berwawasan lingkungan guna peningkatan produksi perikanan tangkap.
3. Kualitas SDM perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan mengenai perikanan laut tangkap untuk para nelayan.

b. Produksi Perikanan Budidaya

Produksi perikanan Budidaya tahun 2024 di dominasi oleh beberapa jenis ikan yaitu Lele, Nila, Gurame, Udang Vaname, Ikan Mas dan Kerapu dan lain-lain. Capaian produksi perikanan budidaya ini tidak terlepas dari adanya bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dari bantuan yang diberikan kepada pembudidaya ikan memberikan dampak positif meningkatnya jumlah produksi perikanan budidaya. Dengan demikian dapat meningkatkan pendapatan pembudidaya

Tabel 2.42
Perbandingan Target dan Realisasi Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2024

Uraian	Satuan	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Produksi Perikanan Budidaya	ton	14.608	14.608	100,00

Secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan bahwa sektor perikanan budidaya pada tahun 2024 berjalan sesuai rencana, dengan realisasi produksi yang tepat memenuhi target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan budidaya perikanan

1. **Target Produksi :**

Target produksi perikanan budidaya yang ditetapkan untuk tahun 2024 adalah **14.608 ton** . Angka ini mencerminkan harapan atau rencana produksi yang ingin dicapai oleh sektor perikanan budidaya pada tahun tersebut.

2. **Realisasi Produksi :**

Realisasi produksi pada tahun 2024 adalah **14.608 ton** , yang berarti bahwa hasil produksi aktual tepat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Capaian:

Capaian persentase pada tahun 2024 adalah 100,00 % , menunjukkan bahwa realisasi produksi berhasil mencapai target secara penuh tanpa kekurangan atau kelebihan

Tabel 2.43
Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022-2024

Uraian	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Produksi Perikanan Budidaya	Ton	13.250	13.913	14.608	14.278	14.490	14.608	107,76	104,15	100,00

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa sektor perikanan budidaya mengalami perkembangan yang stabil dan berhasil mencapai target produksi pada tahun 2024, meskipun pada tahun-tahun sebelumnya realisasi cenderung melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan kemampuan sektor ini dalam memenuhi atau bahkan melampaui ekspektasi produksi.

1. Target Produksi :

Target produksi perikanan budidaya terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, target ditetapkan sebesar **13.250 ton** , kemudian naik menjadi **13.913 ton** pada tahun 2023, dan mencapai **14.608 ton** pada tahun 2024.

2. Realisasi Produksi :

Realisasi produksi juga menunjukkan tren peningkatan yang positif. Pada tahun 2022, realisasi produksi adalah **14.278 ton** , melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, realisasi mencapai **14.490 ton** , dan pada tahun 2024, realisasi produksi tepat sesuai target yaitu **14.608 ton** .

3. Capaian

Capaian persentase menggambarkan sejauh mana target produksi dapat dicapai setiap tahunnya. Pada tahun 2022, capaian mencapai **107,76%** , menunjukkan bahwa realisasi melebihi target. Pada tahun 2023, capaian sedikit menurun menjadi **104,15%** , tetapi masih melampaui target. Pada tahun 2024, capaian persentase adalah **100,00%** , yang berarti realisasi produksi tepat sesuai dengan target yang ditetapkan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan produksi perikanan budidaya :

Faktor yang Mempengaruhi Capaian Sasaran Strategis

1. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan kabupaten Pesisir Selatan yang cukup besar.
2. Pemanfaatan lahan budidaya secara maksimal, seperti budidaya KJA di laut, budidaya tambak, budidaya air tawar dan budidaya secara intensif.

Hambatan yang dihadapi dari capaian sasaran strategis

1. Ketersediaan benih dan induk unggul masih terbatas.
2. Sarana dan prasarana pembudidayaan ikan masih kurang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya.
3. Kurangnya permodalan pembudidaya untuk pengembangan budidaya ikan
4. Masih rendahnya SDM Masyarakat Pembudidaya.
5. rendahnya kesadaran pembudidaya terhadap pengelolaan kualitas air sehingga terjadi penyebaran hama penyakit ikan.
6. Masih sulitnya pemasaran membuat pembudidaya kurang berkembang karena masih bersifat lokal.
7. Faktor cuaca ekstrem yang terjadi sepanjang tahun 2024, yang menyebabkan banjir. Hal ini berpengaruh terhadap usaha budidaya ikan. Diantaranya hanyutnya ikan dan udang yang dibudidayakan di kolam maupun tambak udang.
8. Pemanfaatan lahan budidaya secara maksimal, seperti budidaya KJA di laut, budidaya tambak, budidaya air tawar dan budidaya secara intensif.

Upaya yang dilakukan

1. Memberikan bantuan induk unggul yang bersertifikat dan bantuan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan kepada Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan Pekmbudidaya ikan
2. Pembinaan dan penerapan proses cara budidaya dan cara pembenihan ikan yang baik dengan melakukan sosialisasi CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik) dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang baik) bagi unit usaha perikanan budidaya.
3. Sosialisasi Perizinan terhadap pembudidaya ikan terutama kepada pelaku usaha tambak udang untuk dapat melakukan pengurusan izin usaha dan tanda daftar usaha

4. Pengendalian produksi perikanan budidaya melalui monitoring hama dan penyakit ikan, temu tekans hama dan penyakit ikan
5. Memperbaiki kualitas induk sehingga mutu benih yang dihasilkan berkualitas sehingga produksi bisa meningkat, pendapatan pembudidaya juga meningkat
6. Pendampingan oleh tenaga pendamping Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) agar pembudidaya bisa mendapatkan pinjaman modal
7. Peningkatan SDM dan keahlian pembudidaya baik dari sisi manajerial maupun teknik produksi dalam pengelolaan usaha budidaya, sehingga pemanfaatan lahan

budidaya bisa lebih optimal. Salah satu upaya adalah dengan melakukan pelatihan maupun penyuluhan Untuk mempertahankan keberhasilan ini dan mengatasi tantangan di masa depan, diperlukan upaya optimalisasi teknologi, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, serta kolaborasi antar-pemangku kepentingan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sektor perikanan budidaya dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian

Untuk menghadapi tantangan peningkatan produksi perikanan kedepannya, ada beberapa Solusi yang dapat dilaksanakan yaitu :

1. Optimalisasi Teknologi dan Manajemen Budidaya :

- Mengadopsi teknologi modern dalam budidaya perikanan, seperti sistem akuakultur intensif atau semi-intensif, untuk meningkatkan efisiensi produksi.
- Melakukan pelatihan kepada petani ikan untuk meningkatkan keterampilan dalam manajemen budidaya, pengendalian penyakit, dan pemeliharaan lingkungan.

2. Pengelolaan Sumber Daya yang Berkelanjutan :

- Memastikan ketersediaan bibit unggul dan pakan berkualitas untuk mendukung produktivitas.
- Mengelola lahan budidaya secara optimal dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.

3. Mitigasi Risiko Cuaca Ekstrem :

- Mengembangkan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim, seperti kolam terpal atau sistem resirkulasi air (RAS).

- Menyediakan asuransi pertanian untuk melindungi petani ikan dari risiko kerugian akibat bencana alam.
4. **Peningkatan Kolaborasi Antar-Pemangku Kepentingan :**
- Mendorong kerja sama antara pemerintah, swasta, dan petani ikan untuk mempercepat adopsi inovasi dan meningkatkan akses pasar.
 - Memberikan insentif kepada pelaku usaha perikanan budidaya untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas.
5. **Evaluasi dan Penyesuaian Target Secara Berkala :**
- Melakukan evaluasi berkala terhadap target produksi untuk memastikan bahwa target tetap realistis dan sesuai dengan kondisi lapangan.

Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan

Industri Pengolahan merupakan aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. PDRB sendiri merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, sedangkan PDRB sektor Industri Pengolahan adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha sektor pengolahan. Sedangkan Indikator Nilai PDRB sektor Industri Pengolahandiformulasikan oleh Badan Pusat Statistik. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan PDRB Sektor Industri Pengolahan sebagai salah satu indikator untuk pencapaian sasaran Meningkatnya pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi secara berkelanjutan.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Perbandingan antara target dan ralisasi Nilai PDRB sektor industri pengolahan pada tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel 2.43 berikut ini:

Tabel 2.43
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai PDRB Sektor
Industri pengolahan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	Milyar Rp.	730,85	759,55*	103,93%

Catatan: *)Data Realisasi Tahun 2023

Formulasi capaian indikator kinerja Nilai PDRB sektor industri pengolahan

Jumlah PDRB dari sektor industri pengolahan berdasarkan ADHK dalam 1 (satu) tahun

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dengan menggunakan data sementara Tahun 2023, terlihat bahwa capaian kinerja Nilai PDRB sektor industri pengolahan lebih dari 100% dengan realisasi Nilai PDRB sebesar Rp. 759,55 Milyar pada tahun 2023, nilai ini kemungkinan akan meningkat di tahun 2024, seiring dengan membaiknya ekonomi nasional, didukung oleh langkah antisipatif dan cepat tanggap pemerintah dalam penanganan gejolak ekonomi internal dan eksternal seperti inflasi, el nino ataupun upaya pemulihan yang cepat dan progresif pasca bencana.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Berikut ini adalah perbandingan target dan dan realisasi Nilai PDRB sektor industri pengolahan pada Tahun 2024 dengan tahun 2022 dan 2023

Tabel 2.44
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai PDRB sektor industri pengolahan Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Nilai PDRB sektor industri pengolahan	Milyar Rupiah	707,32	717,93	730,85	741,26	759,55	759,55*	104,80%	105,80%	103,93%*

Catatan: *)Data Realisasi Tahun 2023

Pada tabel diatas terlihat bahwa tren capaian Nilai PDRB sektor industri pengolahan selalu diatas 100% dengan nilai realisasi PDRB cenderung meningkat. Ini artinya kenaikan nilai PDRB sektor industri pengolahan sudah dapat diprediksi sebelumnya dengan nilai proyeksi kurang progresif dibanding nilai realisasi. Untuk kedepannya, pada penyusunan Indikator Kinerja Utama RPJMD periode berikutnya, target Nilai PDRB sektor industri pengolahan akan ditingkatkan menyesuaikan dengan data realisasi saat ini dan beberapa tahun kebelakang.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Nilai PDRB sektor industri pengolahan 2022-2024 dengan Target Jangka Menengah.

Perbandingan Target pada RPJMD 2021-2026 dengan Realisasi Indikator Nilai PDRB sektor industri pengolahan Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.45
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Nilai PDRB sektor industri pengolahan Tahun 2022-2024 dengan
Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Nilai PDRB sektor industri pengolahan	Milyar Rupiah	707,32	717,93	730,85	741,26	759,55	759,55 *

Catatan: *)Data Realisasi Tahun 2023

Nilai realisasi PDRB selalu meningkat tiap tahunnya dan selalu berada diatas target RPJMD, hal ini berarti realisasi kinerja PDRB sektor pengolahan tiap tahunnya berada diatas harapan pemerintah. Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang telah dilakukan pemerintah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan lingkup ekonomi khususnya sektor Industri pengolahan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Faktor Keberhasilan

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja Nilai PDRB sektor industri pengolahan

- a. Membaiknya ekonomi nasional, didukung oleh langkah antisipatif dan cepat tanggap pemerintah dalam penanganan gejolak ekonomi internal dan eksternal seperti inflasi, el nino ataupun upaya pemulihan yang cepat dan progresif pasca bencana. Hal ini terbukti dengan keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan inflasi (inflasi yang rendah) pada awal triwulan III tahun 2024.

- b. Adanya dukungan dari Pusat dalam hal pembangunan sarana dan prasarana IKM melalui dana DAK Fisik Pembangunan Sentra IKM dan DAK non Fisik Penguatan Kelembagaan Sentra IKM.
- c. Penataan Sistem pengelolaan data industri nasional (SIINas), memungkinkan program pemberdayaan industri nasional lebih merata dan dapat menyentuh IKM di Kabupaten Pesisir Selatan, seperti program OVOP, Bussiness Matching, dll

Faktor penyebab kegagalan

Faktor penyebab kegagalan pencapaian kinerja Nilai PDRB sektor industri pengolahan.

- a. Masih rendahnya daya saing produk IKM yang disebabkan karena kualitas Sumber Daya Manusia Industri yang masih rendah, terutama dalam hal :
 - Kewirausahaan, motivasi dan manajemen bisnis
 - Penguasaan teknologi produksi
 - Pengembangan produk yang berorientasi pada mutu
 - Daya inovasi (diversifikasi produk dan pengembangan kemasan)
 - Pengembangan produk yang berbasis sumber daya lokal.
- b. Belum terwujudnya komitmen dan sinergitas kebijakan *stakeholder* dalam pengembangan IKM.
- c. Kurangnya jumlah tenaga ahli pembina dan penyuluh industri dan terbatasnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan teknis

Solusi

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan pencapaian kinerja Nilai PDRB sektor industri pengolahan

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan teknis dan manajemen, standarisasi dan sertifikasi produk IKM, serta membangun kemitraan dengan swasta/ BUMN/ BUMD, lembaga pengujian dan desain produk serta perguruan tinggi. ,
- b. Mendorong tumbuh dan berkembangnya produksi produk lokal unggulan dalam rangka mewujudkan program nasional TKDN dan P3DN.
- c. Percepatan operasional Sentra IKM, sehingga dapat menghidupkan perekonomian Masyarakat di sekitar sentra
- d. Pemilihan metode pembinaan industri yang tepat, dapat berupa jenis pelatihan, metode pendampingan, peningkatan kualitas produk sehingga dapat mengungkit nilai jual dan omset IKM sertadiversifikasi produk olahan

- e. Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam pemberdayaan IKM dan sentra IKM
- f. Pengembangan dan peningkatan program-program cakupan pemberdayaan UMKM.

Optimalisasi pemanfaatan SDM dan anggaran.

- a. Efisiensi Anggaran APBD melalui dukungan Kementerian Perindustrian dalam Pembangunan Sentra IKM dan Penguatan Kelembagaan Sentra IKM melalui dana DAK Kementerian Perindustrian
- b. Kerjasama dengan Universitas terkait pemberdayaan Sentra IKM
- c. Efisiensi Penggunaan Anggaran :
 - Total anggaran yang dibutuhkan dalam pencapaian indikator ini adalah sebesar Rp 12.461.409.155, dengan realisasi sebesar Rp 12.142.367.154 Atau capaian 97,44 %
 - Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 terdapat efisiensi sebesar 2,56 %

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Nilai PDRB sektor industri pengolahan

Tabel 2.46
Program Pendukung Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Keterangan
1	PROG. PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	12.435.409.155	12.116.542.404	318.866.751	APBD APBN
2	PROG. PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	26.000.000	25.824.750	175.250	APBD
		12.461.409.155	12.142.367.154	319.042.001	

3. Indek Gini

Salah satu metode untuk mengukur pemerataan pendapatan adalah Indeks Gini. Indeks Gini menunjukkan ketimpangan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1.

Semakin tinggi/mendekati satu, menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Semakin kecil angka indeks gini akan semakin baik, karenamengindikasikan bahwa pemerataan distribusi ekonomi penduduk di

suatu wilayah yang semakin baik atau ketimpangan ekonomi penduduk suatu wilayah yang semakin minim. Selain itu, penurunan ketimpangan juga dapat mengindikasikan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap sumberdaya ekonomi dan sosial. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Indek Gini sebagai salah satu indikator untuk pencapaian sasaran meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan,

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Perbandingan antara realisasi Indikator Kinerja Indek Gini pada tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel 2.47 berikut ini:

Tabel 2.47
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indek Gini Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indek Gini	Tanpa satuan	0,25	0,224	110,4

Formulasi capaian indikator kinerja Indek Gini

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$$

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Indek Gini pada tahun 2024 adalah 0,25 dan terealisasi 0,224 dengan capaian indikator kinerja adalah 110,4%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Distribusi pendapatan pada dasarnya merupakan suatu konsep mengenai penyebaran pendapatan atau kekayaan di antara setiap orang atau rumah tangga dalam suatu wilayah atau negara. Sebaran pendapatan atau kekayaan tersebut tidak akan merata antar individu. Akan tetapi, bisa menjadi masalah apabila perbedaan tersebut sangat besar. Perbedaan penyebaran pendapatan atau kekayaan tersebut dikenal dengan ketimpangan. Salah satu indikator yang mengukur ketimpangan adalah indeks gini.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Indeks Gini pada Tahun 2024 dengan tahun 2022 dan 2023

Tabel 2.48
Perbandingan Realisasi dan Capaian
Indikator Kinerja Indeks Gini Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Gini	Tanpa satuan	0,25	0,25	0,25	0,246	0,259	0,224	101,63 %	96,40 %	89,60 %

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penurunan angka Gini rasio dari 0,259 menjadi 0,224 meskipun terlihat kecil secara angka, menunjukkan adanya perbaikan penurunan ketimpangan. Penurunan sebesar 0,035 berdampak signifikan terutama pada kelompok rentan. Berdasarkan klasifikasi penilaianrealisasi dan capaian tahun 2024, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Indeks Gini Tahun 2022-2024 dengan Target Jangka Menengah.

Perbandingan Target pada RPJMD 2021-2026 dengan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Gini Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.49
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Indeks Gini Tahun 2022-2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Gini	Tanpa satuan	0,25	0,25	0,25	0,246	0,259	0,224

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dalam 3 tahun terakhir dapat dikatakan bahwa hanya tahun 2023 saja target Indeks Gini yang tidak tercapai, sesuai target RPJMD yaitu terealisasi sebesar 0,259 dari yang ditargetkan 0,25. Namun untuk tahun 2022 dan 2024 target Indeks Gini yang telah ditetapkan dalam RPJMD telah tercapai, diatas target RPJMD yaitu terealisasi sebesar 0,246 tahun 2022 dan terealisasi 0,224 tahun 2024 dari yang ditargetkan 0,25.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Indeks Gini Tahun 2024 dengan Target Target/Standar Nasional

Perbandingan target dan realisasi Indikator Kinerja Indeks Gini Tahun 2024 dengan target dan realisasi Target/Standar Nasional Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.50
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Gini dengan Target/Standar Nasional Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
		PK 2024	Target/Standar Nasional 2024	PK 2024	Target/Standar Nasional 2024
Indeks Gini	Tanpasatuan	0,25	0,374-0,377	0,224	0,381

Realisasi Indeks gini Kabupaten Pesisir Selatan lebih baik dibandingkan realisasi Nasional pada tahun 2024. Artinya ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan lebih kecil dibandingkan dengan ketimpangan yang terjadi secara Nasional.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Faktor keberhasilan

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja Indeks Gini adalah :

- Peningkatan SDM
Membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi, meratakan kesempatan ekonomi.
- Peningkatan Akses Layanan Kesehatan.
Memastikan bahwa semua kelompok pendapatan memiliki akses kelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.
- Pembangunan Infrastruktur pedesaan dan proyek padat karya
Meningkatkan infrastruktur di daerah pedesaan atau terpencil.

Faktor Penyebab Kegagalan

Faktor penyebab kegagalan pencapaian Indikator Kinerja Indeks Gini adalah :

- Struktur ekonomi yang tidak inklusif, sehingga ketimpangan pendapatan yang meningkat.

- b. Kesenjangan akses terhadap peluang ekonomi, distribusi lapangan kerja yang lebih mendukung kelompok tertentu dapat meningkatkan ketimpangan.
- c. Kebijakan redistribusi yang kurang efektif, kebijakan seperti bantuan sosial atau subsidi mungkin belum menjangkau secara optimal kelompok miskin.

Solusi

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan redistribusi
- b. Penciptaan peluang ekonomi inklusif
- c. Sinergitas pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan

Optimalisasi pemanfaatan SDM dan anggaran.

- a. Peningkatan kualitas SDM
- b. Peningkatan produktivitas melalui pemberdayaan UMKM, teknologi untuk petani dan nelayan
- c. Prioritas anggaran pada program yang menekan ketimpangan seperti bantuan sosial yang tepat sasaran, program padat karya, fokus pada infrastruktur pelayanan dasar dan jalan, jembatan dan fasilitas publik

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Indek Gini adalah :

- Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum Rp.2.983.050.000
- Program penyelenggaraan jalan Rp.65.563.563.200
- Program pengelolaan pendidikan Rp. 119.410.758.917
- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Rp. 118.636.953.161
- Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja Rp. 900.000.000
- Program penanganan kerawanan pangan Rp. 32.999.750
- Program Rehabilitasi Sosial Rp. 463.987.797
- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp. 104.964.610
- Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) Rp. 22.412.090
- Program pengelolaan perikanan budidaya Rp. 633.603.766
- Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Rp. 120.010.914
- Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif Rp. 650.000.135
- Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Rp.

60.000.000

- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan Rp. 715.400.212
- Program perencanaan dan pembangunan industri Rp. 3.180.500.000
- Program pengembangan kawasan transmigrasi Rp. 99.999.860

Sasaran 6 : Meningkatkan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahtera Masyarakat.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 6 terdiri dari 1 (indikator kinerja), yaitu Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD, dengan banyaknya kawasan destinasi pariwisata yang tumbuh di Kabupaten Pesisir Selatan yang di kelola oleh swasta dan termasuk yang di kelola oleh pemerintah daerah merupakan pemasukan terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) bisa memberikan tambahan PAD bagi daerah selain dari PAD yang lain.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Perbandingan antara target dan ralisasi Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel 3.45 berikut ini:

Tabel 2.51
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	persen	2,7	2,06	76,30

Formulasi capaian indikator kinerja Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

Jumlah PAD sektor pariwisata dibagi PAD x 100%

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2024 adalah 2,7 dan terealisasi 2,06 dengan capaian indikator kinerja adalah 76,30%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Berhasil** dengan predikat **Baik**.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.



Perbandingan target dan dan realisasi Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD pada Tahun 2024 dengan tahun 2022 dan 2023, belum dapat dibandingkan karena Indikator ini adanya pada tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD 2022-2024 dengan Target Jangka Menengah.

Perbandingan Target pada RPJMD 2021-2026 dengan Realisasi Indikator Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Tahun 2022-2024 belum dapat dibandingkan karena indikator kinerja ini adanya tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Tahun 2024 dengan Target Target/Standar Nasional

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Tahun 2024 tidak dibandingkan dengan Target Target/Standar Nasional

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Faktor Keberhasilan

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan indikator kinerja Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD adalah :

- a. Percepatan infrastruktur yang mendukung kawasan pariwisata strategis
- b. Trend promosi pariwisata melalui berbagai media di internet.
- c. Mendorong kelompok sadar wisata (Pokdarwis) menyiapkan iven berbasis potensi Nagari.

Tabel 2.52
Daftar Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

NO	NAMA POKDARWIS	ALAMAT	DAYA TARIK WISATA
1	2	3	4
1	POKDARWIS CAROCOKPANTAI PAINAN	Carocok Painan Nagari Painan Selatan Kec. IV Jurai	Wisata Pantai, Pulau, Atraksi Bahari, Permainan Anak2, Kuliner, dll
2	POKDARWIS GUNJANTINO	Nagari Puluik2 Kec. Ampek Nagari Bayang Utara	Trecking, Alam/Pegunungan
3	POKDARWIS BATU PUTI INDAH	Nagari Api-api Kec. Bayang	Pantai/Bahari
4	POKDARWIS NAGARI SAGO	Nagari Sago, Kec. IV Jurai	Pantai/Bahari
5	POKDARWIS NAGARI SALIDO	Nagari Salido Kec. IV Jurai	Pantai/Bahari
6	POKDARWIS SAKO INDAH ALAMI	Nagari Sei. Gambir Sako Kec. Ranah IV Hulu Tapan	Alam / pegunungan

7	POKDARWIS BAHARI MADHANI	Nagari Sei. Nyalo Mudiak AieKec. Koto XI Tarusan	Wisata Bahari
8	POKDARWIS MANDEH	Nagari Mandeh Kec. Koto XI Tarusan	Wisata Bahari
9	POKDARWIS SARASAH KAMUMUAN	Nagari Salido Sari Bulan Kec.IV Jurai	Alam/Pegunungan, Terowongan, PLTA
10	POKDARWIS KMB CAROCOK ANAU	Nagari Carocok Anau Kec. Koto XI Tarusan	Perahu wisata
11	POKDARWIS TANSRIDANO	Nagari Taluk Kec. BatangKapas	Pantai / Bahari
12	POKDARWIS LABUANG BARUAK	Nagari Koto Nan Duo IV KotoHilie, Kec. Batang Kapas	Pantai / Bahari / Pegunungan
13	POKDARWIS LASKAR PEDULI LINGKUNGAN	Nagari Amping Parak, Kec. Sutera	Konservasi lingkungan, penangkaran penyu, mangrove, pantai dan perahu wisata
14	POKDARWIS WASTAM	Nagari Limau Gadang LumpoKec. IV Jurai	Konservasi TNKS, AirTerjun, Sungai, Arung Jeram dan Trecking
15	POKDARWIS SUTA MANDIRI	Nagari Koto Nan Duo IV KotoHilie, Kec. Batang Kapas	Pantai, wisata air dan Atraksi wisata,
16	POKDARWIS EKO WISATA IKAN LARANGAN	Nagari Kambang Timur, Kec.Lengayang	Embung, Ikan larangan, atraksi wisata
17	POKDARWIS MUARA KANDIH	Nagari Muara Kandis Punggasan Kec. Linggo Saribaganti	Jembatan Pelangi, Sungai dan Atraksi
18	POKDARWIS MOELATI MAS	Nagari Ampang Pulai Kec. Koto XI Tarusan	Pantai Taluk Sikulo, PantaiBatu Kalang
19	POKDARWIS BATU BAIDUANG	Nagari Pancuang Taba Kec.IV Nagari Bayang Utara	Negeri diatas awan, pegunungan, kulinerkacang dilan
20	POKDARWIS TALUN 7 BIDADARI	Nagari Inderapura SelatanKec. Pancung Soal	Air terjun 7 bidadari
21	POKDARWIS SIGUNTUR TUA	Nagari Siguntur Tua Kec. Koto XI Tarusan	Air terjun SarasahSiguntur Tua
22	POKDARWIS KARANG PUTIH KAPUJAN	Nagari Kapujan Koto BerapakBayang, Kec. Bayang	Air Terjun, alam yg indahdan kuliner

23	POKDARWIS ANUGERAH PANTAI	Nagari Pasar Lama Air Haji, Kec. Linggo Sari Baganti	Wisata Bahari, Pantai, dankuliner
24	POKDARWIS GUNUANG GADANG	Nagari Koto Nan Duo IV KotoHilie, Kec. Batang Kapas	Wisata Bahari, Pantai, dankuliner
25.	POKDARWIS PESONA TIMBULUN	Nagari Painan Timur Painan, Kec. IV Jurai	Air Terjun, alam yg indah, kuliner dan seni budaya
26	POKDARWIS LE PARADIS .SP	Nagari Sungai Pinang MandehKec. Koto XI Tarusan	Ekowisata mangrove, pantai, selam, dan surfing
27	POKDARWIS RUMAH GADANG MANDE RUBIAH	Nagari Lunang Kec. Lunang	Wisata Budaya, Sejarah dan Makam Raja-raja
28	POKDARWIS SARIAK GEOPARK	Nagari Rawang Gunung Malelo Surantih	Wisata alam, mangrow, geopark dll
29	POKDARWIS TARATAK SEPAKAT WISATA	Nagari Taratak Kec. Sutera	Agro Wisata, Tambak Ikan, Tambak Udang Kebun Lengking, Durian,dan Kuliner
30	POKDARWIS SINAR UTAMA	Nagari Pondok Parian Kec.Lunang	Tabek/Embung, AgroWisata, dll
31	POKDARWIS TELUK KUALO INDRAPURA	Nagari Teluk Kec. Airpura	Agro Wisata, Tambak Ikan, Tambak Udang, Kebun Lengking Durian dan Kuliner
32	POKDARWIS BOAT WISATA BATU KALANG	Nagari Ampang Pulai Kec. Koto XI Tarusan	Boat Wisata Teluk Sikulo
33	POKDARWIS BALAI LAMO SALIDO	Nagari Salido Kec. IV Jurai	Pantai, Kuliner dan SeniBudaya
34	POKDARWIS MUARO BANTIANG	Nagari Pulau Karam AmpangPulai Kec. Koto XI Tarusan	Pantai, Kuliner dan SeniBudaya
35	POKDARWIS NAGARI KOTO BARU KOTO BARAPAK	Nagari Koto Baru KotoBarapak Kec., Bayang	Air Terjun, Treking, KolamPemandian, Seni Budaya dan Kuliner

Faktor penyebab kegagalan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD antara lain :

1. Masih minimnya pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat kompetensi
2. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan destinasi pariwisata

3. Menurunnya jumlah kunjungan wisata akibat bencana alam, terjadinya bencana alam yang menyebabkan terputusnya akses jalan menuju kabupaten pesisir selatan, setelah itu terjadi lagi bencana yang lebih besar di kabupaten agam yang menambah tidak dapatnya wisatawan berkunjung ke kabupaten pesisir Selatan, sebab wisatawan yang datang berwisata ke kabupaten pesisir selatan kebanyakan dari daerah pekanbaru dan sekitarnya yang melewati Kabupaten Agam.

Solusi

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD antara lain :

1. Memberikan pelatihan-pelatihan yang bekerjasama dengan penyelenggara diklat yang terakreditasi untuk mendapatkan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang bersertifikat kompetensi
2. Menciptakan inovasi dan kreativitas organisasi dalam mencapai peningkatan capaian kinerja.
3. Pendampingan kelembagaan, sertifikasi dan bantuan kepada pelaku pariwisata.
4. Peningkatan Promosi Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Lokal Pasca Bencana.
5. Pengembangan ekonomi Nagari dengan kemitraan dan BUMNag yang berfokus pada pariwisata.

Optimalisasi pemanfaatan SDM dan anggaran.

Pagu Anggaran untuk mendukung indikator Kinerja Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten Pesisir Selatan ini sebesar Rp. 7.503.542.950,- dengan realisasi sebesar Rp.6.976.476.303,- atau sebesar 92,98%. Persentase realisasi keuangan tidak mencapai 100%. Hal ini menunjukkan efisiensi anggaran sebesar Rp.527.066.647,- atau 7,02%.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Program yang menunjang pencapaian Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2024 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.53
Realisasi Anggaran Program Pendukung Ketercapaian Indikator Kinerja
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2024

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1,385,791,994	1.048.985.407	336.806.587	APBD
2	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	375,281,487	365.094.377	10.187.110	APBD
3	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	4,741,005,729	4.651.169.269	89.836.460	APBD
4	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	100,007,350	99.950.400	56.950	APBD
5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	901,456,390	811.276.850	90.179.540	APBD
Total		7.503.542.950	6.976.476.303	527.066.647	

Penghargaan

Adapun Penghargaan yang diperoleh adalah Desa Wisata Amping Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat sebagai 50 Desa Wisata Terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024 Desa Wisata Menuju Pariwisata Hijau Berkelas Dunia oleh Kementerian Pariwisata..



Sasaran 7 : Terwujudnya Pendidikan yang berkualitas

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 7 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Pencapaian SPM.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja Indeks Pencapaian SPM dapat dilihat dari tabel di bawah ini

Tabel 2.54
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Indeks Pencapaian SPM Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Pencapaian SPM	tanpa satuan	70,00	91,57	130,81%

Formulasi capaian indikator kinerja Indeks Pencapaian SPM

Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar X
 bobot Mutu (20%) + Persentase pencapaian penerima
 layanan dasar X Bobot penerima layan (80%)

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Indeks Pencapaian SPM Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 adalah 70,00 dan terealisasi Tinggi 91,57% dengan capaian indikator kinerja adalah 130,81%. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasi** dengan predikat **Sangat Baik**.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Indeks Pencapaian SPM Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya.

Perbandingan target dan realisasi Indeks Pencapaian SPM tahun 2024 dengan tahun 2022 dan 2023 belum dapat dibandingkan karena indikator kinerja ini adanya tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Indeks Pencapaian SPM 2022-2024 dengan Target Jangka Menengah.

Perbandingan Target pada RPJMD 2021-2026 dengan Realisasi Indikator kinerja Tahun 2022-2024 belum dapat dibandingkan karena indikator kinerja ini adanya tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Indeks Pencapaian SPM Tahun 2024 dengan Target Target/Standar Nasional

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Indeks Pencapaian SPM Tahun 2024 tidak dibandingkan dengan Target Target/Standar Nasional Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat Pembukaan UUD 1945 merupakan salah satu tujuan negara yang mempunyai arti sangat luas dan membutuhkan kesungguhan dalam mencapainya. Untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas tentu harus didukung dengan sistem yang jelas. Pemerintah melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan satu aturan yang sangat jelas tentang bagaimana Pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia akan dilaksanakan untuk melahirkan generasi-generasi bangsa yang cerdas. Untuk menjalankan fungsi tersebut diperlukan suatu pedoman penjaminan mutu pendidikan yang mampu menggiring proses pelaksanaannya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Faktor Keberhasilan

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian Indeks Pencapaian SPM Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Komitmen Pimpinan Perangkat Daerah menjadikan Standar Pelayanan Minimal sebagai indikator dalam Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Kegiatan
2. Perlunya persamaan persepsi antara pimpinan perangkat daerah dan staf terkait pencapaian standar pelayanan minimal.
3. Meningkatkan peran orang tua dan masyarakat dalam mendampingi Pembelajaran Anak di luar sekolah;
4. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam kegiatan pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi untuk meningkatkan kompetensi guru;
5. Meningkatkan peran swasta dalam mendukung pemenuhan sarana dan prasana pendidikan melalui dana CSR;

Faktor Penyebab Kegagalan

Faktor penyebab kegagalan pencapaian kinerja Indeks Pencapaian SPM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :



1. Kabupaten Pesisir Selatan termasuk Daerah Rawan Bencana, sehingga mengakibatkan srapras rusak dan terganggunya proses pembelajaran;
2. Keterbatasan sumber daya baik sumber manusia, teknologi maupun keuangan disebagian satuan pendidikan;
3. Kualitas tenaga pendidik belum maksimal;
4. Masih banyak masyarakat kurang mampu;
5. Kemampuan Literasi dan Numerasi masih kurang
6. Masih terbatasnya akses transportasi umum ke sekolah.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam upaya mewujudkan pencapaian indeks pencapaian SPM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Meningkatkan Kemampuan Manajemen Kepala Sekolah;
2. Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
3. Melaksanakan Program Nagari Bersekolah (Pronasa) dengan membentuk komunitas belajar (Kombel) sesuai minat dan bakat siswa;
4. Mengoptimalkan transportasi umum untuk anak sekolah di beberapa kecamatan yang kesulitan akses dan ekonomi;
5. Peningkatan Kemampuan Literasi dan Numerasi
6. Mengoptimalkan peran orang tua dan masyarakat dalam rangka pendampingan dan pengawasan peserta didik di luar sekolah;
7. Mengaktifkan kembali peran dewan pendidikan dan stakeholder dalam perencanaan sektor pendidikan

Dalam pencapaian indikator kinerja indeks Pencapaian SPM pada tahun 2024 di dukung oleh 4 (empat) program yaitu :

No	Program	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Pendidikan	147,505,671,548	128,525,224,236	18,980,447,312	APBD
2	Program Pengembangan Kurikulum	290,025,170	257,816,455	32,208,715	APBD
3	Program Pengembangan Kebudayaan	1,385,791,994	1,048,985,407	336,806,587	APBD
4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	375,281,487	365,094,377	10,187,110	APBD
	Jumlah	149,556,770,199	130,197,120,476	19,359,649,724	

Sasaran 8 : Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 8 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indek Daya Saing Daerah Bidang SDM.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2024.

Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2024 untuk indikator Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM dapat dilihat dari tabel di bawah ini

Tabel 2.55
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indek Daya Saing Daerah Bidang SDM Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indek Daya Saing Daerah BidangSDM	tanpa satuan	Tinggi (3,775)	Tinggi (3,770)*	99,87*

Catatan: *)Data Realisasi Tahun 2023

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional

Formulasi capaian indikator kinerja Indek Daya Saing Daerah Bidang SDM

Penilaian BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Indeks Daya Saing Daerah Bidang Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 adalah 3,776 dan terealisasi 3,770 dengan capaian indikator kinerja adalah 99,87%, yang merupakan realisasi 2023, karena sampai Laporan ini disusun BRIN belum merilis data 2024. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong Sangat Berhasil dengan predikat Sangat Baik.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktifitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. IDSD menjadi alat strategis untuk menilai keberhasilan suatu daerah agar dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing Nasional.

Kerangka pengukuran IDSD 2023 mengacu kepada global competitiveness

index (GCI) 2019 (WEF, 2019), yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi.

1. Lingkungan Pendukung

Komponen Lingkungan Pendukung meliputi empat pilar, yaitu institusi yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan aspek keamanan mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian daerah; infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah; adopsi TIK yang merupakan faktor determinan kemajuan Industri 4.0; dan stabilitas ekonomi makro yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja perekonomian, serta tingkat biaya hidup.

2. Sumber Daya Manusia

Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu kesehatan yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup dan keterampilan yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

3. Pasar

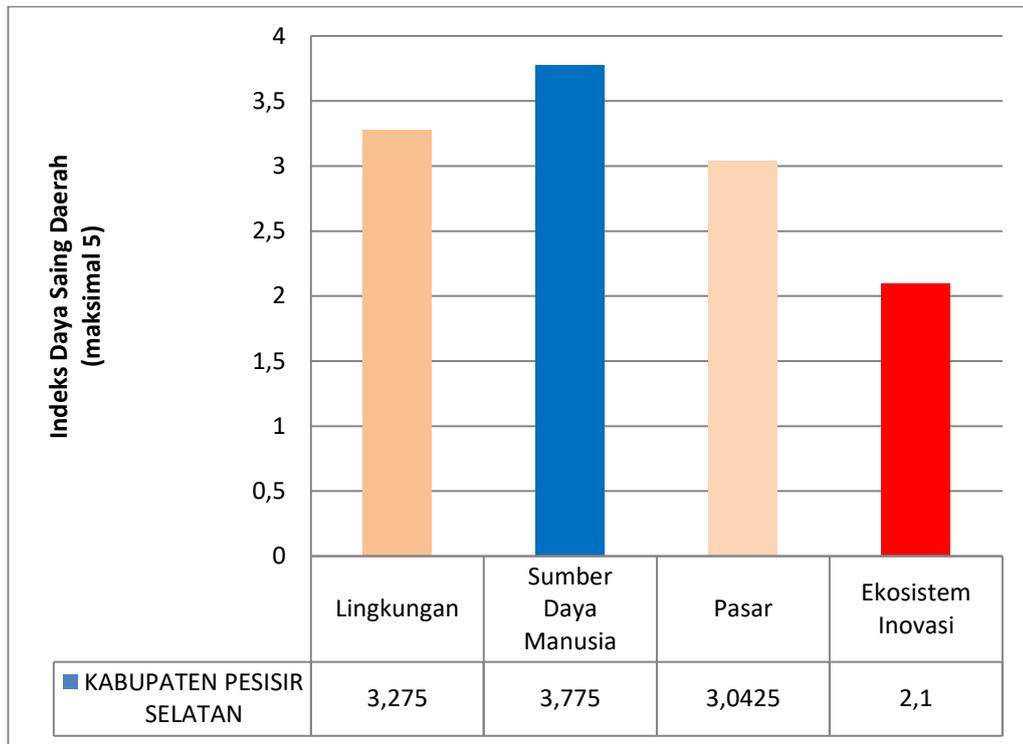
Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu pasar produk yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi; pasar tenaga kerja yang mampu menekan angka pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja; sistem keuangan yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan nonperbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian; dan ukuran pasar yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah hasil dari perkembangan iptek.

4. Ekosistem Inovasi

Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu dinamisme bisnis yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja, serta kapabilitas inovasi yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.

IDSD menjadi alat penting yang mampu memonitor dan mengevaluasi upaya pengoptimalan potensi tersebut secara komprehensif. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan IDSD tidak hanya untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai, tetapi juga untuk mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan itu sendiri. Singkatnya, dengan menggunakan IDSD sebagai rujukan, pemerintah daerah dapat memperbaiki kekurangan dan pada saat yang bersamaan, memperkuat keunggulan daya saing wilayahnya.

Gambar 2.11
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023
Menurut Komponen IDSD



Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu terwujudnya SDM yang beriman, kreatif dan berdaya saing adalah Indeks Daya Saing Daerah Bidang Sumber Daya Manusia. Pengukuran IDSD Bidang SDM menggunakan 2 pilar yaitu Kesehatan dan Keterampilan dengan 7 indikator sebagai berikut :

Tabel 2.56
Indikator Pilar Indeks Daya Saing Daerah Bidang Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2023*

No.	Pilar	Dimensi	Indikator	Nilai Indeks	Rata-Rata Nilai Indeks	IDSD Bidang SDM
1.	Kesehatan	Kesehatan	1. Angka Harapan Hidup	3,94	3,94	3,77*
2.	Keterampilan	Tenaga Kerja saat ini (Current workforce.)	1. Rata-rata tahun sekolah	2,84	3,61	
			2. Keterampilan lulusan	3,29		
			3. Kemudahan menemukan pekerja terampil	3,33		

	Tenaga kerja masa depan (Future workforce)	4. Angka harapan sekolah	3,82		
		5. Berpikir kritis dalam mengajar	3,79		
		6. Rasio murid-guru pendidikan dasar	4,57		

Sumber : Metadata Indikator IDSD Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 2023*

Dari data tersebut diatas, dapat dilihat bahwa capaian Indeks Daya Saing Daerah Bidang Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 didapat 3,77 dari skala 5. Data yang digunakan dalam perhitungan IDSD 2023 distandarisasi dengan rumus min-max sehingga didapat skor 0-5. Setiap pilar daya saing memiliki tingkat kepentingan yang sama sehingga diberikan

bobot yang sama dalam perhitungan skor Indeksnya. Jika dilihat dari capaian indikatornya skor yang tertinggi adalah Rasio murid terhadap guru dengan skor 4,57 sedangkan yang paling rendahnya adalah Rata-rata tahun sekolah dengan skor 2,84.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Berikut ini adalah perbandingan target dan dan realisasi Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM pada Tahun 2024 dengan tahun 2022 dan 2023

Tabel 2.57
Perbandingan Realisasi dan Capaian
Indikator Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM
Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM	Tanpa satuan	Tinggi (3,20)	Tinggi (3,35)	Tinggi (3,775)	Tinggi (3,55)	Tinggi (3,77)	Tinggi (3,77)*	110,93%	112,53%	99,87%*

Catatan: *)Data Realisasi Tahun 2023

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Indeks Daya Saing Daerah Bidang Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 adalah 3,775 dan terealisasi 3,770* dengan capaian indikator kinerja adalah 99,87%. yang merupakan capaian 2023 karena Data Tahun 2024 belum dirilis oleh BRIN. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong Sangat Berhasil dengan predikat Sangat Baik

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM Tahun 2022-2024 dengan Target Jangka Menengah.

Perbandingan Target pada RPJMD 2021-2026 dengan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Daya saing daerah Bidang SDM Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.58
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja
Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM Tahun 2022-2024 dengan Target
RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM	Tanpa satuan	Tinggi (3,20)	Tinggi (3,35)	Tinggi (3,50)	Tinggi (3,55)	Tinggi (3,77)	Tinggi (3,77)*

Catatan: *)Data Realisasi Tahun 2023

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Indeks Daya Saing Daerah Bidang Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 adalah 3,50 dan terealisasi 3,77 dengan capaian indikator kinerja adalah 99,87% yang merupakan capaian 2023 karena Data Tahun 2024 belum dirilis oleh BRIN. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong Sangat Berhasil dengan predikat Sangat Baik

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM Tahun 2024 dengan Target Target/Standar Nasional

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM Tahun 2024 tidak dibandingkan dengan dengan Target/Standar Nasional.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

Faktor Keberhasilan

Indeks Daya Saing Daerah Bidang SDM meliputi dua pilar, yaitu kesehatan yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup dan keterampilan yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Banyak faktor penentu mendorong produktivitas dan daya saing daerah, namun faktor yang menentukan keberhasilan capaian Indeks Daya Saing Daerah

Bidang Sumber Daya Manusia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas hidup masyarakat.
- b. Angkatan kerja dalam jumlah besar dan berkualitas
- c. Pelatihan dan pendidikan adalah cara yang paling baik dalam meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas.
- d. Sikap dan nilai yang dianut oleh tenaga kerja.
- e. Peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah

Faktor Penyebab Kegagalan

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan Indeks Daya Saing Daerah Bidang Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

- a. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima.
- b. Masih kurangnya kapasitas tenaga kesehatan seiring dengan dinamika masyarakat yang terus berkembang.
- c. Masih rendahnya rata-rata tahun sekolah, lebih fokus pada pencegahandropout atau kurang minatnya melanjutkan sekolah yang lebih tinggi
- d. Keterampilan masyarakat masih rendah, perlunya peningkatan pemerintah dalam memberikan kemampuan masyarakatnya dalam keterampilan lulusan sekolah termasuk keterampilan dalam teknologi digital.
- e. Kurangnya usaha dalam menyediakan tenaga kerja terampil, sehingga saat ini masih sulit ditemukan pekerja terampil, sehingga masih sering mendatangkan pekerja terampil dari luar daerah
- f. Dalam mengajar tenaga pendidik belum didorong untuk belajar kritis dan inovatif sehingga bisa berperan positif bagi dirinya sekligus anak didiknya.

Solusi.

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan Indeks Daya Saing Daerah Bidang Sumber Daya Manusia adalah:

- a. Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas seperti, Penyediaan akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, termasuk akses terhadap perawatan kesehatan primer, vaksinasi, perawatan maternal dan anak, dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.
- b. Meningkatkan Gizi dan Kualitas Hidup dengan cara Sosialisasi dan sentuhan bantuan langsung terhadap kesadaran akan pentingnya pola makan seimbang, akses terhadap makanan berkualitas, dan peningkatan
- c. gizi pada masa kanak-kanak dapat membantu mencegah berbagai penyakit terkait gizi dan meningkatkan kekebalan tubuh.
- d. Perbaiki Sanitasi dan Air Bersih. Perangkat daerah secara crosscutting melaksanakan program terhadap penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai

dan akses terhadap air bersih yang aman untuk dikonsumsi dapat mengurangi risiko terkena penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air dan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat.

- e. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal dengan membangun dan memperluas jaringan sekolah.
- f. Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan, bimbingan teknis dan lainnya;
- g. Meningkatkan kualifikasi guru dan tenaga pendidik. Program-program pendidikan non-formal juga dapat ditawarkan untuk mereka yang sudah tidak sekolah atau tidak memiliki akses ke pendidikan formal.
- h. Menyelenggarakan program pelatihan kerja dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan profesional masyarakat dalam bidang-bidang yang dibutuhkan oleh pasar kerja lokal dan regional. Pelatihan tersebut dapat mencakup keterampilan teknis seperti teknologi informasi, keahlian kerajinan, keterampilan pertanian, dan lain-lain.
- i. Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk menyelenggarakan program pelatihan dan magang kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal. Ini dapat membantu memastikan bahwa keterampilan yang dipelajari oleh masyarakat sesuai dengan permintaan pasar kerja.
- j. Mendirikan pusat-pusat keterampilan dan inovasi di daerah untuk memberikan akses terhadap pelatihan, sumber daya, dan fasilitas bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan baru dan mempromosikan inovasi.
- k. Mendorong literasi digital di kalangan masyarakat dengan menyelenggarakan pelatihan tentang penggunaan komputer, internet, dan teknologi informasi lainnya. Hal ini penting dalam menghadapi perkembangan teknologi yang terus berubah dan meningkatkan akses masyarakat terhadap kesempatan pendidikan dan pekerjaan
- l. Mendukung program pengembangan kewirausahaan untuk membantu masyarakat memulai usaha mereka sendiri. Ini dapat mencakup bantuan dalam perencanaan bisnis, akses ke modal usaha, pelatihan manajemen, dan dukungan lainnya untuk membangun dan mengembangkan bisnis lokal.

Optimalisasi pemanfaatan SDM dan anggaran.

SDM dan Anggaran untuk pembinaan dan upaya menaikkan daya saing daerah tidak diberikan secara khusus, pada salah satu OPD, akan tetapi menjadi kegiatan yang dilaksanakan di seluruh Perangkat Daerah, dan sifatnya optimalisasi dari anggaran dan SDM yang sudah ada pada Program kegiatan lainnya.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Pencapaian Indikator Indeks Daya Saing Daerah di Bidang Sumber Daya Manusia didukung oleh Program dan Kegiatan dilingkup urusan Penelitian dan Pengembangan Pada Program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.59
Program dan Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja Tahun 2024

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian (Rp.)
1.	Program: Penelitian dan Pengembangan Daeah Kegiatan: Pengembangan Inovasi dan Teknologi	30.073.787	21.383.600	71,10 %

Sumber: DPA Bapedalitbang Tahun 2024

Dalam DPA Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Program Penelitian dan Pengembangan Daerah di alokasi anggaran sebesar Rp. 30.073.787,- (tiga puluh juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) untuk pelaksanaan kegiatan Pengukuran Indeks Daya Saing Dearah, Indek Inovasi Daerah dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

Karena Pengukuran IDSD tahun 2023 menggunakan data sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) sebagai produsen data indikator daya saing, anggaran tersebut tidak terdistribusikan dalam bentuk pengukuran IDSD, tapi terdistribusi kedalam bentuk kegiatan yang telah dilakukan meliputi Pengukuran Indeks Inovasi Daerah dan Pengukuran Indeks pengelolaan Keuangan Daerah. Dari anggaran yang dialokasikan terealisasi sebesar Rp. 21.383.600,- (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) atau capaian 71,10 %, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi terdapat efesiensi anggaran sebesar Rp. 8.690.187,- (delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) atau sebesar 28,90 %

Penghargaan

Pencapaian IDSD bukan untuk mendapatkan hadiah, atau reward, akan tetapi sebagai upaya dari kalangan independen, ditugaskan oleh BRIN yang melakukan survei secara mandiri, dan tidak dilakukan dengan pemberitahuan kepada pemerintah daerah, akan tetapi menggunakan data-data yang berasal dari kementerian dan lembaga. Diharapkan Pemda dapat melakukan kebijakan pembangunan pada sektor-sektor yang mendapatkan nilai masih rendah sehingga dapat lebih meningkatkan lagi pencapaian IDSD.



Sasaran 9 : Terciptanya kondisi Masyarakat Pesisir Selatan yang Aman, Tentram dan Dinamis.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 9 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Kebahagiaan Masyarakat.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2024

Perbandingan antara target dan realisasi Indeks Kebahagiaan Masyarakat pada tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel 2.60 berikut ini:

Tabel 2.60
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kebahagiaan Masyarakat Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kebahagiaan Masyarakat	tanpa satuan	72,92	71,34	97,83

Catatan: *)Data Realisasi Tahun 2021

Sumber : Badan Pusat Statistik

Formulasi capaian indikator kinerja Indeks Kebahagiaan Masyarakat

Survey Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK)

Sumber data : Perbup Definisi operasional IKU Pemerintah Daerah

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Indeks Kebahagiaan Masyarakat pada tahun 2024 adalah 72,92 dan terealisasi 71,34 dengan capaian indikator kinerja adalah 97,83%. Berdasarkan klasifikasi

penilaian, indikator kinerja ini tergolong ***Sangat Berhasil*** dengan predikat ***Sangat Baik***.

Berdasarkan Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2024, metode penghitungan indeks kebahagiaan diukur dengan menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu, kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup. Pengukuran Indeks Kebahagiaan Masyarakat dilakukan oleh BPS pada tahun 2014, 2017 dan terakhir tahun 2021 yang digunakan sebagai ukuran pembangunan yang bersifat subjektif ditawarkan untuk melihat persepsi masyarakat tentang apa yang dirasakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Perbandingan target dan realisasi indikator Indeks Kebahagiaan Masyarakat pada tahun 2024 dengan tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel 2.61 di bawah ini.

Tabel 2.61
Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kebahagiaan Masyarakat Tahun 2022-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Kebahagiaan Masyarakat	Tanpa satuan	69,92	71,42	72,92	71,34	71,34	7,34	102,03	99,89	97,83

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, tidak ada kenaikan jumlah realisasi indeks kebahagiaan masyarakat dari Tahun 2022 ke Tahun 2024 memiliki nilai yang sama karena survei terakhir yang dilakukan BPS pada tahun 2021, untuk Capaian terjadi penurunan karena realisasi tetap dari tahun 2022 sampai 2024. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong *Sangat Berhasil* dengan predikat *Sangat Baik*.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Indeks Kebahagiaan Masyarakat 2022-2024 dengan Target Jangka Menengah.

Perbandingan Target pada RPJMD 2021-2026 dengan Realisasi Indikator Indeks Kebahagiaan Masyarakat Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.62
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kebahagiaan Masyarakat Tahun 2022-2024 dengan Target RPJMD

Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD			Realisasi Kinerja		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Indeks Kebahagiaan Masyarakat	Tanpa satuan	69,92	71,42	72,92	71,34*	71,34*	71,34*

Catatan: *)Data Realisasi Tahun 2021

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, tidak ada kenaikan jumlah realisasi indeks kebahagiaan masyarakat dari target yang ditetapkan dalam RPJMD dari Tahun 2022 ke Tahun 2024 memiliki nilai yang sama karena survei terakhir yang

dilakukan BPS pada tahun 2021. Berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong **Sangat Berhasil** dengan predikat **Sangat Baik**.

Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Indeks Kebahagiaan Masyarakat Tahun 2024 dengan Target Target/Standar Nasional.

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Indeks Kebahagiaan Masyarakat Tahun 2024 tidak dibandingkan dengan dengan Target/Standar Nasional, karena tidak merupakan merupakan target/standar Nasional.

Faktor Penyebab keberhasilan/kegagalan.

Faktor Keberhasilan.

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menciptakan lapangan usaha serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Melaksanakan program dan kegiatan yang bertujuan untuk melindungi kebutuhan dasar masyarakat di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan.
3. Meningkatkan hubungan kedekatan antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga masyarakat mudah menyampaikan aspirasinya.
4. Menciptakan kondisi lingkungan yang aman, tenteram dan dinamis.

Faktor Penyebab Kegagalan.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

1. Masih rendah nya penghasilan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
2. Akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan belum maksimal, karena masih terdapat masyarakat kurang mampu yang tidak ditanggung oleh BPJS APBD.
3. Keterbatasan sumber daya baik sumber daya manusia, teknologi maupun keuangan dalam mengintervensi kebijakan untuk meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat.

Solusi

Beberapa Upaya yang dilakukan untu meningkatkan Indeks Kebahagiaan Masyarakat Kabupaten Pesisir antara lain :

1. Pengembangan industri kecil dan menengah dengan kegiatan utama membina dan mengembangkan cabang industri dalam bentuk sentra.

2. Meningkatkan kualitas produk industri melalui peningkatan kompetensi SDM Industri Kecil menengah dan meningkatkan produk industri yang bersertifikasi dan berstandarisasi,
3. Meningkatkan kualitas produk industri melalui peningkatan kompetensi SDM Industri Kecil menengah dan meningkatkan produk industri yang bersertifikasi dan berstandarisasi.
4. Meningkatkan. Meningkatkan produksi komoditi pertanian, perkebunan dan hortikultura, serta komoditi hasil peternakan dan perikanan
5. Promosi pariwisata.
6. Meningkatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan.
7. Melakukan Sosialisasi Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
8. Menginformasikan keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PprPA) sebagai lembaga perlindungan perempuan dan anak.
9. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta asistensi.

Optimalisasi Pemanfaatan SDM dan Anggaran

Pagu Anggaran untuk mendukung Indikator kinerja Indeks Kebahagiaan Masyarakat sebesar Rp849,905.032,- dan terealisasi sebesar Rp831.956.566,- atau sebesar 97,89%. Persentase realisasi keuangan tidak mencapai 100%. Hal ini menunjukkan efisiensi anggaran sebesar Rp.17.984.466 atau 2,11%.

Program dan kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan target anggaran Rp819.905.712 dan realisasi sebesar Rp.802.179.766 atau capaian 97,84%.
2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan target anggaran Rp.29.999.320 dan realisasi sebesar Rp.29.776.800 atau capaian 99,26%.

Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, tercantum pada tabel 3.46 dibawah ini:

Tabel 2.63
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Rp 1.375.821.305.216	Rp 1.183.196.669.802	86 %
2.	Meningkatnya Kualitas hidup manusia dan masyarakat	Rp 11.427.097.160	Rp 9.741.195.853	85,25 %
3.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Rp 115.495.291.419	Rp105.491.665.912	91.34 %
4.	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Rp 15.388.254.351	Rp14.002.926.253	91 %
5.	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomisecara berkelanjutan	Rp 155.504.846.840	Rp 142.803.328.762	91,83 %
6.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bagi Kesejahteraan Masyarakat	Rp 7.503.542.950	Rp 6.976.4.76.303	92,98 %
7.	Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas	Rp 147.957.181.471	Rp 51.559.876.286	34,87 %
8.	Terwujudnya SDM yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing	Rp 10.440.818.515	Rp 10.104.221.248	96,78 %
9.	Terciptanya Kondisi Masyarakat Pesisir Selatanyang Aman, Tentram dan Dinamis	Rp 63.745.801.245	Rp 62.562.095.567	98,14 %
Jumlah		Rp. 1.903.284.139.167,00	Rp. 1.586.478.455.986,16	83,35 %

Sumber : Laporan Perkembangan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 untuk menunjang pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Revisi Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 sebesar Rp1.903.284.139.167,00,- terealisasi sebesar Rp1.586.478.455.986,16,- atau 83,35%. Artinya dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian 9 (sembilan) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar Rp316.805.683.180,84,- atau 16,65%.

- b. Sisa anggaran sebesar Rp316.805.683.180,84,- atau 16,65%, mencerminkan kurang akuratnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Seharusnya sisa anggaran ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BAB III

CAPAIAN KINERJA

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

3.1 Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuankan

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

3.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima Dari Pemerintahan Tingkat Di atasnya

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 mendapatkan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Tugas Pembantuan Provinsi lingkup Direktorat Jenderal Prasarana Sarana Pertanian sebesar Rp.6.888.452.000. dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.179.630.000 atau sebesar 89,71% Secara ringkas alokasi dan realisasi anggaran Tugas Pembantuan Provinsi. Kegiatan ini berupa pengadaan sarana dan prasarana penyediaan air yaitu 1) Irigasi perpipaan, 2) Irigasi perpompaan, dan 3) Optimasi lahan. Besaran pagu dan realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Alokasi anggaran dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2024

No	Satuan Kerja	Perangkat Daerah Pelaksana	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	(%)
1	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat (Satker 08)	Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan	6.888.452.000	6.179.630.000	89,71
Jumlah			6.888.452.000	6.179.630.000	89,71

Sumber: Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, tahun 2024

3.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Tingkat Di bawahnya

Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 tidak memberikan Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Tingkat Di bawahnya.

3.2 Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaiannya

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024, dapat teridentifikasi permasalahan yang dihadapi yaitu seringnya dilakukan revisi DIPA dan POK sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, setelah revisi DIPA dan POK telah di sahkan, sesegera mungkin didistribusikan ke Kabupaten/Kota.



BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

A. Jenis Pelayanan Dasar

Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah secara jelas mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemerintah daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

SPM Pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak. SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan

berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.

SPM Pendidikan daerah Kabupaten/Kota mencakup 3 (tiga) jenis pelayanan dasar:

1. Pendidikan Anak Usia Dini
Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Pendidikan Dasar
Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Pendidikan Dasar terdiri atas : Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama
3. Pendidikan Kesetaraan
Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

B. Target Pencapaian SPM

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan. Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai SPM Pendidikan selama kurun waktu tertentu bisa dilihat pada Tabel berikut:

NO	Kelompok Usia	Capaian (%)	Target (%)		
		2021	2022	2023	2024
1	4 tahun				
2	5-6 tahun	93,51%	100%	100%	100%
3	7-12 tahun	89,49%	100%	100%	100%
4	13-15 Tahun	91,32%	100%	100%	100%

Sumber : <https://dss.datadik.kemendikbud.go.id/>

C. Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan bersumber dari APBD, APBN dan sumber lain yang sah tahun 2024 yaitu pemberian Beasiswa bagi peserta didik miskin yaitu:

1. Beasiswa PIP SD sebesar Rp. 5.445.000.000,- bersumber dari APBN.

2. Beasiswa PIP SMP sebesar Rp7.377.750.000,- bersumber dari APBN.
3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SD Sebesar Rp 7.124.007.532,- bersumber dari APBD
4. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SMP Sebesar Rp9.167.042.773,- bersumber dari APBD

D. Dukungan Personil

Personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM ini terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan penyelenggaraan tugas perbantuan, pejabat dan staf di Bidang PAUDNI, Pembinaan SD, Pembinaan SMP, dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

E. Hasil Capaian

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan:

- 1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini dilakukan dengan cara:
 - Menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - Menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini; dan
 - Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- 2) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah dasar dilakukan dengan cara:
 - Menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas);
 - Menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar; dan
 - Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- 3) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah pertama dilakukan dengan cara:
 - Menghitung jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
 - Menghitung jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama; dan
 - Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- 4) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan dilakukan dengan cara:
 - Menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas);
 - Menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan; dan
 - Menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam Huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

No	Kelompok Usia	Jumlah Anak	Sedang Bersekolah						Jumlah	Capaian
			TK/RA/ Sederajat	SD/MI/ Sederajat	SMP/MT s/ Sederajat	SMA/ SMK/MA / Sederajat	SLB	Kesetaraan		
1	5-6 Tahun	18.531	12.470		-				12.470	67,78%
2	7-12 Tahun	57.411		57.904					57.904	100%
3	13-15 Tahun	29.970	-	1.509	24.264				25.773	86,25%
4	16-18 Tahun	22.539	-	57	1.352				1.409	6%
	Capaian	128.451	12.470	59.470	25.616	-	-	-	97.556	75,83%

Sumber : <https://datadik.kemendikbud.go.id/>

Pendidikan Usia Dini

KABUPATEN/KOTA : KAB. PESISIR SELATAN

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		TUNTAS MADYA			81.43 %
1.	Pendidikan Anak Usia Dini					71.25 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	54.73 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	16548	12689	5859	68.41 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	16.52 %
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					82.60 %
	1. Angka partisipasi sekolah	%	100	74.37	25.6300	74.37 %
	2. Angka partisipasi murni	%	90	89.7	0.3000	99.67 %
	3. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	44.71	42.09	2.6200	94.14 %
	4. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	82.83	78.28	4.5500	94.51 %
	5. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	1.00	0.41	0.5900	41.00 %
	6. Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	0.0000	100.00 %
	7. Indeks distribusi guru	%	1.00	0.69	0.3100	69.00 %
	8. Proporsi PTK bersertifikat	%	35.00	24.76	10.2400	70.74 %
	9. Proporsi PTK penggerak*	%	2.00	2.79	-0.7900	100.00 %

Pendidikan Dasar

Pendidikan Dasar					83.59 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					(80%) 65.25 %
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		Orang	88023	71797	16226 81.57 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					(20%) 18.33 %
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					91.67 %
SD					93.95 %
1 . Angka partisipasi kasar	%	110	100.79	9.2100	91.63 %
2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	96.93	3.0700	96.93 %
3 . Kemampuan literasi	Nilai	51.21	70.62	-19.4100	100.00 %
4 . Kemampuan numerasi	Nilai	38.56	65.64	-27.0800	100.00 %
5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	5	19.41	-14.4100	100.00 %
6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	3	27.08	-24.0800	100.00 %
7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	70.45	68.43	2.0200	97.13 %
8 . Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	70.80	69.93	0.8700	98.77 %
9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60.03	52.61	7.4200	87.64 %
10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	50	50.0000	50.00 %
11 . Indeks distribusi guru	%	1	1	0.0000	100.00 %
12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	23.00	22.83	0.1700	99.26 %
13 . Proporsi PTK penggerak*	%	1	1	0.0000	100.00 %

Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan Kesetaraan					89.47 %
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					(80%) 70.39 %
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		Orang	7289	6413	876 87.98 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					(20%) 19.08 %
		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					95.41 %
1 . Angka partisipasi kasar	%	44.50	44.01	0.4900	98.90 %
2 . Angka partisipasi sekolah	%	50.00	30.63	19.3700	61.26 %
3 . Kemampuan literasi	Nilai	50	46	4.0000	92.00 %
4 . Kemampuan numerasi	Nilai	49	48.15	0.8500	98.27 %
5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	1	2.46	-1.4600	100.00 %
6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	4.50	4.39	0.1100	97.56 %
7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	62	60.59	1.4100	97.73 %
8 . Indeks iklim kebhinnekaan	Nilai	60	57.65	2.3500	96.08 %
9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	52.00	51.23	0.7700	98.52 %
10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0.0000	100.00 %
11 . Indeks distribusi guru	%	0	0	0.0000	100.00 %
12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0.0000	100.00 %
13 . Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0.0000	100.00 %

F. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ada dalam upaya pencapaian SPM Pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah belum maksimalnya alokasi anggaran dalam upaya penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan. Hal ini dikarenakan SPM Pendidikan yang diatur



dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ditetapkan pada tahun 2018, sementara Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan pada tahun 2021. **Solusinya** adalah pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan sebagai prioritas belanja daerah ditetapkan dalam Renstra yang baru pada tahun 2021-2026.

Adapun kendala dan permasalahan dalam upaya pencapaian

1. Kualitas data pokok pendidikan masih rendah
2. Pendistribusian tenaga pendidik belum merata
3. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan masih rendah
4. Pembinaan peserta didik dan tenaga pendidikan berprestasi belum optimal
5. Perencanaan dan penganggaran yang belum sepenuhnya menggunakan data rapor pendidikan
6. Masih ada 22 Nagari yang belum memiliki PAUD
7. Persentasi Akreditasi A Satuan Pendidikan masih rendah

2. BIDANG URUSAN KESEHATAN

A. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Kabupaten/Kota mencakup 12 (dua belas) jenis pelayanan dasar, yaitu:

a. Pelayanan Kesehatan ibu hamil

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan ibu hamil kepada semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu kehamilan.

Standar pelayanan ibu hamil terdiri dari 2 yaitu standar kualitas dan standar kuantitas. Standar kualitas adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal 4 (empat) kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan Kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Standar kuantitas adalah pelayanan yang meliputi 10 T yaitu: Pengukuran BB, Pengukuran TB, Pengukuran LILA, Pengukuran TFU, Penentuan DJJ, Pemberian Imunisasi, Pemberian Tablet FE, Tes Laboratorium, Tatalaksana kasus dan temu wicara.

b. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin kepada semua ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh minimal 2 orang yaitu: Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan Kesehatan Pemerintah maupun swasta yang

memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. Fasilitas pelayanan Kesehatan meliputi Puskesmas, Rumah Sakit pemerintah maupun swasta, dan Klinik bersalin. Pustu dan Poskesri dapat dikatakan standar jika pemerintah dapat menjamin ketersediaan alat sesuai standar.

c. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir.

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir kepada semua bayi di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Standar pelayanan bayi baru lahir meliputi Standar kuantitas, yaitu kunjungan neonatal 1 (KN1) 6-48 Jam, Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3-7 hari, dan Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8-28 hari.

Sedangkan standar kualitas meliputi:

- Pelayanan Neonatal 0-6 jam
 - a. Pemotongan tali pusat
 - b. IMD
 - c. Vit K1
 - d. Pemberian salep mata
 - e. Injeksi HB0
- Pelayanan Neonatal 6 jam-28 hari
 - a. Konseling perawatan BBL dan ASI eksklusif
 - b. MTBM
 - c. Vit K bagi yang belum
 - d. Imunisasi HB0 untuk usia < 24 jam
 - e. Penanganan rujukan bagi kasus neonatal dan komplikasi

d. Pelayanan Kesehatan balita

Setiap balita mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan Kesehatan anak balita kepada semua balita di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada anak usia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Registrer (STR) yang diberikan di fasilitas Kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM.

Pelayanan Kesehatan meliputi:

- Pelayanan Kesehatan 0-11 bulan
 - a. Penimbangan minimal 8 x setahun
 - b. Pengukuran TB minimal 2 x setahun
 - c. Pemantauan perkembangan minimal 2 x setahun
 - d. Pemberian kapsul Vit A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun
 - e. IDL
- Pelayanan Kesehatan 12-23 bulan

- a. Penimbangan minimal 8 x setahun
 - b. Pengukuran TB minimal 2 x setahun
 - c. Pemantauan perkembangan minimal 2 x setahun
 - d. Pemberian kapsul Vit A dalam 2 x setahun
 - e. Pemberian IDL lanjutan
 - Pelayanan Kesehatan balita usia 24-59 bulan
 - a. Penimbangan minimal 8 x setahun
 - b. Pengukuran TB 2 x setahun
 - c. Pemantauan perkembangan minimal 2 x setahun
 - d. Pemberian kapsul Vit A sebanyak 2 x setahun
 - Pemantauan perkembangan balita
 - Pemantauan kapsul Vit A
 - IDL
 - Imunisasi lanjutan
 - Pengukuran BB dan TB
 - Edukasi dan informasi
- e. Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar.
- Setiap anak pada usia Pendidikan dasar mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan penjarangan Kesehatan kepada anak usia Pendidikan dasar di wilayah Kabupaten/Kota tersebut pada usia 7 s.d 15 Tahun yang dilakukan oleh Puskesmas.
- Standar pelayanan Kesehatan meliputi:
- a. Pengukuran TB, BB dan lingkar perut
 - b. Pemeriksaan TD
 - c. Pemeriksaan gula darah
 - d. Anamnesa perilaku beresiko
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif.
- Setiap warga negara Indonesia usia 15-59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining Kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
- Pelayanan skrining Kesehatan usia 15-59 tahun, meliputi:
- e. Pengukuran TB, BB dan lingkar perut
 - f. Pengukuran TD
 - g. Pemeriksaan gula darah
 - h. Anamnesa perilaku beresiko
- g. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut
- Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining Kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan skrining Kesehatan minimal dilakukan sekali setahun. Skrining kesehatan sesuai standar meliputi:
- a. Pengukuran TB, BB, dan lingkar perut
 - b. Pengukuran TD

- c. Pemeriksaan gula darah
- d. Pemeriksaan gangguan mental
- e. Pemeriksaan gangguan kognitif
- f. Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
- g. Anamnesa perilaku beresiko

h. Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Sasaran adalah penduduk usia 15 tahu ke atas. Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan Kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi Kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Penderita hipertensi tanpa komplikasi (Jantung, Stroke, Diabetes Mellitus dan Gagala ginjal kronis) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk menangani komplikasi.

Pelayanan Kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi:

- a. Pengukuran TD dilakukan minimal 1 kali sebulan di fasyankes
 - b. Edukasi perubahan gaya hidup dan kepatuhan minum obat
 - c. Rujukan bila diperlukan
- i. Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus

Setiap penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes mellitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Sasaran indicator ini adalah penyandang DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotive dan preventif di FKTP. Penduduk yang ditemukan penderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas Kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.

Pelayanan Kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi:

- a. Pengukuran gula darah
 - b. Edukasi
 - c. Terapi farmakologi
- j. Pelayanan Kesehatan pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar. Pelayanan Kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah:

- a. Pelayanan promotive preventif yang bertujuan meningkatkan Kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasangan.
- b. Pelayanan Kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter puskesmas di wilayah kerjanya.

Pelayanan Kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi:

- a. Pemeriksaan status mental
- b. Wawancara

k. Pelayanan Kesehatan pada orang dengan TB

Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan Kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya. Pelayanan Tuberkulosis sesuai standar adalah pelayanan Kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta. Pelayanan yang diberikan sesuai Pedoman Penanggulangan TB yang berlaku antara lain:

- a. Penegakan diagnosis TB dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta dapat di dukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya.
- b. Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan.
- c. Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar.

Gejala utama TB adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa aktivitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan. Kegiatan promotive dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian factor risiko dan pemberian obat pencegahan. Prinsip pelayanan TB adalah penemuan orang dengan TB sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau “TOSS TB” (Temukan, Obati sampai sembuh).

Pemeriksaan pelayanan Kesehatan TB sesuai standar meliputi:

- a. Pemeriksaan anamnesia pertama yaitu dari pemeriksaan fisik sampai ke Pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh dokter atau perawat poli di Puskesmas atau rumah sakit
- b. Pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan laboratorium menggunakan TCM (Tes Cepat Molekuler) atau menggunakan mikroskopis di Puskesmas dan Rumah sakit
- c. Pemeriksaan klinis menggunakan rontgent/torax dilakukan di rumah sakit

l. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna Napza, dan warga binaan Lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna Napza, dan warga binaan Lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga Kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika.

Pelayanan Kesehatan meliputi:

- a. Pemberian informasi terkait HIV-AIDS

- b. Pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang ditetapkan
- c. Orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif harus dirujuk ke fasilitas mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV dan konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya.
- d. Orang dengan infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna Napza, dan warga binaan Lembaga permasyarakatan dengan hasil pemeriksaan HIV negative harus dilakukan pemeriksaan ulang minimal setelah 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dari pemeriksaan yang pertama.

B. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Capaian Pelaksanaan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2024:

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N)			PENDANAAN (TAHUN N)			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	641	641	100	716.900.803	678.442.700	94,64	DAU + DAK Non Fisik
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	636	636	100	36.095.540	302.109.050	83,7	DAU + DAK Non Fisik
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	602	602	100	33.622.612	27.738.800	82,5	DAU
4	Pelayanan Kesehatan Balita	2.805	2.805	100	275.590.050	247.731.700	89,89	DAU + DAK Non Fisik
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	4.622	4.018	87	942.111.500	865.998.000	91,92	DAU + DAK Non Fisik
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	8.410	8.410	100	212.958.970	169.345.042	79,52	DAU + DAK Non Fisik
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	3.743	3.080	82	12.020.802	8.373.600	69,66	DAU
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.627	1.627	100	88.605.730	78.320.000	88,39	DAU
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	4.429	4.429	100	581.360.749	531.116.200	91,36	DAU + DAK Non Fisik
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1.064	1.064	100	82.396.418	74.307.228	90,18	DAU
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	420	420	100	139.701.643	102.698.750	73,51	DAU + DAK Non Fisik
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	345	345	100	48.580.000	27.480.000	56,57	DAU

C. Anggaran

NO	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	716.900.803	DAU + DAK Non Fisik
2	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	360.95.540	DAU + DAK Non Fisik
3	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	33.622.612	DAU
4	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Balita	275.590.050	DAU + DAK Non Fisik
5	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	942.111.500	DAU + DAK Non Fisik
6	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	212.958.970	DAU + DAK Non Fisik
7	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	12.020.802	DAU
8	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	88.605.730	DAU
9	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	581.360.749	DAU + DAK Non Fisik
10	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	82.396.418	DAU
11	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	139.701.643	DAU + DAK Non Fisik
12	Pemenuhan Upa ya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	48.580.000	DAU

D. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam pelaksanaan SPM di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024.

Tabel Rekapitulasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Sumber Daya Manusia Kesehatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2024

NO	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS	KETERSEDIAAN
1	2	3	4	5	6
	Koto XI Tarusan	Puskesmas Barung-Barung Belantai	1	Medis	3
				Psikologis Klinis	0
				Keperawatan	13
				Kebidanan	25
				Kefarmasian	1
				Kesehatan Masyarakat	4
				Kesehatan Lingkungan	2
				Gizi	3
				Keterapian Fisik	0
				Keteknisan Medis	5
				Keteknisan Biomedika	0
				Kesehatan Tradisional	0
		Puskesmas Tarusan	1	Medis	3
				Psikologis Klinis	0
				Keperawatan	15
				Kebidanan	30
				Kefarmasian	3
				Kesehatan Masyarakat	4
				Kesehatan Lingkungan	1
				Gizi	3
				Keterapian Fisik	3
				Keteknisan Medis	5
				Keteknisan Biomedika	1
				Kesehatan Tradisional	0
	Bayang	Puskesmas Pasar Baru	1	Medis	3
				Psikologis Klinis	0
				Keperawatan	15
				Kebidanan	30
				Kefarmasian	2
				Kesehatan Masyarakat	4
				Kesehatan Lingkungan	4
				Gizi	2
				Keterapian Fisik	1
				Keteknisan Medis	4
				Keteknisan Biomedika	0
				Kesehatan Tradisional	0
		Puskesmas Koto Perapak	1	Medis	4
				Psikologis Klinis	0
				Keperawatan	13
				Kebidanan	21
				Kefarmasian	4
				Kesehatan Masyarakat	4
				Kesehatan Lingkungan	2
				Gizi	2
				Keterapian Fisik	1
				Keteknisan Medis	2
				Keteknisan Biomedika	0
				Kesehatan Tradisional	0

Bayang Utara	Puskesmas Asam Kumbang	1	Medis	4
			Psikologis Klinis	0
			Keperawatan	12
			Kebidanan	23
			Kefarmasian	2
			Kesehatan Masyarakat	3
			Kesehatan Lingkungan	2
			Gizi	2
			Keterapian Fisik	1
			Keteknisan Medis	0
			Keteknisan Biomedika	0
Kesehatan Tradisional	0			
IV Jurai	Puskesmas Salido	1	Medis	7
			Psikologis Klinis	0
			Keperawatan	19
			Kebidanan	36
			Kefarmasian	2
			Kesehatan Masyarakat	5
			Kesehatan Lingkungan	3
			Gizi	2
			Keterapian Fisik	2
			Keteknisan Medis	6
			Keteknisan Biomedika	1
Kesehatan Tradisional	0			
	Puskesmas Lumpo	1	Medis	3
			Psikologis Klinis	0
			Keperawatan	12
			Kebidanan	11
			Kefarmasian	2
			Kesehatan Masyarakat	3
			Kesehatan Lingkungan	2
			Gizi	2
			Keterapian Fisik	0
			Keteknisan Medis	3
			Keteknisan Biomedika	1
Kesehatan Tradisional	0			
Batang kapas	Puskesmas Pasar Kuok	1	Medis	4
			Psikologis Klinis	0
			Keperawatan	11
			Kebidanan	15
			Kefarmasian	4
			Kesehatan Masyarakat	3
			Kesehatan Lingkungan	2
			Gizi	2
			Keterapian Fisik	1
			Keteknisan Medis	1
			Keteknisan Biomedika	0
Kesehatan Tradisional	0			
	Puskesmas IV Koto Mudik	1	Medis	4
			Psikologis Klinis	0
			Keperawatan	15
			Kebidanan	28
			Kefarmasian	2
			Kesehatan Masyarakat	4
			Kesehatan Lingkungan	0
			Gizi	2
			Keterapian Fisik	1
			Keteknisan Medis	2
			Keteknisan Biomedika	1
Kesehatan Tradisional	0			

Sutera	Puskesmas Surantih	1	Medis	5
			Psikologis Klinis	0
			Keperawatan	34
			Kebidanan	36
			Kefarmasian	4
			Kesehatan Masyarakat	5
			Kesehatan Lingkungan	1
			Gizi	2
			Keterampilan Fisik	0
			Keteknisan Medis	7
			Keteknisan Biomedika	0
			Kesehatan Tradisional	0
				Puskesmas Kayu Gadang
Psikologis Klinis	0			
Keperawatan	15			
Kebidanan	28			
Kefarmasian	3			
Kesehatan Masyarakat	1			
Kesehatan Lingkungan	0			
Gizi	0			
Keterampilan Fisik	0			
Keteknisan Medis	3			
Keteknisan Biomedika	0			
Kesehatan Tradisional	0			
Lengayang	Puskesmas Kambang	1		
			Psikologis Klinis	0
			Keperawatan	17
			Kebidanan	26
			Kefarmasian	2
			Kesehatan Masyarakat	9
			Kesehatan Lingkungan	1
			Gizi	3
			Keterampilan Fisik	0
			Keteknisan Medis	7
			Keteknisan Biomedika	1
			Kesehatan Tradisional	0
				Puskesmas Koto Baru
Psikologis Klinis	0			
Keperawatan	25			
Kebidanan	40			
Kefarmasian	2			
Kesehatan Masyarakat	5			
Kesehatan Lingkungan	0			
Gizi	2			
Keterampilan Fisik	0			
Keteknisan Medis	1			
Keteknisan Biomedika	0			
Kesehatan Tradisional	0			
Ranah Pesisir	Puskesmas Balai Selasa	1		
			Psikologis Klinis	0
			Keperawatan	23
			Kebidanan	39
			Kefarmasian	2
			Kesehatan Masyarakat	5
			Kesehatan Lingkungan	0
			Gizi	2
			Keterampilan Fisik	0
			Keteknisan Medis	4
			Keteknisan Biomedika	0
			Kesehatan Tradisional	0

Linggo Sari Baganti	Puskesmas Air Haji	1	Medis	3
			Psikologis Klinis	0
			Keperawatan	16
			Kebidanan	41
			Kefarmasian	5
			Kesehatan Masyarakat	5
			Kesehatan Lingkungan	1
			Gizi	2
			Keterampilan Fisik	1
			Keteknisan Medis	5
			Keteknisan Biomedika	1
			Kesehatan Tradisional	0
Airpura	Puskesmas Airpura	1	Medis	2
			Psikologis Klinis	0
			Keperawatan	11
			Kebidanan	25
			Kefarmasian	3
			Kesehatan Masyarakat	3
			Kesehatan Lingkungan	2
			Gizi	3
			Keterampilan Fisik	0
			Keteknisan Medis	2
			Keteknisan Biomedika	0
			Kesehatan Tradisional	0
Inderapura	Puskesmas Inderapura	1	Medis	4
			Psikologis Klinis	0
			Keperawatan	12
			Kebidanan	35
			Kefarmasian	5
			Kesehatan Masyarakat	4
			Kesehatan Lingkungan	2
			Gizi	3
			Keterampilan Fisik	0
			Keteknisan Medis	2
			Keteknisan Biomedika	0
			Kesehatan Tradisional	0
Ranah Ampek Hulu	Puskesmas Ranah Ampek Hulu	1	Medis	1
			Psikologis Klinis	0
			Keperawatan	8
			Kebidanan	20
			Kefarmasian	2
			Kesehatan Masyarakat	4
			Kesehatan Lingkungan	2
			Gizi	2
			Keterampilan Fisik	0
			Keteknisan Medis	3
			Keteknisan Biomedika	0
			Kesehatan Tradisional	0

Basa Ampek Balai	Puskesmas Tapan	1	Medis	4
			Psikologis Klinis	0
			Keperawatan	12
			Kebidanan	19
			Kefarmasian	3
			Kesehatan Masyarakat	5
			Kesehatan Lingkungan	0
			Gizi	2
			Keterapian Fisik	0
			Keteknisan Medis	4
			Keteknisan Biomedika	0
			Kesehatan Tradisional	0
Lunang	Puskesmas Tanjung Beringin	1	Medis	2
			Psikologis Klinis	0
			Keperawatan	14
			Kebidanan	21
			Kefarmasian	2
			Kesehatan Masyarakat	4
			Kesehatan Lingkungan	0
			Gizi	1
			Keterapian Fisik	3
			Keteknisan Medis	3
			Keteknisan Biomedika	0
			Kesehatan Tradisional	0
Silaut	Puskesmas Tanjung Makmur	1	Medis	2
			Psikologis Klinis	0
			Keperawatan	15
			Kebidanan	21
			Kefarmasian	2
			Kesehatan Masyarakat	4
			Kesehatan Lingkungan	0
			Gizi	2
			Keterapian Fisik	1
			Keteknisan Medis	4
			Keteknisan Biomedika	1
			Kesehatan Tradisional	0

E. Hasil Capaian

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2024

1	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
2	3	4	5	9	10	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	641	641	100	97.95%	Tuntas Utama
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	636	636	100	97.95%	Tuntas Utama
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	602	602	100	97.95%	Tuntas Utama
4	Pelayanan Kesehatan Balita	2.805	2.805	100	97.95%	Tuntas Utama
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	4.622	4.018	87	97.95%	Tuntas Utama
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	8.410	8.410	100	97.95%	Tuntas Utama
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	3.743	3.080	82	97.95%	Tuntas Utama
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.627	1.627	100	97.95%	Tuntas Utama
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	4.429	4.429	100	97.95%	Tuntas Utama
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1.064	1.064	100	97.95%	Tuntas Utama
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	420	420	100	97.95%	Tuntas Utama
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	345	345	100	97.95%	Tuntas Utama

F. Permasalahan dan Solusi

F.1 Permasalahan

Dalam pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 memiliki beberapa kendala, diantaranya :

1. Perhitungan kebutuhan SDM masih berdasarkan rasio jumlah tenaga dan jumlah penduduk secara umum tidak berdasarkan jumlah penduduk yang kemungkinan terpapar dan mempertimbangkan jenis pelayanan yang diberikan.
2. Penginputan pada aplikasi e-SPM Kementerian Bangda pada evaluasi SPM Kabupaten/ Kota masih belum tepat waktu dikarenakan keterlambatan pengumpulan data dari pengelola program.
3. Sistem pencatatan dan pelaporan capaian indikator SPM di Puskesmas sebagian masih dilaksanakan secara manual sehingga proses pengumpulan data dan pengisian laporan online yang ditetapkan oleh Kemendagri pengisiannya belum lengkap.

4. Sasaran dinas kesehatan masih menggunakan pusat data dan informasi (Pusdatin) kemenkes, dimana jumlah penduduk data tersebut lebih tinggi dari jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan.

F.2 Solusi

Solusi yang dapat dilakukan upaya mengatasi hambatan diatas diantaranya harus ada data real penduduk miskin untuk target capaian SPM yang di tanda tangani oleh kepala daerah.

3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah.

Berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018, jenis Standard Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kota yaitu :

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Urusan Jalan
2. Penataan Bangunan Gedung
3. Penataan Bangunan dan lingkungannya
4. Sistem Penyediaan Air Minum
5. Sistem Pengelolaan Air Limbah dan Drainase Lingkungan serta Persampahan
6. Pembinaan Jasa Konstruksi
7. Operasional Kebersihan dan Pertamanan

Sistem Penyediaan Air Minum dan Sistem Pengelolaan Air Limbah merupakan kewajiban Dinas PUTR untuk pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2024.

B. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

Target pencapaian SPM adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan.

- Target pencapaian SPM pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari - hari 120 Sambungan Rumah;
- Target pencapaian SPM yang ditetapkan untuk penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sebanyak 56 Sambungan Rumah.

C. Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

Jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk pencapaian SPM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 adalah :

- Anggaran untuk pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebesar **Rp. 3.495.650.000,-**
- Anggaran untuk penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sebesar **Rp. 2.762.000.000,-**

D. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

Untuk pencapaian target SPM, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung oleh personil pada Bidang Cipta Karya bagian Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

E. Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerimaan layanan.

Hasil Capaian SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah baik dari segi anggaran maupun dari penerimaan layanan.

Hasil capaian SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

- Jenis pelayanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, capaian SPM 100 % dengan jumlah penerima layanan 120 Sambungan Rumah dan realisasi anggaran 97,06 % sebesar **Rp. 3.393.053.295,- (anggaran fisik 100 %);**
- Jenis pelayanan pemenuhan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, capaian SPM 100 % dengan jumlah penerimaan layanan 56 Sambungan Rumah dan realisasi anggaran 67,80 % sebesar **Rp. 1.872.623.297,- (anggaran fisik 100%)**

F. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

- **Permasalahan**

Selama pelaksanaan kegiatan dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum tahun 2024 tidak mengalami permasalahan. Permasalahan yang dihadapi sulitnya meningkatkan target dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang meliputi masalah eksternal maupun internal.

Adapun masalah dan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan target penerapan dan pencapaian SPM adalah :

1. **Masih terbatasnya kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan tercapainya pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.**
2. **Keterbatasan ketersediaan data dan informasi pendukung.**
Ketersediaan data dan informasi yang cukup terbatas dan kurang valid, sangat berdampak terhadap implementasi capaian target penerapan indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Data dan informasi yang digunakan akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam penetapan target sasaran dan tujuan dari masing-masing indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang ada.
3. **Keterbatasan alokasi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung capaian target penerapan indikator SPM.**
Belum ada alokasi dana yang dianggarkan khusus untuk percepatan SPM, anggaran tersebut masih bersifat menyebar dan tergabung dalam kegiatan lain. Pemerintah daerah masih tergantung dengan bantuan dana APBD Provinsi dan APBN..
4. **Permasalahan lain yang menjadi kendala dalam pencapaian target SPM**
Indikator yang ada tidak sesuai dengan kondisi objektif di daerah, petugas pengampu SPM dari masing-masing SKPD sering berganti-ganti sehingga mengalami kesulitan dalam pemberian pemahaman untuk penerapan dan percepatan SPM.

- **Solusi Permasalahan**

Untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan dan mencapai target penerapan indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, yaitu :

1. Melengkapi dan menyempurnakan ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam mencapai target penerapan indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Mengusulkan ketersediaan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target penerapan indikator SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan, APBD Propinsi Sumatera Barat, APBN maupun sumber-sumber pendanaan lainnya;
3. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi pencapaian target SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN

A. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan uraian Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 dapat kita pahami bahwa Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal untuk bidang perumahan rakyat, yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi/kabupaten kota; fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten Kota.

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di Bidang Perumahan Rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam Pasal 3 (ayat 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Minimal, ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis sebagaimana dimaksud yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara teknis berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

- Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
- Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
- Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
- Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Standar pelayanan minimal berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 yaitu Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat. Adapun jenis-jenis pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat Berdasarkan seperti pada tabel berikut:

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) URUSAN BIDANG PERUMAHAN
RAKYAT BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2021**

No	Jenis pelayanan Dasar	Indikator pencapaian	Target Pencapaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%	Setiap Tahun

Standar pelayanan minimal yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan didasarkan pada jenis-jenis pelayanan dasar Sub Bidang Perumahan Rakyat. Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara teknis berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut:

a. Jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota

1. Pengertian

- a) Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah.
- b) Pembangunan baru dalam kegiatan ini merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana.
- c) Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak berat dengan membangunkan rumah baru yang berada pada lokasi yang sama.
- d) Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang.
- e) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dalam hal ini merupakan kegiatan memfasilitasi rumah tangga yang tinggal di rumah sewa yang rusak karena bencana, difasilitasi ke rumah susun sewa atau rumah sewa umum layak huni yang ada

2. Jenis Pelayanan

Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- a) Pada saat masa pasca bencana;
- b) Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
- c) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.

3. Mutu Pelayanan

Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, baik bencana provinsi Laporan Tahunan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 maupun kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

- a) Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100$$

Keterangan :

1. Pembilang Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n
 2. Penyebut Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n
 3. Ukuran/ Konstanta Persen (%)
- b) Kualitas Barang/Jasa Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:
- 1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
 - 2) Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya.
 - 3) memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
 - 4) Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m² dan luas tanah minimal 60 m².
 - 5) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah

layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.

- c) Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
 - 2) Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;
 - 3) Memenuhi kecukupan luas minimal 9 m²/orang.

4. Penerima Layanan

Penerima pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yaitu setiap rumahtangga korban bencana yang rumahnya terkena bencana alam, dengan kriteria sebagai berikut: a) Penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan UMP dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah; b) Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan; c) Tidak memiliki asset bangunan lain; d) Terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum.

b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kab/Kota.

1. Pengertian

- a) Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” antara lain sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer.
- b) Relokasi perumahan daerah rawan bencana dalam hal ini dapat dilakukan apabila ada Surat Penetapan Bupati/Walikota bahwa daerah tersebut tidak layak untuk perumahan.
- c) Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- d) Rumah khusus adalah rumah yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- e) Penyediaan rumah khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan/atau rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.
- f) Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
- g) Subsidi uang sewa merupakan bantuan uang sewa rumah layak huni yang diberikan kepada masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

2. Jenis Pelayanan

- a) Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang

Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dalam pelaksanaan program :

- 1) Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
- 2) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; dan/atau
- 3) Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses.

b) Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung:

- 1) Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
- 2) Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada dilahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

3. Mutu Pelayanan

Mutu pelayanan dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

a) Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan. Adapun cara Perhitungan Capaian SPM Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi program pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah:

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan} + \text{Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa} + \text{Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100\%$$

Keterangan:

- (a) Pembilang Jumlah total penerima pelayanan:
 - (1) Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan.
 - (2) Subsidi Uang Sewa (khusus Kabupaten/Kota).
 - (3) Penyediaan Rumah Layak Huni.
- (b) Penyebut Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi yang memenuhi kriteria penerima pelayanan.
- (c) Ukuran Persen (%).

b) Kualitas Barang/Jasa Pelayanan Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang

dapat diberikan dalam memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

1. Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi.
 - a. Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan Diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai penilaian appraisal berdasarkan NSPK yang berlaku;
 - b. Subsidi Uang Sewa Dapat diberikan kepadapenerima pelayanan yang tidak memiliki bukti hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang dihuni, dan tidak memiliki daya untuk menyewa hunian layak. Besaran bantuan subsidi sewa sebesar minimal 50 % dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan tarif sewa rumah layak huni yaitu nilai harga rumah layak huni dibagi 20 tahun tenor KPR maksimal;
 - c. Penyediaan Rumah Layak Huni Dapat dilaksanakan untuk relokasi program pemerintah yangberdampak cukup masif, untuk memenuhi jumlah kekurangan rumah sewa lebih dari 50 unit, dengan kualitas penyediaan dalam bentuk Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus. Kualitas rumah layakhunidenganspesifikasiramahbencana gempa sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - i. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
 - ii. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;
 - iii. Memenuhi kecukupan luas minimum 9 m²/orang.

4. Penerima Layanan

Penerima pelayanan dasar Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi ProgramPemerintah Kab/Kota yaitu setiap Rumah Tangga yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah,dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Tidak memiliki aset tanah dan/atau bangunan dalam Kabupaten/Kota yang sama, kecuali DKI Jakarta;
- b) Penghasilan dibawah UMP daerah setempat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai; dan
- c) Mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa.

B. Target Pencapaian SPM Daerah

Target pencapaian yang telah ditetapkan Daerah dengan batas waktu pencapaian pada Tabel berikut yaitu:

Target Daerah Pencapaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%	Setiap Tahun

Target Daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.

Target Daerah Pencapaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	FORMULASI	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$	100%	SetiapTahun/ maksimal penyelesaian selama 3 tahununtuk satukejadian bencana
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota	$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100\%$	100%	Setiap Tahun/ rencana kebutuhan dan rencana aksi

Target Daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018.

Capaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan dengan target capaian kinerja pemerintah dalam pelayanan adalah 100 %.

Adapun Realisasi Capaian SPM Daerah Tahun 2024 terhadap target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada SPM bidang Perumahan Rakyat seperti disajikan pada (Tabel 2.3 dan 2.4). Realisasi Capaian masing-masing jenis Pelayanan SPM dan Indikatornya dengan penjelasan sebagai berikut :

C. Realisasi Capaian SPM Daerah

Realisasi Daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021

No	JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR	Target Daerah Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/Kota.	100%	100%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota.	100%	100%

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018.

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	FORMULASI	TARGET TAHUN 2024	REALISASI TAHUN					
				DATA PERHITUNGAN TAHUN 2024		DATA PERHITUNGAN TAHUN 2023		DATA PERHITUNGAN TAHUN 2022	
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditanganipada tahun}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditanganipada tahun}} \times 100\%$	0% (14 Unit)	1240 Unit Rumah	0%	3 Unit Rumah	100%	3 Unit Rumah	100%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota	$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100\%$	1240 Warga Terdampak	0	0%	0	0%	0	0%

Realisasi jenis Pelayanan Dasar *Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/Kota. Tidak tercapai (0%).*

Semula kegiatan untuk Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota di anggaran pada APBD awal Tahun 2024 di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sub

kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, pagu dana sebesar Rp. 211.319.856 dengan target 4 unit rumah, dan sub kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana pagu dana sebesar Rp. 1.156.319.816 dengan target 15 unit rumah namun pada Perubahan Anggaran Tahun 2024 di hilangkan karena terjadi banjir bandang dan tanah longsor pada tanggal 7 -8 Maret 2024 yang melanda hampir keseluruhan kecamatan dan menjadi bencana Nasional dan menjadi kewenangan pusat untuk penanganan rehab rumah bencana.

Berdasarkan hasil Validasi Rumah yang terkenan bencana pada tanggal 7 - 8 Maret 2024 di Kabupaten Pesisir Selatan yang melanda hampir keseluruhan kecamatan terdapat 1240 unit rumah warga rusak. Pembangunan/Rehabilitasi rumah warga tersebut ditetapkan melalui SK. Bupati Pesisir Selatan Nomor : 100.3.3.2/220/Kpts /BPT-PS/2024 tanggal 24 Juni 2024 Tentang Penerima Bantuan Dana Siap Pakai Stimulam perbaikan/Pembangunan kembali rumah Masyarakat yang rusak akibat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan anggaran APBN Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kegiatan tersebut belum bisa dilaksanakan pada tahun 2024 dan direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Untuk pelaksanaan penanganan fisiknya melalui Dinas Terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

Realisasi Jenis Pelayanan Dasar *Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota.* Pada tahun 2024 tidak dapat tercapai (0%).

Kegiatan untuk fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota memang tidak di anggarakan pada APBD Tahun 2024 di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidu Kabupaten Pesisir Selatan karena memang tidak ada kegiatan atau program pemerintah yang menyebabkan relokasi rumah bagi masyarakat.

D. Anggaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Tersedia
1	Pengumpulan Data	Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp 45.144.875

			Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Rp. 26.820.106
2	Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah akibat bencana	Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rp. 25.319.856
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Rp.489.679.816

E. Dukungan Personil

Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana

1. Aparatur Sipil Negara : 8 Orang
2. Tenaga Fasilitator Lapangan : 1 Orang

F. Kendala, Permasalahan, Dan Solusi

Penanganan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup belum maksimal. Adapun penyebab dari masalah tersebut yakni:

1. Keterbatasan ketersediaan data dan informasi pendukung. Ketersediaan data dan informasi yang cukup terbatas dan kurang valid, sangat berdampak terhadap implementasi capaian target penerapan indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat. Data dan informasi yang digunakan akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam penetapan target sasaran dan tujuan dari masing-masing indikator SPM bidang Perumahan Rakyat yang ada.
2. Persyaratan administrasi dan teknis yang belum dapat dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak semua rumah yang terdampak bencana dapat diselesaikan melalui SPM Perumahan Rakyat.
3. Realisasi Anggaran untuk sub kegiatan **Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana dengan anggaran Rp. 489.679.816** tidak bisa terlaksana karena pada sub kegiatan tersebut semula dianggarkan untuk pengadaan tanah relokasi rumah akibat bencana yang berada di Nagari Ganting Mudik Utara Kampung

Batu Balah dan Kampung Langgai, tetapi pada saat proses pengadaan dari kajian teknis tidak mendapat persetujuan Keseuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang dengan alasan berada di Kawasan Pertanian Lahan Kering. Kemudian berdasarkan Perda RTRW No 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 -2023 bahwa rencana kegiatan tersebut berada pada :

- a. Kawasan Rawan Bencana banjir dinyatakan dengan tidak berpotensi
- b. Kawasan Rawan Gempa, dinyatakan dengan skala agak tinggi
- c. Kawasan Rwan Tanah Longsor dinyatakan dengan skala rendah
- d. Kawasan Rawan bencana Gerakan tanah dinyatakan dengan kelas tinggi
- e. Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dinyatakan dengan Kelas Tingkat Kerawanan Sedang

Dari permasalahan diatas, Kami menyusun rencana kerja untuk memaksimalkan kegiatan ini dengan cara, berkoordinasi langsung dengan pihak-pihak terkait seperti BPBD, Camat, serta Walinagari dalam mendapatkan data yang valid. Dalam rangka pemenuhan persyaratan yang telah diatur sebelumnya maka melalui Tenaga Fasilitator Lapangan, dilakukan pendampingan baik administrasi maupun teknis lapangan. Adapun pemahasan terkait anggaran, Dinas PERKIMTANLH melakukan koordinasi dengan BAPEDALITBANG dan BPKPAD untuk dapat menoptimalkan anggaran sehingga pemenuhan SPM dapat mencapai 100%.

5. BIDANG URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

(Sub Urusan Trantibum)

A. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Urusan Ketenteraan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 3 (tiga) Sub Urusan, yaitu:

- a. Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
- b. Sub Urusan Kebakaran; dan
- c. Sub Urusan Bencana Daerah.

Jenis Pelayanan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, dengan Jenis Pelayanan Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum.

Sedangkan Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Standar operasional prosedur Satpol PP;
- b. Standar sarana prasarana Satpol PP;
- c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
- d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Penerima Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota, yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Perkada.

B. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

SPM Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan yaitu mencakup Standar Pelayanan yang Terkena Dampak Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada dengan target pencapaian 100% meliputi:

1. Pelayanan kerugian materil.

Kerugian materil adalah berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada. Kerugian materil terdiri atas :

- Rusak ringan yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan perda dan perkada yang sedang dilakukan.
- Rusak sedang dan/atau berat yaitu kerugian yang dialami danditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan perda dan perkada yang sedang dilakukan.

2. Pelayanan pengobatan.

Berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cidera fisik ringan diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/ pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang/berat.

Selanjutnya Jenis layanan yang menjadi SPM adalah Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban umum terhadap jumlah penegakan Perda sesuai mutu, yang mana yang menjadi indikatornya adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada sesuai mutu yang ditargetkan mencapai 85 % pada tahun 2024.

C. Anggaran

Dalam pelaksanaan SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari 1 Program dan 5 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 105.494.286 untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Uraian Program/Kegiatan	Rencana dan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024				
		Rencana	Realisasi Keuangan	%	Sisa	%
I	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum pada kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	105.494.286				

1	Sub kegiatan penanganan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	24.336.200				
2	Sub kegiatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	33.240.000				
3	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan perkada	2.500.000				
4	Sub kegiatan penyusunan SOP ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat	999.900				
5	Sub kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik dan penanganan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum	44.418.186				
JUMLAH		105.494.286				

D. Dukungan Personil

Hal-hal yang menyangkut Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja salah satunya adalah dukungan personil. Adapun jumlah personil yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

Dukungan Personil SPM Trantibum

No	Uraian	Personil	
		Satpol PP	
		PNS	Non PNS
1	Pejabat Struktural / Fungsional Penyetaraan	12	-
2	Staf PNS	19	-
3	Petugas Piket	-	50
4	Satgas Trantib	-	25
5	Petugas Kebersihan	-	2
6	Staf Administrasi	-	4
7	Pramu Kantor	-	2
8	Supir	-	1
Jumlah		31	84
		115	

E. Hasil capaian

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	Capaian Tahun 2022	Tahun 2024			Keterangan (permasalahan)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Jumlah penduduk yang berhak mendapat layanan	Jumlah penduduk yang terlayani	Capaian = (4):(3)X100%				
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	1	1	100%	tidak dianggarkan	-	-	-
2	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dan perkara sesuai mutu..	98.02%	73	69	94,05%	tidak ada masalah	peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan
								peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
								Peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/Kota	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Permasalahan Dan Solusi

Walaupun pencapaian SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2024 hampir mencapai 100% namun terdapat beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Adapun beberapa permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Personil dalam melakukan Pelayanan masih dinilai kurang memadai; dan
2. Keamanan layanan belum sesuai dengan keinginan masyarakat yang memerlukan pelayanan yang optimal.

Adapun solusi atau tindak lanjut yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukan penambahan personil di Satpol PP yang ditempatkan di masing masing kecamatan (15 Kecamatan) yang berkompeten; dan



- b. Diperlukan pelatihan/penyegaran Bimtek Pelayanan PRIMA kepada *frontliners*/petugas layanan secara kontinue/berkelanjutan.

(Urusan Damkar)

A. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Urusan Ketenteraan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari beberapa Bidang antara lain Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yaitu:

1. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

SPM Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Jenis Pelayanan Dasar Bidang Pemadam Kebakaran daerah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebagaimana di atas paling sedikit memuat :

- a. Layanan respon cepat (ResponseTime) penanggulangan kejadian kebakaran.
- b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran.
- c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi.
- d. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran.
- e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Mutu Pelayanan Dasar meliputi :

- a. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.
- b. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi.
- c. Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi.
- d. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia.
- e. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran.
- f. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.

B. Target Pencapaian SPM Oleh Daerah

SPM Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilaksanakan oleh Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan yaitu mencakup standar pelayanan yang terkena dampak kebakaran akibat terjadinya kebakaran dengan target pencapaian 100%.

C. Alokasi Anggaran

Dalam pelaksanaan SPM Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang dilaksanakan oleh Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari 3 kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 267.999.992,- untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Alokasi Anggaran SPM Pemadam Kabakaran.

No.	Uraian Kegiatan	Alokasi Kegiatan Tahun 2024
1.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Rp. 184.463.442,-
2.	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengajuan Penyebab Kejadian Kebakaran.	Rp. 12.425.000,-
3.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.	Rp. 71.111.550,-

D. Dukungan Personil

Adapun jumlah personil yang dimiliki oleh Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Bidang 1 orang.
2. Kepala Seksi 2 orang.
3. Pejabat Fungsional 1 orang.
4. Jumlah Anggota Satgas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir selatan adalah 74 orang yang terdiri dari:
 - Posko Induk Damkar Painan 28 orang.
 - Posko Damkar Kambang 15 orang.
 - Posko Damkar Balai Selasa 15 orang.
 - Posko Damkar Tapan 14 orang.

STATUS	GOLONGAN (ORANG)				TOTAL (ORANG)
	IV	III	II	LAINNYA	
PNS	1	7	6		14
NON PNS				64	64
TOTAL	1	7	6	64	78

E. Hasil Capaian

Dari 100% target hasil capaian yang di bebaskan kepada Urusan Ketenteraan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Khusus Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Tahun 2024 berhasil dicapai 67,74 %.

F. Permasalahan Dan Solusi

Pencapaian SPM Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Tahun 2024 hanya mencapai 67,74 % namun terdapat beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Adapun beberapa permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Belum tersedianya Posko, Mobil Pemadam Kebakaran dan Personil di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan sehingga ada 1 posko yang menghandle 5 Kecamatan, 4 Kecamatan, 3 Kecamatan dan 2 Kecamatan.
2. Jarak yang cukup jauh menuju lokasi kejadian pada masing-masing Kecamatan.
3. Jalan yang rusak dan gang yang sempit sehingga menyulitkan bagi Armada Pemadam Kebakaran samapai ke titik lokasi kejadian.
4. Tidak tersedianya hydrant dan bak penampungan air pada beberapa lokasi pemukiman padat penduduk, pasar, sekolah dan kantor sehingga apabila air dalam tangki mobil habis maka terpaksa mencari titik air yang ada di daerah tersebut terkadang jarak lokasi kebakaran dengan titik air sangat jauh menyebabkan api tidak biasa dipadamkan dalam waktu 15 menit.
5. Belum terbentuknya Relawan Kebakaran (REDKAR) pada masing-masing Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan sosialisidan edukasi pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat.

Adapun solusi atau tindak lanjut yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Diperlukan penambahan Posko, Mobil Pemadam Kebaran dan Personil di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Perlu di bentuknya Relawan Kebakaran (REDKAR) pada masing-masing Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Ketersediaan hydrant dan bak penampungan air pada beberapa lokasi pemukiman padat penduduk, pasar, sekolah dan kantor.
- d. Perlunya anggaran yang cukup untuk melaksanakan sosialisasi dan edukasi pencegahan bahaya kebakaran kepada masyarakat.

(Sub Urusan Bencana)

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar sub urusan bencana menurut Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota meliputi :

1. *Pelayanan Informasi Rawan Bencana*

Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana paling sedikit memuat :

- a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana

2. *Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*

Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana setidaknya memuat :

- a. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- b. Penanganan Pasca Bencana
- c. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana paling sedikit memuat :

- a. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana
- b. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Bencana

B. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran
1	Meningkatnya Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana	Level Peningkatan Kapasitas Dalam Penanggulangan bencana	Level	5
2	Terwujudnya Penanganan bencana Yang Profesional	Persentase Kejadian Bencana yang bisa ditangani sesuai standar Kapasaitas Bencana	%	75
3	Pulihnya Daerah Terdampak Bencana	1.Persentase terbangunnya Fasilitas Publik Daerah Dampak Bencana.	%	25
		2. Persentase Pulihnya Aktivitas Masyarakat.	%	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	TARGET KINERJA UTAMA PADA TAHUN							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Berkurangnya Risiko Bencana.		Indeks Risiko Bencana	190	180	175	170	165	160	155	150
		1.Meningkatnya Kapasitas Dalam Menghadapi Bencana	Level Peningkatan Kapasitas Dalam Penanggulangan bencana	2	3	3	4	4	5	5	6
		2.Terwujudnya Penanganan bencana Yang Profesional	Persentase Kejadian Bencana yang bisa ditangani sesuai standar Kapasaitas Bencana	70%	71%	72%	73%	74%	75%	75%	76%

	3. Pulihan Daerah Terdampak Bencana	1. Persentase terbangunnya Fasilitas Publik Daerah Dampak Bencana.	10%	13%	17%	20%	23%	25%	30%	35%
		2. Persentase Pulihan Aktivitas Masyarakat.	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%

C. Anggaran

No	Program/ Kegiatan	Indikator Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian
1.	Program Penanggulangan Kebencanaan	Persentase masyarakat yang mengikuti simulasi bencana dan mendapat informasi kebencanaan dan pertolongan	1.737.367.705	1.682.691.597	96,85%
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 98.071.150	Rp. 97.330.389	99,24%
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp. 56.674.745	Rp. 56.388.500	99,49%
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 122.425.695	Rp. 121.961.050	99,62%
		Pencaraian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencan Kabupaten/Kota	Rp. 1.191.553.301	Rp. 1.174.268.280	98,54%
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencan Kabupaten/Kota	Rp. 94.290.110	Rp. 79.732.950	84,56%
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Rp. 72.927.007	Rp. 56.293.805	77,10%
		Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rp. 101.425.697	Rp. 96.716.623	95,35%

D. Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM sub urusan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh personil sebanyak 89 orang terdiri dari perempuan sebanyak 16 orang (17,39%), dan laki-laki 76 orang (82,60%). PNS sebanyak 22 orang dan Pegawai Kontrak 70 orang dengan sebaran sebagai berikut:

Komposisi Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Kondisi 31 Desember 2024

NO	GOLONGAN	ESELON			NON ESELON		JUMLAH
		II	III	IV	FUNGSIONAL	STAF	
1	GOLONGAN IV	1	2	0	0	1	4
2	GOLONGAN III	0	2	5	0	9	16
3	GOLONGAN II	0	0	0	0	2	2
4	GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0

5	Non PNS (PHL) Dan Satgas SAR dan TRC	0	0	0	0	67	67
	JUMLAH	1	3	1	5	79	89

E. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penerapan dan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Bencana Tahun 2024 adalah

- Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan kebencanaan
- Keterbatasan SDM dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan bidang bencana
- Belum sinerginya upaya implementasi SPM

2. Solusi

- Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan harus mengalokasikan anggaran yang memadai dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Bencana sebagai salah satu **urusan wajib pelayanandasar** yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi hak-hak warga negara/masyarakat.
- Menambah jumlah SDM dalam rangka menunjang pelaksanaan program dan kegiatan bidang bencana

6. BIDANG URUSAN SOSIAL

A. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Standar pelayanan minimal (SPM) adalah tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan wajib. Pelayanan dasar bidang sosial adalah pelayanan public untuk disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan-pengemis, dan korban bencana. Pelayanan dasar tersebut berupa rehabilitasi sosial dasar di luar panti. rehabilitasi sosial dasar Rehabilitasi sosial dasar di luar panti yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kab/Kota, sama seperti pemberian rehabilitasi sosial dasar dalam panti ditambahkan dengan layanan data pengaduan, dan layanan kedaruratan. setelah ditetapkannya kemendagri No. 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar pelayanan Minimal di Daerah. Penerapan SPM ini menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah, provinsi dan kab/kota. Metode yang digunakan adalah pengumpulan data dan wawancara dengan pendekatan kualitatif terhadap kebijakan yang ada. Hasil perhitungan merekomendasikan bahwa tahapan pendataan harus menjadi prioritas, dengan membangun aplikasi yang terintegrasi antar kab/kota.

B. Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian SPM oleh Daerah Target Pencapaian SPM oleh Daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Permendagri ini.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.	Jumlah Warga Negara Lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.	Jumlah Warga Negara Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Setiap Tahun

C. Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Anggaran	
			APBD	APBN
1.	Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan	Rp. 176.280.474	-

		pengemis memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		
2.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Rp. 341.595.474	-

D. Dukungan Personil

Kondisi Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024:

No	Jenis/ Kualifikasi	Jumlah
1.	Eselon	5
	a. IIb	1
	b. IIIa	1
	c. IIIb	3
	d. IVa	2
	e. VIb	1
2.	Jabatan Fungsional	7
	a. Perencana	0
	b. Penyuluh Sosial	3
	c. Penggerak Swadaya masyarakat	3
3.	Unsur Masyarakat	
	a. TKSK	13
	b. Tagana	50
	c. Sakti Peksos	1
	d. PSM	195
	e. Petugas Layanan SLRT	3

E. Hasil Capaian

Hasil Capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerimaan layanan.

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
I	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial		Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	463	463	-	100%
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	463	463	-	100%
	2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	106	106	-	100%
	3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pemeliharaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu	0	0	-	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
			Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan				
	4.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	106	106	-	100%
	5.	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	71	71	-	100%
	6.	Penyediaan Alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	60	60	-	100%
	7.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	60	60	-	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	60	60	-	100%
10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60	60	-	100%
11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	60	60	-	100%
12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	-	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
	13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	24	24	-	100%
	14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	24	24	-	100%
	15.	Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15	15	-	100%
II	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak di Luar Panti Sosial		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	43	43	-	100%
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	24	24	-	100%
	2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan	24	24	-	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
			Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti			
3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah YangBelum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	24	24	-	100%
4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah YangBelum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	43	43	-	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
5.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	10	10	-	100%
6.	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	14	14	-	100%
7.	Penyediaan Alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	107	107	-	100%
8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	43	43	-	100%
9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	43	43	-	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	3	3	-	100%
11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	3	3	-	100%
12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	3	3	-	100%
13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan	3	3	-	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
			Kabupaten/Kota				
	14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3	3	-	100%
	15.	Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	3	3	-	100%
III	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial		Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	598	598	-	100%
	1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	598	598	-	100%
	2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	2	2	-	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	2	2		100%
4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	2	2		100%
5.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan	73	73	-	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
			Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			
6.	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	434	434	-	100%
7.	Penyediaan Alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	47	47	-	100%
8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	47	47	-	100%
9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	47	47	-	100%
10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas	47	47	-	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi			
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)	
			Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				
	11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	-	100%
	12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	-	100%
	13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	24	24	-	100%
	14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	24	24	-	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
		Kewenangan Kabupaten/Kota				
15.	Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	-	100%
IV	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial			-	100%
1.	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	-	100%
2.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	2	2	-	100%
3.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Bagi Daerah Yang Belum	2	2	-	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
	Kendaraan Baru	Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan				
4.	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	2	2	-	100%
5.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	-	100%
6.	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima	0	0	-	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
			Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			
7.	Penyediaan Alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	-	100%
8.	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	-	100%
9.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	-	100%
10.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan	2	2	-	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus Dilayani)	Realisasi		
				Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
			Kabupaten/Kota			
11.	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	-	100%
12.	Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	-	100%
13.	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	-	100%
14.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2	2	-	100%
15.	Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan	0	0	-	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
			Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				
V	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kota		Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kota	2500	2500	-	100%
	1.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	2500	2500	-	100%
	2.	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	500	500	-	100%
	3.	Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10	10	-	100%
	4.	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan	500	500	-	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Target (Jumlah Yang Harus dilayani)	Realisasi		
					Jumlah total yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase (%)
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				
	5.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	500	500	-	100%

F. Kendala dan Permasalahan

Kendala dan permasalahan adalah hal hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan target SPM urusan sosial adalah :

- Belum semua Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dapat menerima bantuan karena masih terbenturnya dengan aturan yang ada. Hal tersebut disebabkan oleh persyaratan penerima bantuan harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Adapun solusi terhadap kendala tersebut adalah :

- Calon penerima bantuan yang belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di usulkan melalui mekanisme pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

BAB V PENUTUP

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 yang sudah menggunakan sistem yang terintegrasi secara online melalui sistem informasi elektronik SILPPD Kemendagri. Aplikasi SILPPD ini telah diterapkan selama beberapa tahun dan telah melalui beberapa perbaikan IKK yang lebih relevan dengan Pemerintahan Kabupaten.

Melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini diharapkan dapat dilihat laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, karena di dalamnya juga memuat Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP).

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 ini disusun sebagai dasar evaluasi Pemerintah Pusat untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja guna mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.

